Kemenkes
BBKK Tanjung Priok

LAPORAN TAHUNAN
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2025







KATA PENGANTAR



Puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin Nya Laporan Tahunan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 ini telah tersusun. Buku Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian data dan informasi pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan diharapkan dapat dijadikan sarana untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan rencana kegiatan lima tahunan 2025-2029. Prestasi yang diperoleh pada tahun ini merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur yang ada di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok untuk bersama mewujudkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tentunya selain ada prestasi yang diraih selama kurun waktu tersebut, masih ada hambatan yang belum sempat terselesaikan pada tahun ini dan akan diperbaiki dan ditingkatkan di tahun mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Laporan Tahunan ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga buku Laporan Tahunan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua.

Tanjung Priok, 23 Februari 2026
Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Tanjung Priok,

Dr. Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP.,MPH
NIP 196911121992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

BAB 1 1

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN 1

1.1 HAMBATAN TAHUN LALU 1

1.2 KELEMBAGAAN 2

1.3 SUMBER DAYA 3

TUJUAN DAN SASARAN KERJA 15

2.1 DASAR HUKUM 15

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR 16

BAB III 19

STRATEGI PELAKSANAAN 19

3.1 STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN 19

3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN 23

3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN 25

BAB IV 27

HASIL KERJA 27

4.1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 27

4.1.1 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN 27

4.1.2 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG 51

4.1.3 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN 70

4.1.4 PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS 95

4.1.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS 130

4.1.6 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KETATAUSAHAAN/DUKUNGAN MANAJEMEN 138

4.2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 151

4.3. PENCAPAIAN KINERJA 152

4.4. REFORMASI BIROKRASI 153

4.5. PENGHARGAAN YANG DITERIMA 156

BAB V 157
KESIMPULAN DAN SARAN 157
5.1. KESIMPULAN 157
5.2. SARAN-SARAN 158

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan 4
Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir 5
Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana yang dimiliki 6
Tabel 1. 4 Perjalanan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024 8
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok 17
Tabel 3. 1 Strategi Pelaksanaan Tujuan 19
Tabel 4. 1 Hasil Kegiatan Konsultasi Teknis Program Wilker Ke Induk Tahun 2025 31
Tabel 4. 2 Hasil Kegiatan Koordinasi Validasi Data Surveilans Tahun 2025 46
Tabel 4. 3 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 49
Tabel 4. 4 Sinyal SKD KLB Dan Bencana Yang Di Respon Kurang Dari 24 Jam 50
Tabel 4. 5 Pengawasan Lalu Lintas Komoditi Omkaba Ekspor Impor 55
Tabel 4. 6 Daftar Nama Peserta On The Job Training Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 64
Tabel 4. 7 Pelatihan Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi Tahun 2025 66
Tabel 4. 8 Koordinasi Teknis Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan dan Kekarantinaan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025 69
Tabel 4. 9 Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025 70
Tabel 4. 10 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2025 93
Tabel 4. 11 Tabel Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan BBKK Tanjung Priok 94
Tabel 4. 12 Tabel Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 94
Tabel 4. 13 Hasil Pencapaian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik BBKK Tanjung Priok. 156

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan 4
Grafik 4. 1 Distribusi Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 52
Grafik 4. 2 Distribusi Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 53
Grafik 4. 3 Distribusi Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 54
Grafik 4. 4 Distribusi Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Luar Negeri 54
Grafik 4. 5 Distribusi Penerbitan COP 57
Grafik 4. 6 Distribusi Perbandingan Penerbitan COP tahun 2024 dan 2025 58
Grafik 4. 7 Distribusi Penerbitan PHQC di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok 58
Grafik 4. 8 Distribusi Perbandingan Penerbitan PHQC 59
Grafik 4. 9 Distribusi Penerbitan SSCEC 59
Grafik 4. 10 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCEC 60
Grafik 4. 11 Distribusi Penerbitan SSCC 60
Grafik 4. 12 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCC 61
Grafik 4. 13 Distribusi Penerbitan Health Certificate 61
Grafik 4. 14 Distribusi Perbandingan Penerbitan Health Certificate 62
Grafik 4. 15 Distribusi Penerbitan Buku Kesehatan Kapal 62
Grafik 4. 16 Distribusi Perbandingan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal 63
Grafik 4. 17 Distribusi Penerbitan P3K Kapal Di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 63
Grafik 4. 18 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Penyediaan Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 72
Grafik 4. 19 Distribusi Hasil Pemeriksaan Pengujian Kualitas Fisik Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 73
Grafik 4. 20 Distribusi Hasil Pemeriksaan Kimia Air Minum Di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 74
Grafik 4. 21 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 75

Grafik 4. 22 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 77
Grafik 4. 23 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Sampel Makanan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 77
Grafik 4. 24 Distribusi Sarana Tempat Fasilitas Umum Yang Memenuhi Persyaratan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 80
Grafik 4. 25 Distribusi Hasil Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 82
Grafik 4. 26 Distribusi Jumlah Tikus Tertangkap Pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 83
Grafik 4. 27 Distribusi Indeks Pinjal Pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 83
Grafik 4. 28 Distribusi Indeks Populasi Lalat berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 85
Grafik 4. 29 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Lalat Pasca Tindakan Pengendalian di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 86
Grafik 4. 30 Distribusi Indeks Populasi Kecoak Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Kecoak di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 87
Grafik 4. 31 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Kecoak Pasca Tindakan Pengendalia di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 88
Grafik 4. 32 Distribusi Jumlah Bangunan Diperiksa Pada Kegiatan Survei Vektor DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 89
Grafik 4. 33 Distribusi Jumlah Container di Periksa Pada Kegiatan Layanan Survei Vektor DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 90
Grafik 4. 34 Distribusi Angka Bebas Jentik (ABJ) di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 90
Grafik 4. 35 Distribusi Penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 109
Grafik 4. 36 Distribusi jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 110
Grafik 4. 37 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik selain penumpang BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 111
Grafik 4. 38 Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Dalam Negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 ... 112
Grafik 4. 39 Distribusi pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 113

Grafik 4. 40 Distribusi pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 114
Grafik 4. 41 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 115
Grafik 4. 42 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 ... 116
Grafik 4. 43 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS berdasarkan Penemuan Kasus Positif BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 117
Grafik 4. 44 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS berdasarkan Tempat Pelaksanaan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 118
Grafik 4. 45 Distribusi Layanan Skrining Terduga TB BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 119
Grafik 4. 47 Distribusi Pertolongan Gawat Darurat BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 120
Grafik 4. 48 Distribusi Pelayanan Rujukan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 121
Grafik 4. 49 Distribusi Penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok tahun 2025 122
Grafik 4. 50 Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 123
Grafik 4. 51 Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 124
Grafik 4. 52 Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 125
Grafik 4. 53 Distribusi Pemakaian Vaksin Thypoid BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 126
Grafik 4. 54 Distribusi Pemakaian Vaksin Polio BBKK Tanjung Priok Tahun 2025..... 127
Grafik 4. 55 Distirbusi Penerbitan SKPK/KIR BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 128
Grafik 4. 56 Rekapitulasi Pemeriksaan Laboratorium Klinik BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 129
Grafik 4. 57 Penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok Tahun Anggaran 2025 152

BAB 1
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

1.1 HAMBATAN TAHUN LALU

1) Proses pengawasan dalam rangka melaksanakan kegiatan surveilans Epidemiologi terkendala dengan tidak adanya kendaraaan yang cukup serta memadai
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait surveilans epidemiologi belum maksimal, sehingga terjadi selisih data akibat kurang disiplinnya petugas dalam tertib administrasi diantaranya masih ada petugas yang tidak entri data lengkap di aplikasi SE
3) Pengetahuan petugas masih kurang dalam hal ini pegawai baru yang ditugaskan melaksanakan kegiatan pelayanan sehingga petugas hanya melaksanakan kegiatan yang ditugaskan atas sepengetahuan pribadi saja.
4) Pelaksanaan kegiatan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan yang masih belum dimengerti sepenuhnya
5) Masih ditemukan adanya faktor risiko di alat angkut karena masih rendahnya kesadaran dari awak kapal dalam menjaga kesehatan kapal dari faktor risiko yang mungkin terbawa
6) Proses pemeriksaan kapal dengan status karantina terkendala dengan tidak adanya kendaraan yang memadai/*safety* bagi petugas apalagi saat cuaca tidak kondusif, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus
7) Kemampuan Agen Pelayanan yang berbeda-beda dalam pembuatan dan pembayaran billing sehingga rentan terjadi kesalahan berupa: kekurangan, kelebihan dan kesalahan pembayaran sehingga berpengaruh pada laporan PNBP
8) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait dengan tertib administrasi dipelayanan dokumen kesehatan kapal belum maksimal, karena kurang disiplinya petugas dalam tertib administrasi
9) Aplikasi Surveilans Epidemiologi (SE) yang sudah lama dan tidak ada *maintanance* sehingga tidak bisa digunakan untuk *update* data kapal yang baru
10) Alat pengolah data berupa laptop dan PC di Tim Kerja 2 yang sering bermasalah karena pengadaan yang cukup lama
11) Rekomendasi hasil pemeriksaan Inspeksi Kesehatan Lingkungan mengenai sarana dan prasarana penyediaan air di pelabuhan tidak ditindaklanjuti dengan segera oleh pengelola.

12) Kegiatan pengawasan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di pelabuhan belum maksimal karena sebagian besar pemilik gedung/bangunan di pelabuhan belum melaksanakan program Jumantik secara optimal.
13) Permohonan izin RS/ Klinik pada pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV yang meningkat drastis karena tidak adanya aturan UU maupun PERDIRJEN tentang pembatasan jumlah penerbitan izin RS/Klinik.
14) Keterbatasan anggaran tidak sesuai dengan jumlah permohonan izin baru RS/ Klinik.
15) Keterbatasan jumlah ICV yang diberikan ke masing-masing RS/Klinik pelaksana vaksinasi internasional akibat peningkatan permohonan izin baru.
16) Aplikasi SINKARKES masih sering mengalami gangguan sistem akibat proses pemeliharaan, sehingga memperlambat penginputan data dan berpotensi menimbulkan duplikasi data. Kondisi ini berdampak pada efisiensi pelayanan dan memerlukan upaya verifikasi data tambahan oleh petugas.

1.2 KELEMBAGAAN

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) berubah menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) dengan tugas pokok dan fungsi yang masih sama yaitu cegah tangkal masuknya penyakit di pintu masuk Negara. Sesuai Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
2. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I
3. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II
4. Loka Kekarantinaan Kesehatan

Sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja, untuk itu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok Nomor HK.02.03/C.IX.5/877/2024 tentang Tim Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

1. Tim kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan adalah melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

B. Fungsi

a. Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.
b. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
c. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor.
d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali.
e. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring Surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan internasional.
f. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan haji dan perpindahan penduduk.
g. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan Surveilans kesehatan pelabuhan.

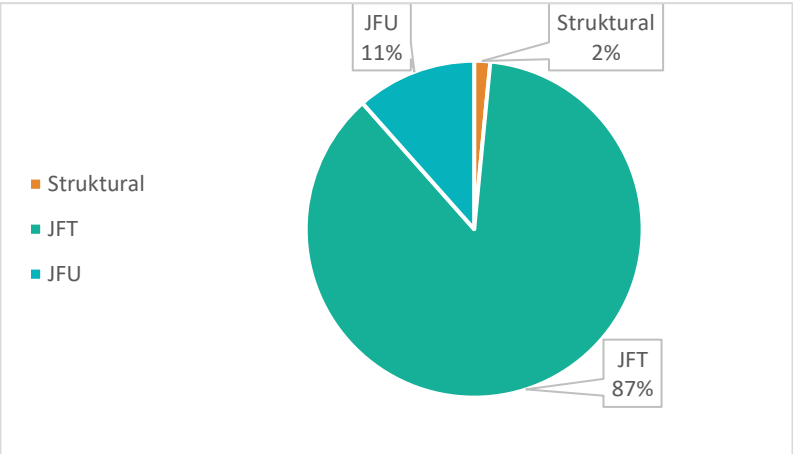
1.3 SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.

a. Menurut Jabatan

Grafik 1. 1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan



Dari grafik 1.1 terlihat diketahui distribusi pegawai berdasarkan jabatan yang diduduki yaitu Jabatan Struktural sebanyak 2 orang (2%), Jabatan fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 113 orang (87%), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 15 orang (11%).

Tabel 1. 1 Distribusi Pegawai Menurut Jabatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok	1
2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
3	Administrator Kesehatan Ahli Muda (JFT)	2
4	Analis Anggaran Ahli Pertama (JFT)	1
5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JFT)	1
6	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JFT)	1
7	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JFT)	1
8	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (JFT)	1
9	Arsiparis/Pranata Kearsipan (JFU)	1
10	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	1
11	Arsiparis Terampil (JFT)	2
12	Dokter Ahli Madya (JFT)	3
13	Dokter Ahli Muda (JFT)	10
14	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	1
15	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	4
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	2
17	Entomolog Kesehatan Mahir (JFT)	2
18	Entomolog Kesehatan Terampil (JFT)	3
19	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JFT)	7
20	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)	11
21	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JFT)	7
22	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JFT)	2

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
23	Epidemiolog Kesehatan Penyelia (JFT)	2
24	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JFT)	5
25	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JFU)	1
26	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya (JFT)	1
27	Perawat / Pengelola Keperawatan (JFU)	2
28	Asisten Perawat (JFU)	1
29	Perawat Mahir (JFT)	7
30	Perawat Penyelia (JFT)	5
31	Perawat Terampil (JFT)	7
32	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	1
33	Perencana Ahli Pertama (JFT)	1
34	Pranata Keuangan APBN Mahir (JFT)	1
35	Pranata Keuangan APBN Terampil (JFT)	1
36	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JFT)	1
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JFT)	1
38	Sanitarian Ahli Madya (JFT)	3
39	Sanitarian Ahli Muda (JFT)	5
40	Sanitarian Ahli Pertama (JFT)	6
41	Sanitarian Mahir (JFT)	4
42	Sanitarian Penyelia (JFT)	1
43	Sanitarian Terampil (JFT)	1
44	Pengelola Instalasi Air dan Listrik (JFU)	1
45	Pengemudi (JFU)	1
46	Operator Layanan Operasional (SMU) (JFU)	5
47	Penata Layanan Operasional (JFU)	1
	Total	**130**

b. Menurut Pendidikan

Tabel 1. 2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Menengah Pertama	1
2	Sekolah Menengah Atas	6
3	SPK	2
5	Akademi Kesehatan Lingkungan	1
6	D.III Keperawatan	17
7	D.III Farmasi	3
8	D.III Kesehatan Lingkungan	13
9	D.III Analis Kesehatan	2
10	D.III Teknik Radiologi	1
11	D. III Kebidanan	1
12	D.III Teknik Komputer Teknik Elektro	1
13	D.III Akuntansi	3

NO	NAMA PENDIDIKAN	JUMLAH
14	D.IV Kesehatan Lingkungan	1
15	S.1 Kedokteran Umum	9
16	S.1 Keperawatan	2
17	S.1 Farmasi	2
18	S.1 Kesehatan Masyarakat	33
19	S.1 Entomolog	1
20	S.1 Ekonomi	2
21	S.1 Akuntansi	2
22	S.1 Teknik Informatika	1
23	Apoteker	1
24	S.2 Kesmas/Kesling	22
25	S.2 MSi	1
26	Magister/Master	1
27	S.3 Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	1
TOTAL		**130**

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1. 3 Sarana dan prasarana yang dimiliki

No	Nama Sarpras	Luas (m^2) / Unit	Status Gedung	Status Tanah
1	Kantor Induk			
	Gedung A	2.450	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
	Gedung B	579, 80	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
	Gedung C	627	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
	Pos Satpam	32	PT. PELINDO II	PT. PELINDO II
2	Wilayah Kerja			
	Sunda Kelapa	385 + 42 = 427	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
	Marunda	385	Kemenkes RI	KBN Marunda
	Muara Baru	96,46	Kemenkes RI	Kemenkes RI
	Muara Angke	22, 50	Pemda DKI UP3 Muara Angke	Pemda DKI
	Kali Baru	41	Kemenkes RI	PT. PELINDO II
3	Tanah untuk Pendidikan dan Pelatihan	15.639	-	Kemenkes RI
4	Tanah Bangunan Rumah Dinas	732	Kemenkes RI	Kemenkes RI

No	Nama Sarpras	Luas (m^2) / Unit	Status Gedung	Status Tanah
5	Gedung dan Bangunan Rumah Dinas	152	Kemenkes RI	Kemenkes RI
6	Kendaraan Operasional	total 31 unit sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 30 unit		
	Mobil Ambulance	12 unit Sedang proses penghapusan 1 unit Jadi total 11 unit		
7	Perangkat Pengolah Data (PC, Laptop, Printer)	207 unit		

C. Dana

Anggaran pada DIPA awal Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025 yang berasal dari APBN sebesar Rp 35.393.444.000, yang terdiri dari Rp 30.448.724.000 dari sumber Rupiah Murni (RM) dan Rp 4.944.720.000 dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, sebesar Rp 5.850.998.000 awalnya diblokir. Namun, melalui Surat Penetapan Revisi Tahap 6 dan Relaksasi Blokir Tahap 4 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Ditjen Penanggulangan Penyakit, sebagian blokir tersebut telah dibuka kembali sebesar Rp 172.806.000, sehingga anggaran efektif yang dapat digunakan BBKK Tanjung Priok menjadi Rp 29.715.252.000. Selain itu, dalam proses penyesuaian anggaran tersebut, terdapat pengurangan pagu belanja pegawai sebesar Rp 275.000.000, yang dilakukan sebagai bagian dari revisi DIPA tahap akhir tahun 2025. Pengurangan ini disebabkan oleh kelebihan alokasi awal yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan data realisasi dan proyeksi kepegawaian hingga akhir tahun. Langkah ini merupakan bentuk penyesuaian teknis untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, bukan indikasi kegagalan perencanaan.

Selama tahun anggaran 2025 terdapat beberapa kali Revisi DIPA, yang dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. 4 Perjalanan Revisi DIPA Tahun Anggaran 2024

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
1	02 Desember 2024	35.393.444.000	DIPA Awal	Terdapat blokir perjadin akun 524 sebesar 50%
2	22 Januari 2025	35.393.444.000	Revisi POK ke-1	- Perubahan nomenklatur pada kegiatan RO TBC.001 - Perubahan kode pada kegiatan RO EBA.960 - Pergeseran anggaran antar RO dan subkomponen untuk berlangganan aplikasi berbayar - Pergeseran anggaran pada akun berlanja berlangganan telepon
3	04 Februari 2025	35.393.444.000	Revisi DIPA ke-1	Revisi Halaman 3 DIPA
4	21 Februari 2025	35.393.444.000	Revisi DIPA ke-2	Revisi efisiensi belanja barang dan modal sebesar Rp5.850.998.000
5	13 Maret 2025	35.393.444.000	Revisi POK ke-2	- Pergeseran anggaran antar akun pada RO Pelayanan kesehatan di pelabuhan/bandara/lintas batas - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada RO operasional dan pemeliharaan Kantor
6	16 April 2025	35.393.444.000	Revisi DIPA ke-3	Revisi Halaman 3 DIPA
7	14 Mei 2025	35.393.444.000	Revisi POK ke-3	- Pergeseran anggaran antar akun pada RO layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut - Pergeseran anggaran antar akun pada RO pelatihan Kesehatan - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada RO operasional dan pemeliharaan

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
				kantor (efisiensi pagu listrik ke kegiatan lain)
8	16 Juni 2025	35.393.444.000	Revisi POK ke-4	- Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Koordinasi Teknis Program Pengendalian Risiko Lingkungan di BBKK - Perubahan nomenklatur, pergeseran anggaran dan penambahan subkomponen pada subkomponen RO layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut - Pergeseran anggaran antar akun belanja barang pada subkomponen Pengadaan Bahan /Alat Bahan Medis dan Non Medis untuk Pelayanan dan Advokasi Kesehatan - Pergeseran anggaran antar akun dan subkomponen pada RO Operasional dan Pemeliharaan Kantor
9			Revisi DIPA ke-4 (BATAL)	Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Koordinasi Teknis Program Pengendalian Risiko Lingkungan di BBKK
10	06 Agustus 2025	35.393.444.000	Revisi DIPA ke-5	- Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Verifikasi dan Pengawasan Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV, Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM, Koordinasi Teknis Surveilans

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
				dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan - pergeseran anggaran perjadin ke belanja konsumsi pada subkomponen Koordinas Surveilans dan SKDR dan Pertemuan Epidemiologi dan Kekarantinaan, Koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum - Pegeseran anggaran antar akun belanja pegawai - Pergeseran anggaran antar Layanan Manajemen SDM Internal
11	06 Agustus 2025	35.393.444.000	Revisi POK ke-5	Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen
12	06 Oktober 2025	35.393.444.000	Revisi DIPA ke-6	Revisi Halaman 3 DIPA
13	23 Oktober 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-7 (DJA)	Revisi anggaran efisiensi belanja pegawai dikarenakan kelebihan pagu belanja tunjangan kinerja sebesar Rp275,000,000,00
14	24 Oktober 2025	35.118.444.000	Revisi POK ke-6	- Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Pergeseran anggaran antar akun perjadin antar subkomponen pada kegiatan Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan - Pergeseran anggaran antar akun perjadin antar subkomponen pada kegiatan Tim Kerja Pengawasan Faktor

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
				Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang - Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus - Pergeseran anggaran antar akun perjadin pada subkomponen Koordinasi dan advokasi layanan publik kekarantinaan Kesehatan - Pergeseran antar subkomponen pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal dan belanja 002 - Pergeseran antar subkomponen pada KRO Layanan Manajemen SDM Internal - Pergeseran antar subkomponen pada KRO Layanan Manajemen Kinerja Internal
15	27 Oktober 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-8	Revisi pemutakhiran POK
16	05 November 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-9	- Pergeseran anggaran akun perjadin ke akun belanja barang antar subkomponen pada RO layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut - Pergeseran anggaran akun perjadin ke akun belanja barang antar subkomponen pada RO Layanan umum - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada belanja mengikat (001 dan 002)

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
17	19 November 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-10	Pergeseran anggaran belanja mengikat 001 ke 002 sebesar Rp299.988.000,00
18	27 November 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-11	Revisi pemutakhiran POK - Pergeseran anggaran pada subkomponen Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada RO layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut - Pergeseran anggaran akun perjalanan dinas pada RO Koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum - Pergeseran anggaran antar akun pada belanja pegawai 001 - Pergeseran anggaran akun perjalanan dinas pada RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran
19	07 Desember 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-12	- Pergeseran anggaran akun perjadin ke akun belanja barang antar subkomponen pada RO layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut - Pergeseran anggaran perjalanan dinas pada subkomponen Koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada belanja mengikat (001 dan 002) - Pergeseran anggaran akun perjalanan dinas pada RO

NO.	REVISI DIPA	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN DIPA	ALASAN PERUBAHAN
				Layanan Perencanaan dan Penganggaran
20	11 Desember 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-13	- Pergeseran anggaran pada subkomponen Koordinasi Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Pergeseran anggaran antar subkomponen pada belanja mengikat (001 dan 002) - Pergeseran anggaran akun perjalanan dinas ke akun belanja barang pada RO Layanan Reformasi Kinerja
21	29 Desember 2025	35.118.444.000	Revisi DIPA ke-14	Revisi pagu minus pada belanja pegawai

Realisasi anggaran Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 29.117.583.519,- atau sebesar 82,91 % dari pagu anggaran sebesar Rp 35.118.444.000,-. Realisasi anggaran yang berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 27.644.472.851,- (91,62%) dari total anggaran Rp 30.173.724.000,- sedangkan realisasi anggaran bersumber PNBP sebesar Rp 1.473.110.668,- (27,79%) dari total anggaran Rp 4.944.720.000,-. Keseluruhan sisa anggaran BBKK Tanjung Priok tahun 2025 sebesar Rp 6.000.860.481,- atau 17,09% dari keseluruhan anggaran.

Dibandingkan dengan tahun 2024 realisasi penerimaan yang bersumber dari Rupiah Murni mengalami penurunan sebanyak 5,61% sedangkan untuk realisasi penerimaan yang bersumber dari PNBP mengalami penurunan sebanyak 69,53%. Realisasi anggaran BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 14,55 % bila dibandingkan tahun 2024 (jika memakai pagu awal sebelum blokir).

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2025, BBKK Tanjung Priok mencatat persentase realisasi sebesar 99,24% jika dihitung berdasarkan pagu efektif sebesar Rp 29.340.322.000 yang merupakan hasil penyesuaian setelah kebijakan efisiensi nasional dan relaksasi blokir. Persentase ini menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi, dengan belanja pegawai mencapai 99,16% dan belanja barang mencapai 99,42%, sementara belanja modal tidak dilaksanakan (0%). Dalam konteks ini, capaian 99,24%

menunjukkan bahwa satker mampu menjalankan kegiatan prioritas secara optimal meskipun dalam kerangka anggaran yang telah disesuaikan.

Namun, jika dibandingkan dengan pagu awal sebelum blokir sebesar Rp 35.118.444.000, maka persentase realisasi turun menjadi 82,91%. Penurunan ini bukanlah indikator kegagalan, melainkan refleksi dari kebijakan efisiensi nasional yang menyebabkan sebagian besar alokasi anggaran (Rp5.850.998.000) diblokir. Dengan kata lain, realisasi Rp 29.117.583.519 tetap sama, namun dasar perhitungan berubah: dari pagu total menjadi pagu efektif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja BBKK Tanjung Priok sangat baik dalam konteks anggaran yang telah dikurangi, karena realisasi mendekati 100% dari pagu yang benar-benar dapat digunakan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA

2.1 DASAR HUKUM

1. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. UU No 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. PP No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. PP No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
8. PP No 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
9. PP No 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024;
13. Kepmenkes No. 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;
14. Kepmenkes No. 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/2149/2023 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
16. Permenkes 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
17. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
18. Permenkes No 1501 Tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangannya;

19. Permenkes No.2052 / Menkes / Per/ X / 2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
20. Permenkes No. 34 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga pada Alat Angkut di Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Darat;
21. Permenkes No. 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara, Sehat;
22. Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
23. Permenkes No 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
24. Permenkes No. 40 Tahun 2015 tentang Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal
25. Permenkes No. 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional
26. Permenkes No. 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
27. Permenkes No 10 Tahun 2023 Organisasi Tentang Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
28. Permenkes No. 2 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan PP No. 66 Tahun 2014
29. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 Tentang SOTK Kemenkes
30. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
31. *International Health Regulation* (IHR) Tahun 2005
32. Rencana Aksi Kegiatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025-2029
33. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan BBKK Tanjung Priok di Pintu Masuk Negara

2.2 TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

2.2.1 Tujuan

Mewujudkan Pelabuhan Sehat melalui upaya peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat. Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakitdan pengelolaan kedaruratan masyakat secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui :

1. Pelaksanaan Surveilans Karantina Kesehatan
2. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor Zoonotik
3. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
5. Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

6. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.
7. Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Surveilans dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
8. Pelaksanaan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program P2P

2.2.2 Sasaran

Sasaran strategis dari penyelenggaraan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pintu gerbang Negara di BBKK Tanjung Priok yaitu : Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara sebesar 100%", dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Deteksi Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 0,93 pada akhir tahun 2025;
b. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% pada akhir tahun 2025;
c. Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN sebesar 1 pada akhir tahun 2025;
d. Nilai kinerja anggaran yaitu 85,5 pada akhir tahun 2025;
e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu 94 pada akhir tahun 2025;
f. Kinerja implementasi WBK satker yaitu 82,5 pada akhir tahun 2025;
g. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya yaitu 82,5% pada akhir tahun 2025.
h. Persentase Realisasi Anggaran yaitu 96,5% pada akhir tahun 2025.

2.2.3 Indikator

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja BBKK Tanjung Priok

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET 2025
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0,93
		2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%
		3	Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET
				2025
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	85,5
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94
		6	Kinerja implementasi WBK satker	82,5
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82,5%
		8	Persentase Realisasi Anggaran	96,5%

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN

3.1 STRATEGI PELAKSANAAN TUJUAN

Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Strategi Pelaksanaan Tujuan

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1.	Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara	a) Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran; b) Sosialisasi dan Diseminasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah c) Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk d) Pembelian bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan kapal secara online e) Pengadaan formulir penerbitan dokumen karantina kesehatan f) Pengawasan kedatangan kapal dari dalam dan luar negeri sesuai dengan SOP g) Pengadaan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan h) Pengawasan Tindakan penyehatan alat angkut i) Kordinasi teknis pengawasan faktor risiko Kesehatan dan kekarantinaan alat angkut dan barang j) Pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum di wilayah BBKK Tanjung Priok k) Pengamanan makanan/minuman, laik sehat jasa boga, dan pengawasan supplier bahan makanan kapal di BBKKK Tanjung Priok l) Pengelolaan limbah medis di wilayah BBKK Tanjung Priok m) Pengawasan sanitasi lingkungan sarana bangunan dan tempat fasilitas umum (TFU) di wilayah BBKK Tanjung Priok n) Pengawasan tempat pelolaan pestisida di wilayah BBKK Tanjung Priok o) Layanan pengendalian vektor PES di wilayah BBKK Tanjung Priok p) Layanan pengendalian vektor diare di wilayah BBKK Tanjung Priok q) Layanan pengendalian vektor DBD dalam rangka pengendalian vektor nyamuk di wilayah BBKK Tanjung Priok r) Koordinasi teknis program pengendalian risiko lingkungan s) Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, misalnya PT. Pelni, Bea Cukai, Balai Besar Karantina Pertanian, PT. Pelindo, dan KSOP; t) Menerbitkan rekomendasi dan saran tindak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan lingkungan kepada lintas sektor. u) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target kegiatan secara berkala melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. v) Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Natal tahun Baru (NATARU) w) Koordinasi dan evaluasi kegiatan VCT mobile dan deteksi dini terduga TB

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
		x) Meningkatkan kewaspadaan dini melalui pengamatan pada website WHO terhadap wilayah/negara terjangkit KKMD/PHEIC. y) Mengimplementasikan sistem digital untuk pelaporan dan pencatatan inspeksi alat angkut. z) Mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk mengintegrasikan data deteksi risiko secara real-time antara pelabuhan/bandara dan PLBDN. aa) Melibatkan pengguna jasa (penumpang, operator alat angkut, dan pelaku usaha) dalam upaya deteksi risiko melalui kampanye dan edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan.
2.	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	a. Melakukan sosialisasi target kegiatan ke seluruh wilayah kerja pada awal tahun anggaran; b. Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut c. Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM d. Simulasi Penanggulangan Penyakit Berpotensi Wabah e. Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi f. Koordinasi Kekarantinaan Dengan Fasyankes g. Koordinasi Surveilans Dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon h. Pengolahan dan Pelaporan Data Surveilans di Pintu Masuk Negara i. Koordinasi Validasi Data Surveilans j. Verifikasi pengawasan RS / klinik pratama dalam rangka penerbitan buku ICV k. Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS l. Layanan survei faktor risiko penyakit TB m. Pelaksanaan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS n. Pelaksanaan survei faktor risiko penyakit TB o. Koordinasi dan sosialisasi implementasi penerbitan e- ICV untuk klinik dan rumah sakit p. Penguatan jejaring klinik dan RS pelaksana pelayanan vaksinasi internasional q. Koordinasi dan sosialisasi implementasi penerbitan e- ICV untuk agen awak kapal r. Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus s. Pengadaan bahan/alat bahan media dan non medis untuk pelayanan dan advokasi kesehatan t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian target kegiatan juga berkontribusi pada keberhasilan dalam pengendalian faktor risiko; u. Melakukan pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan; v. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan terkait kesehatan lingkungan di area pelabuhan/ kepada seluruh lintas sektor terkait, yaitu Kantor Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran, Beacukai, Imigrasi, Badan Pengelola Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran; w. Pencegahan dan penanggulangan masuk dan keluarnya penyakit

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
		karantina dan penyakit menular tertentu di pintu masuk negara dan wilayah melalui pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan; x. Menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan lingkungan kepada lintas sektor dan saran tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan; y. Meningkatkan peran operator pelabuhan dalam menciptakan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan dan mencegah risiko penularan penyakit; z. Pemeriksaan higiene sanitasi alat angkut dan pengawasan tindakan sanitasi alat angkut seperti disinseksi, disinfeksi, fumigasi maupun dekontaminasi; aa. Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum, gedung, bangunan dan perusahaan di pelabuhan dan bandar udara, serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi sanitasi tempat-tempat umum; bb. Inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di pelabuhan dan bandar udara serta saran-saran perbaikan dari kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis; cc. Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan; dd. Melakukan penyuluhan Kesehatan kepada awak kapal untuk menghilangkan faktor risiko kesehatan yang mungkin ada
3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	a. Menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk penanggulangan kasus PHEIC b. Melakukan pengumpulan, analisa data, diseminasi hasil surveilans c. Penyediaan bahan dan peralatan yang memadai dan sarana prasarana yang memadai d. Melakukan penyelidikan epidemiologi kasus terskrining/suspek, e. Melakukan penanganan kasus suspek sesuai dengan SOP f. Menyampaikan rekomendasi hasil kegiatan pengendalian vektor dan sanitasi lingkungan kepada operator pelabuhan/bandar g. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, misal : syahbandar, otoritas pelabuhan, otoritas bandara, pengelola pelabuhan, pengelola bandara, imigrasi, bea cukai, balai besar karantina pertanian, balai besar karantina ikan, maskapai, agen pelayaran, puskesmas/rumahsakit/klinik sekitar pelabuhan/ bandara, dll.
4.	Nilai kinerja anggaran	a. Melakukan Rekonsiliasi data, melakukan monitoring, evaluasi dan melakukan pengisian emonev DJA. Pemantauan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan, sehingga meminimalisir adanya gap antara rencana penarikan dana/ rencana pelaksanaan kegiatan dengan realisasinya. b. Koordinasi Tim kerja yang ada di BBKK Tanjung Priok dengan penanggungjawab keuangan dalam proses pencairan anggaran berjalan dengan baik sehingga meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Nilai Indikator Kinerja	a. Telah Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan. b. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; c. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dilakukan revolving dalam jangka waktu satu bulan sekali dengan syarat sudah mencapai 50%; d. Tidak adanya keterlambatan penginputan ADK Kontrak di Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); e. Tidak ada kesalahan/pengembalian SPM: operator melakukan pengecekan terhadap redaktur, nomer rekening penerima, akun yang digunakan sebelum melakukan penginputan SPM; f. Menetapkan metode perhitungan capaian *output* untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk *output* teknis yang memiliki; g. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian *output* dengan penyerapan anggaran; h. Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir); i. Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi; j. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.
6.	Kinerja implementasi WBK satker	a. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas; b. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi WBK secara berkala c. Melakukan koordisasi dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P dan Itjen terkait pelaksanaan *pre assessment;* d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat; e. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat: Standar Pelayanan, Budaya Pelayanan Prima dan Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.
7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	a. Penugaskan pegawai yang belum mengikuti pelatihan untuk dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga; b. Menyediakan alokasi anggaran untuk mengikuti pelatihan melalui DIPA BBKK Tanjung Priok; c. Memberikan kesempatan kepada seluruh ASN di lingkungan BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan kompetensinya, baik itu kompetensi pendidikan maupun kompetensi jabatan melalui program tugas belajar dan mengikuti pelatihan jabatan fungsional. d. *On The Job Training* Surveilans Epidemilogi dan Kekarantinaan e. *On The Job Training* Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan f. Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi g. *On The Job Training* petugas dalam penanganan kegawatdaruratan medis

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
		h. Simulasi penaggulangan kebakaran dan penggunaan APAR i. Diklat seminar kursus dukungan manajemen j. Sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan PNBP kepada pihak internal dan eksternal k. Sosialisasi penanganan pengaduan l. Peningkatan SDM kearsipan dalam pengelolaan arsip digital
8.	Persentase Realisasi Anggaran	a. Menyusun perencanaan anggaran lebih baik lagi; b. Menyusun RPK dan RPD dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan RPK dan RPD yang ditetapkan; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran; d. Memaksimalkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan teknis maupun non teknis; e. Melakukan revisi internal dan pemutakhiran data ke Kanwil DJPBn.

3.2 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUJUAN

a. Jaringan Internet yang tidak stabil membuat proses pengumpulan dan pengolahan data dengan aplikasi terhambat

b. Aplikasi yang digunakan saat ini untuk pengumpulan data dan pengolahan data sering terjadi gangguan dan belum mampu menyajikan data yang cukup dalam pelaporan surveilans Epidemiologi sehingga sebagian proses pengolahan data masih dengan manual

c. Tidak ada anggaran untuk pengembangan aplikasi pengolah data sehingga Tim kerja hanya menggunakan aplikasi sederhana yang terbatas untuk pengolahan data

d. Kurang nya komunikasi dan koordinasi antara tim kerja sehingga proses pengumpulan data dan desiminasi laporan tidak maksimal.

e. Kurang sarana dan prasarana pengolah data berupa laptop atau PC.

f. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang sudah diberikan legalitas beberapa diantaranya beberapa PPNS melaksanakan tugas tanpa legalitas yang penuh

g. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penindakan sebagai tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan

h. Masih ditemukan adanya faktor risiko di alat angkut karena masih adanya awak kapal yang belum menyadari menjaga kesehatan kapal dari faktor risiko yang mungkin terbawa

i. Pemeriksaan kapal dengan status karantina terkendala dengan tidak adanya kendaraan laut yang memadai/*safety* bagi petugas apalagi saat cuaca

tidak baik, sehingga pemeriksaan alat angkut mengalami hambatan dan harus ditunda hingga cuaca bagus

j. Masih ada pengguna jasa/agen pelayaran salah dalam menginput data kapal pada aplikasi Sinkarkes
k. Aplikasi Surveilans Epidemiologi (SE) yang sudah lama dan tidak ada *maintanance* sehingga tidak bisa digunakan untuk *update* data kapal yang baru
l. Alat pengolah data berupa laptop dan PC di pelayanan dokumen Kesehatan kapal sering ada kendala
m. Petugas pelayanan kekarantinaan kapal dan dokumen kesehatan baru perlu penambahan wawasan tentang kekarantinaan kesehatan
n. *Certificate of analysis* (COA) yang dilampirkan oleh pengguna jasa sebagai syarat pengajuan sertifikat OMKABA masa berlaku lebih dari 1 bulan, sehingga dapat dipergunakan kembali untuk sampel berikutnya
o. Efisiensi anggaran pada kegiatan rutin sehingga proses pengawasan dan kegiatan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan serta lima wilayah kerja harus menyesuaikan.
p. Tidak ada kegiatan peningkatan pengetahuan atau peningkatan kapasitas petugas.
q. Tidak ada kendaraan khusus untuk pemantauan kualitas sanitasi lingkungan di wilayah pelabuhan.
r. Terbatasnya ketersediaan vaksin *yellow fever*, polio, tifoid, dan influenza sehingga pelayanan vaksinasi belum dapat dilaksanakan secara optimal.
s. Keterbatasan ketersediaan buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) setelah diberlakukannya kebijakan wajib vaksinasi meningitis meningokokus sejak Juli 2024.
t. Keterbatasan anggaran yang belum sebanding dengan meningkatnya jumlah permohonan izin baru maupun perpanjangan izin Rumah Sakit/Klinik Pratama.
u. Perubahan regulasi yang berdampak pada proses penerbitan ICV di klinik binaan, sehingga dokumen ICV tidak dapat langsung diterima oleh masyarakat pengguna layanan.
v. Aplikasi SINKARKES sering mengalami gangguan sistem yang berdampak pada proses masuk aplikasi, tanda tangan elektronik, pengolahan data, dan penyimpanan dokumen, sehingga menghambat pelaksanaan pelayanan.
w. Penerapan Perubahan dari ICV fisik ke e-ICV bagi pelaku perjalanan umroh/haji masih dalam tahap penyesuaian, yang berdampak pada kelancaran pelayanan.
x. Adanya ketentuan yang mewajibkan pelaut menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap untuk penerbitan buku pelaut menyebabkan layanan tersebut tidak dapat dilakukan di BBKK, sehingga

jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan mengalami penurunan.

y. Adanya stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV) yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan mengikuti pemeriksaan survei faktor risiko HIV.

z. Terjadi pengurangan anggaran sebesar 50% akibat kebijakan efisiensi, sehingga berdampak pada penurunan jumlah target pemeriksaan.

aa. Terjadi pengurangan anggaran sebesar 50% akibat kebijakan efisiensi, sehingga berdampak pada penurunan jumlah target deteksi dini terduga TB.

3.3 TEROBOSAN YANG DILAKUKAN

1. Menyediakan pelaporan offline dan manual bila terjadi gangguan internet supaya pelaksanaan tupoksi tidak terhambat
2. Membangun aplikasi SABATA (Satu Bank Data). SABATA adalah aplikasi sederhana dan gratis yang bertujuan membantu kegiatan surveilans epidemiologi menjadi lebih mudah dan terhubung serta mempermudah desiminasi laporan dalam internal BBKK Tanjung Priok
3. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan aplikasi SABATA dengan sumber daya yang tersedia saja
4. Membangun komunikasi dan koordinasi antar tim kerja
5. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan tupoksi.
6. Mengajukan pelantikan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) agar PPNS dapat bekerja dengan legalitas yang sudah disahkan
7. Menyusun dan mengajukan anggaran bagi kegiatan identifikasi dan pemantauan potensi pelanggaran serta penindakan sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran kekarantinaan kesehatan
8. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi peraturan kekarantinaan Kesehatan dan menanamkan kesadaran tentang faktor risiko kesehatan di kapal kepada awak kapal
9. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja lintas sektor dalam rangka penyediaan alat transportasi untuik keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan
10. Sosialisasi dan evaluasi antara Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dengan Perusahaan Pelayaran secara rutin
11. Maintanance aplikasi SE atau mengganti aplikasi SE sehingga dapat digunakan untuk mengupdate data kapal baru

12. Alat pengolah data berupa laptop dan PC di pelayanan dokumen Kesehatan kapal perlu maintanance/pengadaan baru.
13. Peningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan teknis kekarantinaan Kesehatan di BBKK Tanjung Priok
14. Lampiran *Certificate of Analysis* (COA) untuk OMKABA masa berlaku kurang dari 1 bulan dan sesuai dengan barang yang di kirim
15. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, agar dapat mencakup seluruh wilayah pelabuhan serta lima wilayah kerja lainnya yang harus diawasi.
16. Mengembangkan sumber daya manusia antara lain dengan mengikuti pelatihan yang tersedia melalui LMS.
17. Memanfaatkan kendaraan khusus yang ada (mobil penegndalian vektor) untuk semua jenis kegiatan survei dan inspeksi kesehatan lingkungan di wilayah pelabuhan.
18. Mengoptimalkan koordinasi dengan Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (SKK) untuk memastikan ketersediaan vaksin secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan.
19. Melakukan pengaturan distribusi dan penggunaan Buku *International Certificate of Vaccination* (ICV) secara lebih efektif dan terkontrol.
20. Melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan melalui penetapan skala prioritas, penggabungan kegiatan sejenis, serta optimalisasi koordinasi jarak jauh tanpa mengurangi capaian output utama.
21. Melakukan sosialisasi perubahan regulasi kepada Rumah Sakit/Klinik binaan agar proses penerbitan ICV dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
22. Melakukan koordinasi intensif dengan pengelola aplikasi pusat terkait perbaikan dan stabilisasi sistem.
23. Meningkatkan kapasitas petugas dalam penggunaan aplikasi melalui pendampingan dan bimbingan teknis.
24. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pelabuhan mengenai alur pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengarahkan pelaut ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang
25. Mengoptimalkan kegiatan edukasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk mengurangi stigma terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV).
26. Menyesuaikan strategi pelaksanaan kegiatan dengan keterbatasan anggaran melalui penentuan sasaran prioritas dan penguatan kerja sama lintas sektor.
27. Mengoptimalkan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan lintas sektor untuk pelaksanaan deteksi dini TB secara terpadu dan tepat sasaran sesuai ketersediaan anggaran.

BAB IV

HASIL KERJA

4.1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok, melalui berbagai Tim Kerja, berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan. Setiap Tim Kerja memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan BBKK Tanjung Priok, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pengawasan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara, serta penguatan zona integritas untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan karantina kesehatan, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan inovasi dalam sistem pengawasan dan pelayanan. Dengan sinergi antar Tim Kerja, BBKK Tanjung Priok berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan karantina yang prima, transparan, dan berdaya saing guna mendukung kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Tim Kerja terdiri dari :

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
6. Sub Bagian Administrasi Umum

4.1.1 SURVEILANS DAN PENINDAKAN PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN

A. Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mempunyai mempunyai tugas pokok dan fungsi: pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah, pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan, pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekarantinaan kesehatan, pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan

kekarantinaan Kesehatan, penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara, pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan, pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dan penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan mendapatkan Pagu anggaran awal sebanyak Rp 971.410.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), namun besaran anggaran tersebut diefesiensi menjadi Rp 201.835.000,- (Dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) bersumber dari PNBP, dengan realisasi anggaran mencapai 99,51 % yaitu sebesar Rp 200.850.185,- (Dua ratus juta delapan ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan sisa anggaran sebanyak Rp 984.815,- (Sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti yang diuraikan dibawah ini:

B. Sosialisasi dan Diseminasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah (4249.PEF.001)

Kegiatan Surveilans kekarantinaan kesehatan di pelabuhan dan Penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang merupakan tugas dari salah satu dari 5 (lima) Tim Kerja yang ada di BBKK Tanjung Priok masih memerlukan kegiatan koordinasi yang dilakukan baik sebagai institusi otoritas kesehatan di Pelabuhan yang dilakukan di Jakarta, ataupun sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan dibawah Dirjen P2P sehingga kegiatan ini dilakukan dengan mengundang para petugas kekarantinaan di BBKK Tanjung Priok, instansi-instansi terkait dan stakeholder di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Pagu anggaran awal yaitu sebanyak Rp 14.380.000,- (Empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah diefesiensi anggaran menjadi Rp 10.202.000,- (Sepuluh juta dua ratus dua ribu rupiah) sumber angggaran PNBP yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Sosialisasi Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan penguatan pengawasan dalam rangka upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp 8.202.000,- (Delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) dari sumber anggaran

PNBP, realisasi anggaran tercapai 99% yaitu sebanyak Rp 8.130.000,- (Delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan luring (*Hybrid*) pada tanggal 21 April 2025 di Ruang rapat Pulau onrust lantai 4 BBKK Tanjung Priok, yang diikuti oleh 49 peserta diantaranya adalah dari BBKK Tanjung Priok sebanyak 31 orang, Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan 3 orang, Suku Dinas Kesehatan Tanjung Priok 1 orang, KSOP Sunda Kelapa 3 orang, KSOP Muara Angke 2 orang, PT. Karana Line 1 orang, DPC. INSA Jaya 1 orang, RSPI 1 orang, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman 1 orang, Bea Cukai Tanjung Priok 2 orang, Kolinlamil Jakarta Utara 3 orang.

2. Peran Surveilans Epidemioloigi di Pintu Masuk Negara

Salah satu komponen utama dalam pembangunan kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit, yang memerlukan dukungan dari sistem surveilans yang efektif. Surveilans epidemiologi yang baik tidak hanya membantu mengidentifikasi masalah kesehatan yang sedang terjadi, tetapi juga memberikan informasi yang dibutuhkan untuk merespon ancaman kesehatan secara cepat dan tepat. Pentingnya Surveilans Epidemiologi di pintu masuk negara pelabuhan, bandara dan pos perbatasan darat adalah titik kritis yang menjadi pintu gerbang masuk dan keluarnya orang, barang, serta alat angkut antar negara. Aktivitas ini menciptakan peluang bagi penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan yang dapat menyebar dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan meningkatnya mobilitas global yang pesat, baik untuk tujuan perjalanan, perdagangan, maupun transportasi barang, risiko penyebaran penyakit menular lintas batas semakin tinggi. Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan Surveilans Epidemiologi di Pintu Masuk Negara adalah: Mendeteksi penyakit menular sejak dini, mengantisipasi pontensi kejadian luar biasa (KLB), mencegah penyebaran penyakit global, menjaga kesehatan masyarakat dan ekonomi dan mengidentifikasi faktor risiko dan penyebab penyakit. Dengan demikian BBKK Tanjung Priok melaksanakan kegiatan workshop surveilans epidemiologi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam melakukan surveilans epidemiologi di pintu masuk negara. Meningkatkan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan, meningkatkan kemampuan deteksi dini, pencegahan, dan respon cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) dan potensi wabah penyakit. Melakukan sistem pelaporan yang efektif serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap orang, barang, alat angkut, serta lingkungan di pintu masuk negara.

Pagu anggaran kegiatan webinar surveilans epidemiologi sebanyak Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sumber anggaran PNBP dengan capaian realisasi anggaran 90% yaitu sebanyak Rp 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Workshop Surveilans Epidemiologi secara daring (dalam jaringan) yang diikuti BBKK, BKK dan LKK (Loka Kekarantinaan Kesehatan) berjumlah 500 orang dengan syarat mendaftar menjadi peserta ke aplikasi LMS dan 3 orang narasumber yaitu: Prof. Dr. Masdalina Pane, M.Kes, M.Si (Han) materi surveilans epidemiologi di pintu masuk negara, I Made Arta, SKM,M.Kes materi: pelaksanaan surveilans di pintu masuk negara BBKK Denpasar, dan Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid. materi: pelaksanaan surveilans di pintu masuk negara BBKK Makassar.

C. Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut (4249.QAH.017)

Kegiatan surveilans epidemiologi yang dilaksanakan pada saat situasi khusus seperti pada saat hari raya Natal dan tahun Baru, dan hari raya Idul fitri/lebaran dan atau pada saat terjadinya KLB/Wabah/KKM, kegiatan selalu dilaksanakan pada setiap tahun di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa petugas surveilans dijadwalkan untuk melaksanakan pengawasan di terminal penumpang Nusantara II Pelabuhan Tanjung Priok, pengawasan dilaksanakan selama 24 jam pada setiap hari siang dan malam hari.

Pagu anggaran kegiatan Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut yaitu sebanyak Rp 730.530.000,- (Tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), namun anggaran tersebut diefesiensi menjadi Rp 140.108.000,- (Seratus empat puluh juta seratus delapan ribu rupiah) sumber anggaran PNBP, yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM

Penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat- sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. Penyelidikan epidemiologi bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit secara detail. Kegiatan ini dilakukan ketika ada informasi ditemukannya kasus. Dengan dilakukannya penyelidikan diharapkan semua orang yang terpapar penyakit dapat terdeteksi dengan cepat sehingga kita dapat segera memutus mata rantai penularan. Pagu anggaran kegiatan ini sebanyak Rp 4.420.000 (Empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan capaian realisasi 99,9% yaitu sebanyak Rp 4.416.000,- (Empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah), kegiatan ini digunakan untuk :

a) Kegiatan Penyelidikan Epidemiologi di Kecamatan Cilincing yang dilaksanakan oleh 3 orang tenaga epidemiolog pada tanggal 9 mei 2025 dengan tujuan untuk pengumpulan data penyakit chikungunya dari Puskesmas Kecamatan Cilincing dan terlaksananya deteksi dini penyakit chikungunya yang dapat menyebabkan KLB/Wabah.
b) Melakukan koordinasi mengenai data surveilans epidemiologi dengan Puskesmas Cillncing, Puskesmas Koja dan Puskesmas Tanjung Priok dengan total petugas epidemiolog sebanyak 6 orang, masing-masing Puskesmas dilakukan oleh 2 orang petugas epidemiolog pada tanggal 13 Juni 2025.
c) Melaksanakan pembinaan terkait data surveilans di wilayah kerja kali baru, sehingga mengetahui masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh petugas di wilker kali baru, kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 orang petugas surveilans pada tanggal 12 Desember 2025.
d) Konsultasi teknis program Wilker ke Induk yang dilaksanakan oleh Wilker Sunda Kelapa, Muara Baru, Marunda, Kali Baru dan Muara Angke, hasil kegiatan ini diantaranya yaitu:

Tabel 4. 1 Hasil Kegiatan Konsultasi Teknis Program Wilker Ke Induk Tahun 2025

No	Wilker	Tanggal	Hasil
1.	Sunda Kelapa	29 Agustus 2025	Mendapatkan arahan mengenai: Aplikasi SABATA tersebut kita dapat menginput data kesakitan yang kita terima dari Puskesmas Kelurahan Ancol dan di input melalui SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon). Penginputan data kesakitan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan system kalender epidemiologi.
		26 September 2025	Pelaksanaan PE pada penyakit yang menimbulkan KLW/Wabah dan input data kedatangan dan keberangkatan kapal baik dalam maupun luar negeri.
		3 Oktober 2025	Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan,

No	Wilker	Tanggal	Hasil
			pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
2.	Muara Baru	26 Agustus 2025	Pelaksanaan Emergency Call di Pelabuhan dan pengisian aplikasi SABATA.
		19 September 2025	Konsultasi tentang pelaksanaan table top dalam rangka kewaspadaan terhadap penyakit emerging di Pelabuhan.
		7 Nopember 2025	Konsultasi mengenai Kendala dan pemecahan masalah dalam melaksanakan input data Surveilans pada aplikasi SABATA.
3.	Kali Baru	24 Nopember 2025	Melakukan Konsultasi berkaitan dengan data penyakit yang berasal dari Puskesmas Kalibaru yang di Input pada aplikasi Sabata sampai dengan semester II, melalukan konsultasi tentang cara menginput data dan memonitoring pelaporan berbasis kejadian melalui aplikasi SKDR menggunakan formulir surveilans berbasis kejadian (EBS).
4.	Marunda	24 Oktober 2025	Melakukan konsultasi mengenai pelaporan SKDR dan penggunaan SKDR sebagai acuan untuk mewaspadai penyakit potensial wabah yang di temukan di wilayah Pelabuhan Marunda.
		5 Nopember 2025	Konsultasi Program dari Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda ke BBKK Tanjung Priok Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Karantina Kesehatan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk tentang penyelidikan epidemiologi pada situasi KLB/wabah/KKM tahun 2025.
		18 Nopember 2025	Melakukan konsultasi mengenai pelaporan SKDR dan penggunaan SKDR sebagai acuan untuk mewaspadai penyakit potensial wabah

No	Wilker	Tanggal	Hasil
			berbasis lingkungan yang di temukan di wilayah pelabuhan Marunda.
5.	Muara Angke	21 Oktober 2025	Konsultasi mengenai petunjuk dan teknis pelaksanaan Penyelidikan epidemiologi di Pelabuhan Muara Angke.
		3 Nopember 2025	Konsultasi mengenai beberapa penyakit yang berpotensi dapat menjadi KLB/Wabah di wilayah Muara angke, Wilayah Muara Angke, sebagai daerah pesisir dan pelabuhan perikanan di Jakarta Utara, memiliki aktivitas padat manusia dan hewan, termasuk keberadaan banyak anjing penjaga, kucing liar, serta potensi masuknya hewan dari wilayah lain melalui jalur laut. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan rabies apabila tidak dilakukan pengawasan ketat.
		5 Desember 2025	Mengenai penerapan prinsip *One Health* pada kegiatan penyelidikan epidemiologi (PE), kolaborasi antara sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Balai Kekarantinaan Kesehatan memiliki peran dalam deteksi dini kasus zoonosis di pintu masuk pelabuhan, Dinas Pertanian dan Kesehatan berperan dalam vaksinasi hewan dan penanganan medis.

2. Simulasi Penanggulangan Penyakit Berpotensi Wabah

Simulasi merupakan bentuk uji Rencana Kontinjensi yang telah dipersiapkan. Rencana Kontijensi hanya dapat diterapkan dengan baik, bila seluruh jajaran terkait dan segenap lapisan masyarakat, termasuk kalangan swasta serta pelaku usaha turut berperan serta dan bekerjasama dengan baik. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mengusulkan kegiatan simulasi penanggulangan penyakit berpotensi wabah di tahun 2025. Kegiatan ini terdiri dari beberapa rangkaian yaitu Penyusunan skenario simulasi, table top exercise, latihan lapangan dan gladi, serta pelaksanaan simulasi. Penyusunan skenario simulasi dilaksanakan di Wilayah Kerja Sunda Kelapa. dan table top exercise dilaksanakan di hotel dengan mengundang

para stake holder terkait. Narasumber kegiatan ini berasal dari konsultan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan. Pagu anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp 27.808.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu rupiah), capaian realisasi 99,81% yaitu sebesar Rp 27.756.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Rapat Persiapan *table top exercise* kedaruratan kesehatan masyarakat di Wilayah Kerja Kali Baru pada tanggal 9 Mei 2025, dilaksanakan oleh 5 orang petugas. Rapat persiapan tersebut dilakukan dalam rangka menentukan Stake Holder yang akan diundang dengan mempertimbangankan peran dan fungsi didalam pelabuhan terkait situasi Kejadian Luar Biasa/Wabah. Dimana diketahui bersama, pelabuhan Kalibaru merupakan pelabuhan International yang melayani keluar masuk kapal cargo, tanker, kapal roro dan kapal nelayan tradisional. Stake holder yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini adalah Syahbandar, Polsek Kalibaru, Puskesmas Cilincing, Indonesia Kendaraan Terminal, NPCT 1, Tenaga Bongkar Muat Kalibaru, DK Pos AL, RSPI Suliyanti Soeroso, RS Koja, Sudin Jakarta Utara, K Line, BEN Line, ZUB dan BBI, menyesuaikan Draft rencana Persiapan *Table Top Exercise* yang ada dengan tupoksi stake holder dan keadaan situasi masalah kesehatan yang terjadi sekarang ini dan menentukan tema Table Top Exercise yang akan dibahas dalam kegiatan.

b) Rapat Persiapan kegiatan *Table Top Exercise* kedaruratan kesehatan masyarakat yang kedua di Wilayah Kerja Kali Baru pada tanggal 23 Mei 2025 dilaksanakan oleh 5 orang petugas untuk membahas rencana kegiatan *Table Top Exercise* yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 3 Juni 2025. Lokasi pelaksanaan kegiatan di PT. Indonesia Kendaraan Terminal, Finalisasi draft undangan peserta *Table Top Exercise* yang akan diundang sesuai dengan peran dan fungsi di dalam Pelabuhan terkait situasi kejadian luar biasa/wabah dan Finalisasi penyusunan skenario peran dan fungsi di dalam Pelabuhan dalam menghadapi kejadian KKMD.

c) Kegiatan *Table Top Exerciise* Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

BBKK Tanjung Priok secara kontinyu dan konsisten menjaga pintu masuk negara dari penyebaran penyakit menular melalui alat angkut, orang dan barang, sehingga peningkatan *core capacities* di BBKK menjadi sangat penting. Dalam rangka persiapan penanggulangan penyakit yang berpotensi menimbulkan

kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia di pintu masůk negara, maka Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan khususnya di wilayah kerja Pelabuhan Kalibaru melakukan uji terhadap dokumen rencana kontigensi yang telah disusun melalui kegiatan *table top exerciíse* kedaruratan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2025 di PT. Indonesia Kendaraan Terminal Jakarta Utara dengan peserta kegiatan Table Top Exercise Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebanyak 54 orang peserta, diataranya adalah BBKK Tanjung Priok: 33 orang, KSOP Utama Tanjung Priok: 2 orang, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok: 1 orang, BBKHIT DKI Jakarta 1 orang, BBLKM Jakarta 1 orang, RSPI Sulisnati Saroso 1 orang, RSUD Koja 1 orang, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara 1 orang, Puskesmas Kecamatan Cilincing 2 orang, BABINPOTMAR TNI-AL Kalibaru 1 orang, Polsek Kawasan Pelabuhan Kalibaru 1 orang, PT. IKT 2 orang, PT. JAI 1 orang, DPC INSA JAYA 1 orang, DPP ISAA 1 orang, PT. Samudera Indonesia 1 orang, PT. Evergreen Ship Agency Indonesia: 1 orang, PT. Pelayaran Bintang Putih: 1 orang, TKBM wilayah Pelabuhan Kalibaru 1 orang dan 1 orang peserta dari PT. NPCT 1. Narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan dr. Endang Widuri Wulandari, M. Epid dari *World Health Organization Representative To* Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia di pintu masuk negara.

3. Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi

Pelabuhan merupakan salah satu pintu masuk utama negara yang dilewati oleh banyak orang dan barang dari berbagai negara. Hal ini meningkatkan risiko masuknya penyakit menular melalui pelabuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di pelabuhan, salah satunya melalui surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Kegiatan Surveilans kekarantinaan kesehatan di pelabuhan dan Penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang merupakan tugas dari salah satu dari 5 Tim Kerja yang ada di BBKK Tanjung Priok masih memerlukan kegiatan koordinasi yang dilakukan baik sebagai institusi otoritas kesehatan di Pelabuhan yang dilakukan di Jakarta, ataupun sebagai salah satu UPT Kementerian Kesehatan dibawah Dirjen

P2P sehingga kegiatan ini dilakukan apabila ada undangan koordinasi dari Unit Utama. Pagu anggaran kegiatan tersebut sebanyak Rp 46.898.000,- (Empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran 99,37% yaitu sebanyak Rp 46.601.486,- (Empat puluh enam juta enam ratus satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Pelatihan Epidemiologi Lapangan Level *Intermediatc* bagi Petugas Epidemiologi di Dinas Kesehatan dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BKK)

   Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang surveilans epidemiologi petugas yang mengikuti pelatihan sebanyak 2 orang dari Bidang Surveilans dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan BBKK Kelas 1 Tanjung Priok. Pelatihan diselenggarakan dengan metode *sandwich training* selama 9 bulan dimulai pada tanggal 13 Januari-19 September 2025. Pembelajaran secara daring/online pada tanggal 13 - 17 Januari 2025 dan luring/tatap muka pada tanggal 20-26 Januari 2025 di BBPK Ciloto Kampus A.

b) Melaksanakan koordinasi teknis program pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi

   Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pembinaan mengenai pelaporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara pada tanggal 19 Maret 2025 dilaksanakan oleh 4 orang petugas. Hasil Kegiatan ini adalah diskusi mengenai pelaporan kewaspadaan dini terhadap penyakit yang mengakibatkan KLB/Wabah di lingkungan Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Marina Pemantauan penyakit yang mengakibatkan KLB/Wabah di lingkungan Pelabuhan Muara Angke melalui aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini Dan Respon (SKDR) Laporan mingguan Sistem Kewaspadaan Dini dan respon akan diinput kedalam aplikasi Sabata Surveilans.

c) Pengawasan dan Penindakan pelanggaran karantina penerbitan *International Certificate Vaccination* (ICV)

   Kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina penerbitan *International Certificate Vaccination* (ICV) ini dilaksanakan di Klinik Pratama Griya Husada Jalan Raya Kaliabang Tengah RT.007/RW.004 Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tanggal 12 Juni 2025 sebanyak 2 orang. Hasil dari kegiatan ini diantaranya adalah ditemukan 4 (empat) dokumen e-/CV tanpa vaksinasi yang diterbitkan Klinik Pratama Griya Husada Bekasi Utara dan sesuai pengakuan

dokter penanggungjawab klinik dan pelaku, berkas identitas untuk permohonan vaksin 4 dokumen tidak ada diarsip rekam medis, pelaku menerima bayaran terbitkan e-/CV tanpa vaksinasi melalui perantara dengan biaya sekitar Rp 355.000,- dan Alur pelayanan tidak ada, jadwal pelayanan Vaksinasi Internasional belum ditulis dan tidak terpasang di ruang pelayanan, sehingga petugas BBKK Tanjung Priok memberikan saran dan arahan agar dilakukan penguatan sistem verifkasi digital sertifikat vaksinasi untuk username klinik binaan. Penelusuran lanjutan oleh PPNS terhadap pelaku dan jaringan pemalsuan, edukasi dan pembinaan mengenai kerugian negara serta konsekuensi hukum pemalsuan dokumen karantina kesehatan, pengawasan ketat oleh BBKK terhadap Klinik binaan agar bekerja sesuai SOP dan peraturan tentang vaksinasi dan penerbitan e-/CV, tidak boleh lagi melaksanakan pelayanan Vaksinasi Internasional sampai dengan permasalahan selesai (dilakukan penguncian user dan password sinkarkes), dibuatkan alur pelayanan vaksinasi Interasional dan dibuatkan jadwal pelayanan Vaksinasi Internasional dan dipasang di ruang pelayanan.

d) Rapat Penyusunan *Tools Assesment Kapasitas Sentinel Influenza Like llnes* (ILI) di pintu masuk negara

   Kegiatan rapat Penyusunan *Tools Assesment Kapasitas Sentinel Influenza Like llnes* (ILI) di pintu masuk negara dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 Juni 2025 di Hotel Santika Bandung Jawa Barat, yang mengikuti kegiatan tersebut dari Tim Kerja I adalah 1 orang petugas. Sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal P2P NO. HK.02.03/C/1502/2024 telah menetapkan 14 Balai Kearantinaan Kesehatan (BKK) sebagai lokasi pelakanaan surveilans ILI di Pintu Masuk Negara. Lokasi lokasi ini dipilih secara strategis untuk memperkuat deteksi dini potensi penyebaran penyakit menular melalui jalur perjalanan internasional. Namun demikian, hingga saat ini belum tersedia instrumen evaluasi baku yang digunakan untuk menilai secara sistematis dan terstandar pelaksanaan surveilans sentinel masing - masing pintu masuk negara. Penyusunan ini diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan surveilans, penguatan sistem kewaspadaan dini, serta kapasitas respon terhadap penyakit infeki saluran pernapasan di wilayah Pintu Masuk Negara.

e) Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi dalam rangka penguatan sistem surveilans sentinel Influenza *like illness* (ILI) di Pintu Masuk Negara (*Point of Entry/POE*).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun dan menyepakati revisi Petunjuk Teknis Surveilans Sentinel ILI di Pintu Masuk Negara yang terintegrasi dan adaptif, serta mendukung pemantauan infeksi saluran pernapasan lainnya, mereviu Petunjuk Teknis Surveilans Sentinel ILI yang saat ini digunakan di PoE (Point of Entry), menyusun perbaikan substansi teknis Juknis, termasuk kriteria kasus, mekanisme pengambilan dan pengiriman spesimen, manajemen data dan pelaporan, menyusun rekomendasi mekanisme evaluasi pelaksanaan surveilans sentinel ILI secara terstandar dan menyusun rencana tindak lanjut implementasi Juknis yang telah direvisi. Yang mengikuti kegiatan tersebut dari Tim Kerja I adalah 1 orang pada tanggal 09 s.d 12 Juli 2025 di Ball Room Arch Hotel Bogor.

f) Kegiatan Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit T.A. 2026

Kegiatan Desk RKA-K/L dilaksanakan oleh 2 orang petugas perencanaan pada tanggal 21 Juli 2025 di Gedung Record Center P2 di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk pengajuan usulan anggaran harus diteliti atau direviu untuk mernastikan bahwa alokasi dana yang diminta benar-benar relevan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses reviu bertujuan untuk mencegah pemborosan, duplikasi, kegiatan atau penganggaran yang tidak berdasar, serta memastikan bahwa rencana kegiatan selaras dengan prioritas program dan tujuan organisasi atau instansi. Selain itu reviu anggaran membantu menilai kelayakan teknis dan administratif, mengecek kelengkapan dokumen pendukung, serta menyesuaikan usulan dengan pagu indikatif atau kemampuan keuangan negara/daerah. Dengan demikian, anggaran yang disetujui nantinya akan lebih tepat sasaran, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi penerima layanan.

g) Kegiatan Rapat *Final Report Meeting* Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah di Pintu Masuk ke Wilayah

Kegiatan Rapat *Final Report Meeting* Sistem Rujukan Spesimen Penyakit Pernapasan Potensial KLB/Wabah diikuti oleh 1 orang petugas dari Tim Kerja I pada tanggal 21, 22 dan 29 Agustus 2025 di Ruang Rapat Gedung Record Center Jalan Percetakan Negara Nomor 29, RT.23/RW.7, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dan menyepakati finalisasi dari petunjuk teknis sistem rujukan spesimen di pintu masuk wilayah yang terintegrasi dan adaptif, serta mendukung pemantauan infeksi saluran pernapasan lainnya,

mereviu Petunjuk Teknis Surveilans sistem rujukan spesimen, menyusun perbaikan substansi teknis Juknis, termasuk kriteria kasus mekanisme pengambilan dan pengiriman spesimen, manajemen data, dan pelaporan serta menyusun rencana tindak lanjut implementasi Juknis yang telah direvisi

h) Koordinasi Surveilans dan SKDR petugas Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 orang petugas dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto sebagai sebagai admin dan pelataran sehat pada Webinar Pengolahan Pelaporan Data Surveilans Epidemiologi. Kegiatan ini dilaksanakan supaya pada pelaksanaan kegiatan webinar berjalan dengan baik tanpa ada kendala suatu apapun. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung

i) Koordinasi Teknis Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Di Bkk Kelas II Pangkal Pinang

Kegiatan ini diikuti oleh 3 orang petugas dari Tim Kerja I pada tanggal 15 s.d 17 September 2025 di BKK Kelas II Pangkal Pinang. Hasil kegiatan ini adalah Peningkatan Kompetensi Pengawasan OMKABA serta Sistem Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan BKK Kelas II Pangkalpinang dengan BBKK Tanjung Priok menjadi wadah untuk bertukar pengalaman perspektif teknis dan regulasi pengawasan OMKABA, memperkuat penerapan standar sertifikasi kesehatan barang ekspor, serta mengatasi kendala lapangan dalam rangka optimalisasi layanan dan perlindungan kesehatan masyarakat terkait pengawasan OMKABA, pengawasan kedatangan kapal baik dalam negeri maupun luar negeri. BKK kelas II Pangkalpinang akan berkoordinasi lebih lanjut dengan BBKK Tanjung Priok. Semoga kolaborasi antara BKK Kelas II pangkalpinang dan BBKK Tanjung Priok terus terjalin untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.

j) Kegiatan Konsultasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

Kegiatan Konsultasi ini dilaksanakan oleh 1 orang petugas Wilker Kali Baru pada tanggal 24 September 2025 ke Tim Kerja I mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon. Hasil kegiatan tersebut yaitu mendapatkan arahan bahwa kegiatan program pencegahan dan pengendalian penyakit Wilayah Kerja kalibaru sebagai salah satu pintu masuk baik nasional ataupun internasional berupaya agar cegah tangkal penyakit berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh IHR,

sehingga respons yang dilakukan bisa sesuai dan dalam tempo yang cepat, kegiatan konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan data penyakit yang berasal dari Puskesmas Kalibaru yang dinput pada aplikasi Sabata Selain itu tentang pelaporan berbasis kejadian, bagaimana cara melakukan pelaporan melalui SKDR pada web https://skdr.kemkes.go.id/form-ebs/add dengan menggunakan formulir surveilans berbasis kejadian (EBS).

k) Kegiatan Desk, Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026 Ditjen P2

Kegiatan Desk dilaksanakan oleh 2 orang perencanaan pada tanggal 8 Oktober 2025 di Gedung Record Center P2 di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Kota Jakarta Pusat, hasil dari kegiatan Desk yaitu verifikasi usulan kegiatan SBK yaitu: Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Sosialisasi dan Diseminasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah serta Layanan pemeriksaan orang, barang, alat angkut.

l) Kegiatan Bimbingan Teknis Penegakan Hukum yang diselenggarakan oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta

Kegiatan ini diikuti oleh 1 orang petugas pada tanggal 07 Oktober 2025 di Sunlake Waterfront Resort & Convention Jakart, hasil dari kegiatan tersebut yaitu untuk Perkuat Pengawasan Dalam Pencegahan Masuknya Penyakit Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Keamanan Mutu Pangan/ Pakan serta kelestarian Sumber Daya Alam Hayati.

m) Kegiatan Finalisasi Penyusunan Alokasi Anggaran Tahun 2026 Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen P2

Kegiatan Desk dilaksanakan oleh 2 orang pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2025 di Wisma Sukajadi Kemenkes, Jalan Sukajadi. Hasil kegiatan tersebut yaitu diberikan catatan dan arahan dari eselon I dengan Tim Program anggaran P2, Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

n) Kegiatan memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

Kegiatan bakti sosial ke Rumah Lansia ATMABRATA, dilaksanakan oleh 3 petugas dari Tim Kerja I pada tanggal 31 Oktober 2025. Hasil kegiatan yaitu senam ceria bersama para Lansia, melaksanakan penyerahan bantuan berupa sembako kepada para Lansia, melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada 30

orang Lansia dengan hasil sebagai berikut: 23 orang gizi normal, Obesitas 7 orang dan Hiperglikemi 4 orang.

o) Koordinasi terkait permohonan pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2025 oleh 1 orang petugas dari Tim Kerja I, koordinasi tersebut bertujuan untuk Melakukan koordinasi persiapan pelantikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui verifikasi berkas administrasi dari pemohon dan kelengkapan pengajuan permohonan dari PIC Kementerian Kesehatan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagian PPNS pada Kementerian Hukum. Hasil kegiatan setelah verifikasi berkas oleh tim subdit PPNS Ditjen AHU Kementerian Hukum RI bahwa PIC Kemenkes RI melalui tim kerja Hukum dan Humas Setdijen P2 belum melakukan pengajuan berkas secara online. Setelah menyampaikan permasalahan ke PIC Kemenkes ditemukan kendala bahwa ada pemblokiran sistem untuk Ditjen P2 karena beberapa PPNS yang pensiun tidak melengkapi berkas untuk penerbitan pemberhentian sebagai PPNS. PIC akan melaporkan ke pimpinan sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Pada penyampaian materi pembinaan bagi calon yang akan dilantik khususnya bagi PPNS adalah secara administrasi persyaratan berkas sudah lengkap, namun karena ada proses mutasi bagi calon PPNS dilantik a.n. Elprida akan dilakukan update data menyesuaikan mutasi saat ini. Sesuai Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 26 tahun 2025 yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pada pasal 16 disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agama dan kepercayaannya.

p) Koordinasi Surveilans dalam rangka kegiatan *Basic Sea Survival*

Koordinasi surveilans dilaksanakan oleh 1 orang petugas pada tanggal 27 November 2025 di Kolam Renang Tirta Bhadrika. Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk melaksanakan pengembangan kompetensi ASN dengan mengikuti Pelatihan Basic Sea Survival dalam rangka penguatan kompetensì diri dalam melaksanakan tugas dan tangungjawab sebagai ASN BBKK Tanjung Priok. Hasil

kegiatan pelatihan *Basic Sea Survival* membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan dan emosional sebagai pesiapan jika terjadi situasì kecelakaan di laut. Standar kompetensi yang harus dipenuhi adalah lompat ke air dari ketinggian (*safety jump*), membalikan liferaft sambil mengenakan lifejacket.

q) Kegiatan Evaluasi Program Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan

Kegiatan Evaluasi Program dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2025 di Wilayah Kerja Sunda Kelapa Jakarta Utara, peserta kegiatan evaluasi program survailen sebanyak 37 orang, diataranya adalah BBKK Tanjung Priok 34 orang, Setditjen Penaggulangan penyakit 3 orang. Tujuan dari kegiatan ini adalah melaksanakan pengambangan inovasi dalam mempermudah analisis data di wilayah pelabuhan Tanjung Priok, mempermudah dalam pengambilan keputusan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan Tanjung Priok, menyajikan data yang kongkrit sehingga tindakan akan tepat dalam cegah tangkal penyakit di pelabuhan Tanjung priok, mempermudah desiminasi Informasi tentang kegiatan di pelabuhan Tanjung priok, mempermudah dalam analisis data penyakit yang ada di pelabuhan.

r) Koordinasi Teknis Tim Kerja Surveilans Dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan Dalam Rangka Bimbingan Teknis Terkait Data Dan Program Surveilans

Petugas Tim kerja Surveilans dan penindakan Pelanggaran Kekarantinaan sebanyak 2 orang melaksanakan Bimbingan Teknis di Wilayah Kerja Pelabuhan Marunda dalam rangka melihat langsung proses penginputan data dan pelaksanaan implementasi aplikasi SABATA khususnya di wilayah kerja Pelabuhan Laut Marunda, melakukan koordinasi dengan petugas surveilans Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda mengenai data surveilans epidemiologi di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda terkait apakah ada kendala disana dalam pelaksanaan aplikasi. Dari hasil bimbingan teknis untuk Data surveilans epidemiologi Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda sudah dientri kedalam aplikasi sabata dengan lengkap namun masih kurang tepat waktu jadi dihimbau untuk melakukan lebih tepat waktu karena terkait data yang dinput harus real time untuk dilakukan proses selanjutnya di tim kerja 1 seperti pengolahan dan Analisa data.

s) Melaksanakan pembinaan terkait data surveilans di wilayah kerja kali baru, sehingga mengetahui masalah dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh petugas di wilker kali baru. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 orang petugas surveilans pada tanggal 12 Desember 2025.

t) Kegiatan Festival Inovasi Kesehatan Tahun 2025 Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional

Mengikuti rangkaian kegiatan Talkshow Health Inovation Festival (HA/Fest) 2025, melakukan pemeriksaan gratis Mini MCU (Pemeriksaan laboratorium DG sewaktu, kolesterol, asam urat) di stand Siloam Agora, mengunjungi Stand Poltekes 1 Jakarta dengan melakukuan pemeriksaan materialise foot, mengunjungi Stand Badan POM yaitu Jamu Tradisional gratis, mengikuti permainan seputar Kesehatan dan mendapatkan Informasi Kesehatan dan peralatan medis terbaru. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 orang petugas pada tanggal 8 Desember 2025 di Kartika Expo, Balai Kartini.

4. Koordinasi Kekarantinaan Dengan Fasyankes

a) Koordinasi Kekarantinaan Dengan Fasyankes I

Kegiatan koordinasi Kekarantinaan dengan Fasyankes ini diharapkan upaya pencegahan dan penannggulangan penyakit menular dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk itu Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok secara kontinyu dan konsisten melakukan koordinasi dengan fasyankes sekitar baik itu fasyankes klinik maupun puskesmas di sekitar pelabuhan Tanjung Priok. Beberapa fasyankes diantaranya Puskesmas Kecamatan Cilincing, Puskesmas, Kecamatan Koja dan Puskesamas Kecamatan Tanjung Priok. Koordinasi ini diwujudkan dalam kegiatan setiap bulannya yaitu desimasi laporan SKDR dan penyakit di wilayah masing masing serta ikut serta berpartisipasi bila ditemukan peningkatan kasus suatu penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresankan dunia (KKMD) / *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025 di Ruang Rapat BBKK Tanjung Priok dengan peserta sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pegawai BBKK Tanjung Priok 27 orang, Puskesmas Kecamatan Cilincing 1 orang, Puskesmas Kecamatan Koja 1 orang dan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok 1 orang

b) Koordinasi Kekarantinaan Dengan Fasyankes II

Melaksanakan koordinasi kekarantinaan dengan fasyankes di wilayah pelabuhan Tanjung Priok yang bertujuan untuk melaksanakan koordinasi kekarantinaan dengan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Puskesmas Kecamatan Koja, Puskesmas Kecamatan Cilincing dan untuk mengetahui tentang kasus penyakit menular (SKDR) yang saat ini terjadi di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 di Ruang Rapat BBKK Tanjung Priok. Peserta kegiatan ini sebanyak 40 orang, diataranya adalah BBKK Tanjung Priok 31 orang, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara 1 orang, Puskesmas Kecamatan Cilincing 1 orang, Puskesmas Kecamatan Koja 1 orang, Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok 1 orang, Puskesmas Kelurahan Kali Baru 1 orang, Pusekesmas Kecamatan Pademangan 1 orang, Puskesmas Keluarahan Ancol 1 orang, Puskesmas Kecamatan Penjaringan 1 orang, Kepala Rumah Sakit Umum Koja 1 orang.

5. Koordinasi Surveilans Dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon

Koordinasi Surveilans dan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti undangan dari pusat dan pelaksanaan pertemuan yang dilaksanakan oleh BBKK Tanjung Priok. Pagu anggaran kegiatan ini sebanyak Rp 38.924.000,- (Tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar 99,59%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Sebanyak 3 (tiga) orang Epidemiolog BBKK Tanjung Priok mengikuti Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasional (PIEN) ke 12 atau *12th National Scientific Conference on Epidemiology* Tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2025 di Yogyakarta. Tujuan mengikuti kegiatan ini agar tenaga kesehatan mampu menganalisis data epidemiologi, termasuk penyakit menular dan tidak menular, penerapan surveilans berbasis bukti dan deteksi dini KLB serta pemahaman tentang dampak perubahan iklim terhadap pola penyakit dan penyakit menular yang yang meresahkan masyarakat tersedia di link web site WHO sehingga dapat mengakses penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

b) Kegiatan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon BBKK Tanjung Priok Kejadian KLB perlu dideteksi secara dini dan diikuti dengan tindakan yang cepat dan tepat, perlu diidentifikasi adanya ancaman KLB beserta kondisi rentan yang memperbesar risiko terjadinya KLB agar dapat dilakukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan KLB. Atas dasar

inilah maka sangat dibutuhkan Koordinasi pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok. Tujuan Koordinasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam mendeteksi adanya ancaman penyakit yang berpotensi menimbulkan terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa) atau wabah di pintu masuk negara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025 di Ruang Rapat Gedung Record Centre Lantai 2 Jalan Percetakan Negara yang diikuti oleh 40 orang peserta kegiatan.

c) Koordinasi Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan BBKK Tanjung Priok

Penerbitan dokumen palsu dapat berdampak fatal dan harus ditindak. ABK dan jemaah haji yang tidak vaksin kemudian berangkat berkunjung ke berbagai negara dapat tertular penyakit menular yang berdampak meresahkan masyarakat yaitu penyakit *Public Health Emergency of International Concem (PHEIC)*/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Dengan demikian BBKK Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Koordinasi Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan yang bertujuan untuk melakukan dukungan terhadap petugas PPNS yang melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar peraturan sistim kekarantinaan kesehatan, terkait dengan penerbitan dokumen palsu, pengawasan di pintu masuk di perketat, melalui kerjasama seluruh stake holder di Pelabuhan dokumen di periksa lebih teliti dan meningkatkan kapasitas petugas ketika melakukan pemeriksaan terhadap orang. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 di Ruang Rapat Gedung Record Centre Lantai 2 Jalan Percetakan Negara yang diikuti oleh 45 orang peserta terdiri dari: pegawai BBKK Tanjung Priok, kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi dan dari Otoritas Pelabuhan.

d) Koordinasi persiapan Webinar Surveilans di Pintu Masuk Negara

Pintu masuk negara pelabuhan, bandara, dan pos perbatasan darat menjadi pintu gerbang masuk dan keluarnya orang barang serta alat angkut antar negara. Aktivitas ini menciptakan peluang bagi penyebaran penyakit dan faktor risiko kesehatan yang dapat menyebar dengan cepat dari satu wilayah ke wilayah lain. Dengan demikian Surveilans Epidemiologi dipintu masuk negara merupakan kegiatan yang penting dalam rangka respons cepat untuk mencegah masuk dan

keluarnya penyakit yang berpotensi KLB/ wabah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Nomor HK. 02.03/C.IX.5/6176/2025 Tanggal 23 September 2025 tentang pembentukan Tim Panitia Webinar Surveilans di Pintu Masuk Negara. Sebanyak 6 orang Tim dari BBKK Tanjung Priok melaksanakan koordinasi persiapan dengan Tim Teknis dari Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang terkait beberapa hal yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan acara Webinar Surveilans di Pintu Masuk Negara, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 di Kantor Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.

6. **Pengolahan dan Pelaporan Data Surveilans di Pintu Masuk Negara**

Berbagai sistem dan aplikasi digital menawarkan segala bentuk kemudahan dalam pengolahan suatu data. Dalam rangka memfasilitasi dan mempermudah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data terkait Kekarantinaan Kesehatan di BBKK Tanjung Priok, maka perlu dilaksanakan webinar nasional pengolahan dan pelaporan data surveilans di pintu masuk negara. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebanyak Rp 9.588.000,- (Sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebanyak 99,65%. Kegiatan webinar ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Ruang rapat BBKK Tanjung Priok secara *online* dan *offline* dengan jumlah peserta webinar sebanyak 500 orang. Kegiatan webinar ini bertujuan untuk memahami management data surveilans epidemiologi yang baik, meningkatkan pemahaman tentang pengumpulan dan pengolahan data yang valid sebagai dasar pengumpulan data dan mampu melakukan analisis data surveilans epidemiologi sebagai dasar pengambilan keputusan, desiminasi data dan informasi kepada masyarakat dan *stakeholde*.

7. **Koordinasi Validasi Data Surveilans**

Kegiatan Koordinasi validasi data surveilans dilaksanakan oleh Tim Kerja I dalam rangka melakukan validasi data surveilans kapal maupun surveilans penyakit dengan pagu anggaran sebanyak Rp 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah), capaian realisasi anggaran pada kegiatan tersebut sebanyak 100%. Hasil kegiatan ini diantaranya yaitu:

Tabel 4. 2 Hasil Kegiatan Koordinasi Validasi Data Surveilans Tahun 2025

No	Waktu	Lokasi	Hasil

1.	4 Juli 2025	Wilker Sunda Kelapa	Memastikan kegiatan input data surveilans baik data kedatangan keberangkatan kapal, data penyakit, data kunjungan poliklinik dan data rujukan dilakukan tepat waktu agar petugas input data pada aplikasi SABATA juga dapat melakukan input data tepat waktu juga. Memastikan setiap data yang diinput sudah sesuai dengan dokumen yang diterbitkan. Melakukan penyamaan penamaan untuk jenis diagnosis yang diinput, agar tidak terjadi kesalahan didalam penginputan aplikasi SABATA.
2.	17 Juli 2025	Klinik Kimia Farma Plant	Ditemukan 4 (empat) dokumen e-ICV tanpa vaksinasi yang diterbitkan Klinik Kimia Farma Plant dan pengakuan dari petugas admin dan dokter penanggungjawab klinik. Berkas identitas untuk permohonan vaksin 4 dokumen diduga dipalsukan dan tidak lengkap diarsip rekam medis. Pelaku menerima bayaran terbitkan e-ICV tanpa vaksinasi (Meningitis dan Polio) melalui perantara agen travel dengan biava sekitar Rp 615.000,-. Ada beberapa berkas yang tidak dilengkapi data permohonan vaksinasi dengan alasan sistem bagi omzet dan jasa bawa Jemaah umroh untuk vaksinasi dengan klinik lain. Dari hasil temuan diperlukan penelusuran lanjutan klinik terkait.
3.	18 Juli 2025	Wilker Kali Baru	Memberikan pemahaman bahwa setiap data surveilans epidemiologi yang ada dapat digunakan sebagai bahan desiminasi informasi kepada instansi lain yang berada di Wilayah Kerja Wilker Kali Baru dan juga masyarakat sekitar. Selain itu data surveilans epidemiologi dapat sebagai salah satu indikator apabila terjadi kejadian luar biasa di wilayah kerja.
4.	18 Juli 2025	Wilker Marunda	Kegiatan dilaksanakan di Wilayah Kerja Marunda pada tanggal 18 Juli 2025 yang dikuti oleh Koordinator Wilker, serta seluruh petugas dan pejabat fungsional yang ada di Wilker Marunda. Kegiatan ni memberikan konfirmasi pengisian data ke dalam aplikasi SABATA harus tepat waktu. Data di sesuaikan dengan aplikasi SINKARKES. Input data di Sabata harus sama dengan data yang ada di aplikasi Sinkarkes Penanggung jawab dari Timker` Induk dimana data yang

			di aplikasi Sabata diperifikasi setelah Wilker Marunda input dalam aplikasi Sabata
5.	18 Juli 2025	Wilker Muara Angke	Memastikan kegiatan input data surveilans baik data kedatangan/ keberangkatan kapal, data penyakit, data kunjungan poliklinik dan data rujukan di wilayah kerja diakukan tepat waktu agar petugas input data SABATA juga dapat melakukan input data tepat waktu juga. Memastikan setiap data yang diinput sudah sesuai dengan dokumen yang diterbitkan (melakukan validasi data). Melakukan penyamaan penamaan untuk jenis diagnosis yang diinput, agar tidak terjadi kesalahan didalam penginputan aplikasi SABATA, sehingga tidak terdapat kesalahan didalam pengelompokan penyakit.
6.	18 Juli 2025	Wilker Muara Baru	Memberikan pemahaman bahwa setiap data surveilans epidemiologi yang ada dapat digunakan sebagai bahan desiminasi informasi kepada instansi lain yang berada di Wilayah Kerja Pelabuhan Muara Baru serta masyarakat. Selain itu data surveilans epidemiologi dapat sebagai salah satu indikator apabila terjadi kejadian luar biasa di wilayah kerja. Kendala yang dirasakan dalam penggunaan aplikasi SABATA yaitu, input data yang berulang-ulang sehingga memakan waktu lama dan tidak efisien. Terkadang didapati kendala didalam aplikasi SABATA seperti link yang "error".

D. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk (4249.RAB.001)

Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dalam rangka mendukung terlaksananya Media Surveilans Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam bentuk Standing Monitor, pengadaan alat dan bahan tersebut dianggarkan sebanyak Rp 38.500.000, (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) namun karena anggaran tidak mencukupi maka pengadaan alat dan bahan tersebut diefesiensi atau tidak dianggarkan kembali.

E. Pelatihan kesehatan (4249.TBC.001)

***On The Job Training* Surveilans Epidemilogi dan Kekarantinaan**

Salah satu amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi melalui pelatihan minimal 20 jam pelajaran (JP) pertahun. Tujuan utama dari

amanat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi ASN sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Maka Tim Kerja Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan *On The Job Training* Surveilans Epidemilogi dan Kekarantinaan bertujuan agar peserta mampu melakukan Surveilans Penyakit dan dasar-dasar kekarantinaan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Pada pelatihan ini peserta diberikan materi antara lain Konsep dan Dasar Surveilans Epidemiologi, Kebijakan Pencegahan Penyakit Menular, Kekarantinaan Kapal serta upaya pencegahan dan pengendalian. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh fasilitator yaitu penyampaian materi, tanya jawab dan praktek. Beberapa praktek yang dilakukan oleh peserta antara lain studi kasus kekarantinaan kapal. Dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Mei 2025 dengan peserta sebanyak 40 orang dilaksanakan di Gedung Percetakan negara. Penyelenggara pelatihan adalah pihak ketiga yang berkompeten. Pagu anggaran Kegiatan ini sebanyak Rp 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah), namun anggaran tersebut diefesiensi menjadi Rp 51.525.000,- (Lima puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari sumber anggaran PNBP dengan realisasi anggaran 100%.

F. Pencapaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang dilakukan oleh BBKK Tanjung Priok dalam kurun waktu Tahun 2025.

Tabel 4. 3 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

No	Sasaran	No	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/ PLBDN	10	10	100
			Persentase sinyal KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	10	10	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana telah disajikan pada tabel 4.3, Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan BBKK Tanjung Priok telah berhasil mencapai target 1 indikator Tahun 2025 dengan rata-rata capaian sebesar 100% dimana hanya 1 (satu) indikator tersebut memiliki capaian kinerja sebesar 100% dari yang telah ditetapkan. Dari target indikator yang sudah ditetapkan sebanyak 10 kasus, sehingga terealisasi tahun 2025 sebanyak 10 kasus (100%). 10 kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Sinyal SKD KLB Dan Bencana Yang Di Respon Kurang Dari 24 Jam

No.	Tanggal	Kegiatan	Nama pelaksana	Keterangan
1.	06 Pebruari 2025	Kapal kandas di pinggir DAM pelabuhan Tanjung Priok	1. Fredrik Lona Djara 2. dr. Ricky Atrian 3. dr. Dedy 4. Dinsi	- Posisi kapal berada di luar Dam (zona labuh) - Kapal SPOB. SPI 5 BSI - Awak kapal 18 orang - Diagnosa : Traumatis - Bukan penyakit PHEIC
2.	8 Maret 2025	Evakuasi penumpang kapal yang sakit di kapal MS. Riviera	1. Dr. Ricky Atrian 2. Muayana 3. Fredrik	- Posisi kapal berada di kade 108 - Kapal MS. Riviera dari Benoa, Bali - Diagnose : *Heart attack* - Pasien dirujuk RS Mitra Kelapa Gading - Bukan penyakit PHEIC
3.	9 Mei 2025	Wabah penyakit Chikungunyah di Wilayah kerja Puskesmas Cilincing	1. Rustama 2. Siti Nuraini 3. Elisabeth	- Wabah penyakit Chikungunyah di RT 09 RW.17 Kelurahan Semper Barat - Jumlah 15 kasus - Diagnose : Chikungunyah - Penyakit berpotensi KLB dan Bencana
4.	11 Mei 2025	Kapal KM. Zahro mati mesin	1. Fredrik 2. Dinsi 3. Gensian	- Posisi kapal berada di Zona labuh (1 Nm) - Jumlah 79 orang (awak kapal dan penumpang) - Diagnose : Syok - Bukan penyakit PHEIC
5.	5 Juni 2025	Awak kapal meninggal MV. HL Samcheonpo	1. Fredrik 2. Marwan	- Posisi kapal berada di Zona Karantina (10 Nm) - Kapal MV. HL Samcheonpo dari South Korea - Diagnose : *Heart attack* - Bukan penyakit PHEIC
6.	16 Juli 2025	Evakuasi Awak kapal meninggal MV. STEVEN	1. Fredrik Lona Djara 2. M. Zahri 3. dr. Ricky A	- Posisi kapal berada di luar Dam (zona labuh) - Kapal MV. STEVEN dari Kolombia tujuan China - Awak kapal 20 orang

No.	Tanggal	Kegiatan	Nama pelaksana	Keterangan
				- Diagnosa : Heart Attack - Bukan penyakit PHEIC
7.	11 Agustus 2025	Evakuasi Awak kapal meninggal KM. ABUSAMAH	1. Fredrik Lona Djara 2. M. Edi Hamdi 3. Sriwahyudi	- Posisi kapal berada di kade 108 - Kapal KM. ABUSAMAH dari Semarang tujuan Lhokseumawe - Diagnose : *Heart attack* - Pasien dirujuk RSCM - Bukan penyakit PHEIC
8.	11 Agustus 2025	Kebakaran kapal KM. Dorolonda	4. Dr. Deddy A	- Kapal terbakar di Galangan Kapal/DKB I - kapal KM. Dorolonda - Tidak terdapat korban jiwa - Bukan penyakit PHEIC
9.	20 Oktober 2025	Kecelakaan kerja Awak kapal MV. OOCL NORFLOK	1. dr. Sahat 2. dr. Ricky A 3. Fredrik Lona Djara	- Posisi kapal berada di luar Dam (zona labuh) - Kapal MV. OOCL NORFLOK dari Singapore tujuan Shekou, China - Awak kapal 20 orang - Diagnosa : Vulnus Laceratum Regio Frontalis (robek dahi,alis mata kiri) - Bukan penyakit PHEIC
10.	24 Desember 2025	Penyakit akibat kerja kapal MV. APL TURKEY	1.Dedi Sutardi 2.Agi Gunawan 3.Sri Wahyudi 4.Fredrik Lona Djara	- Posisi kapal berada di luar Dam (zona labuh) - Kapal MV. APL Turkey dari Singapore. - Awak kapal 23 orang - Diagnosa : Mental disorder - Bukan penyakit PHEIC

4.1.2 PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG

A. Pengawasan Kedatangan Kapal

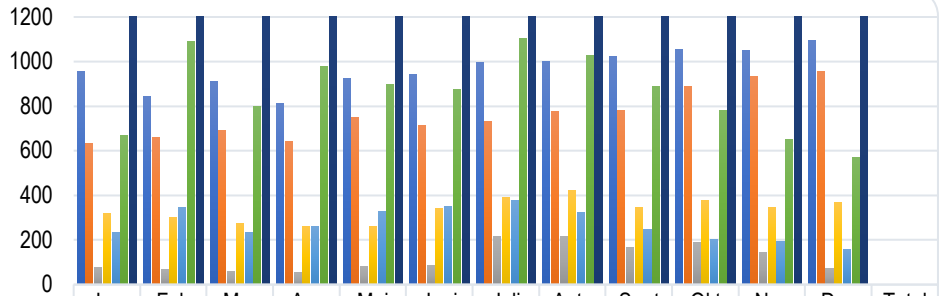
Pengawasan kedatangan kapal yang dilakukan di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Tanjung Priok terdiri dari pengawasan kapal dari dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas BBKK Tanjung Priok.

Pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal terdiri dari pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, awak kapal dan faktor risiko. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data dan informasi cakupan pengawasan kapal dari pelabuhan dalam negeri dan untuk pengawasan kapal dari luar negeri berupa dokumen *free pratique*. Hasil yang diharapkan adalah semua kedatangan kapal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat diawasi kesehatannya. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan kapal dan muatannya tidak menimbulkan permasalahan kesehatan.

1. Pengawasan Kedatangan Kapal Dari Pelabuhan Dalam Negeri

   Pengawasan kedatangan kapal dari dalam negeri terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 wilayah kerja yaitu Pelabuhan Muara Baru, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Muara Angke. Distribusi kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri pada tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 4.1 di bawah ini.

Grafik 4. 1 Distribusi Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	954	844	909	810	924	944	994	1000	1021	1056	1048	1096	11600
Marunda	633	661	692	642	748	712	730	778	782	889	935	954	9156
Kalibaru	78	69	60	54	83	87	214	217	165	187	145	73	1432
Sunda Kelapa	318	302	273	259	259	340	390	421	345	377	347	369	4000
Muara Baru	233	344	233	260	329	349	375	323	249	203	192	159	3249
Muara Angke	668	1090	800	976	899	877	1103	1026	890	782	649	572	10332
Total	2884	3310	2967	3001	3242	3309	3806	3765	3452	3494	3316	3223	39769

Berdasarkan grafik 4.1 di atas diketahui jumlah kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 39.769 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 3.314 kapal. Kedatangan kapal dari dalam negeri terbanyak pada bulan Juli yaitu sebanyak 3.806 kapal (9,57%).

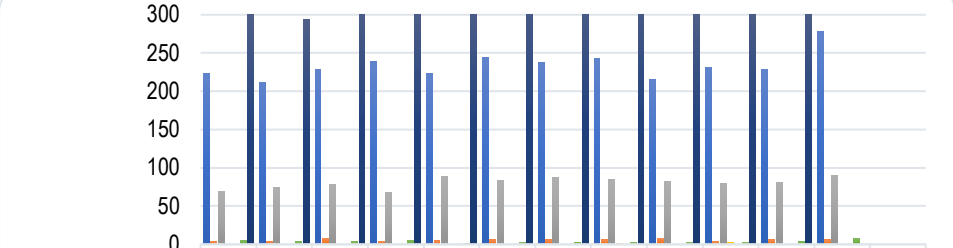
2. Pengawasan Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri

   Pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri dimaksudkan sebagai upaya cegah tangkal penyakit yang datang dari luar negeri. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan utama yang berfungsi sebagai pintu gerbang bagi penumpang dan lalu lintas ekspor/impor barang. Mobilitas masyarakat pelabuhan dan aktifitas ekonomi yang tinggi dan padat sangat potensial untuk terjadinya transmisi penyebaran penyakit menular potensial wabah.

   Ini berarti bahwa tantangan BBKK semakin besar dalam upaya mencegah masuknya penyakit-penyakit tersebut melalui pelabuhan sebagai pintu masuk Negara. Pengawasan kedatangan kapal dari luar negeri pada Tahun 2025 dilakukan di

Pelabuhan Tanjung Priok dan Wilayah Kerja. Untuk distribusi kedatangan kapal dari luar negeri dapat dilihat pada grafik 4.2 dibawah ini:

Grafik 4. 2 Distribusi Kedatangan Kapal dari Pelabuhan Luar Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	223	212	229	239	223	244	237	243	216	231	229	278	2804
Marunda	4	4	8	4	5	6	6	6	8	4	6	6	67
Kalibaru	69	74	78	68	89	84	87	85	82	80	81	90	967
Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Angke	5	4	4	5	1	3	2	3	3	3	4	8	45
Total	301	294	319	316	318	337	332	338	309	320	320	382	3886

Berdasarkan grafik 4.2 diatas diketahui jumlah kedatangan kapal dari luar negeri terjangkit di wilayah pengawasan BBKK Priok pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 3.886 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 324 kapal. Kedatangan kapal dari Pelabuhan luar negeri terjangkit terbanyak pada bulan Desember yaitu sebanyak 382 kapal (9,83%).

B. Pengawasan Keberangkatan Kapal

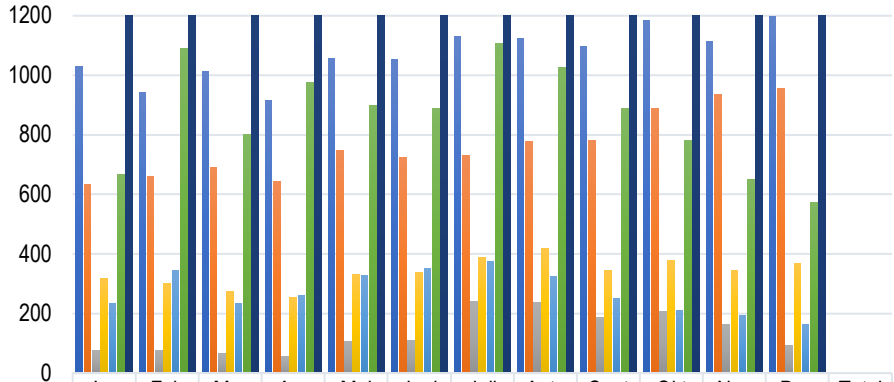
Pengawasan keberangkatan kapal yang dilakukan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok terdiri dari pengawasan keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas jaga/piket dengan memeriksa dokumen kesehatan kapal, dan kesehatan Awak Kapal. Keluaran dari kegiatan ini berupa data informasi cakupan pengawasan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri dan kapal tujuan luar negeri berupa dokumen *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC).

Hasil yang diharapkan adalah semua keberangkatan kapal baik tujuan dalam negeri maupun tujuan luar negeri dapat diawasi kesehatannya. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan kondisi kesehatan kapal dan muatannya selalu terawat dan terpelihara, sehingga tidak menimbulkan permasalahan kesehatan.

Data keberangkatan kapal Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

1. Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Dalam Negeri

Grafik 4. 3 Distribusi Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

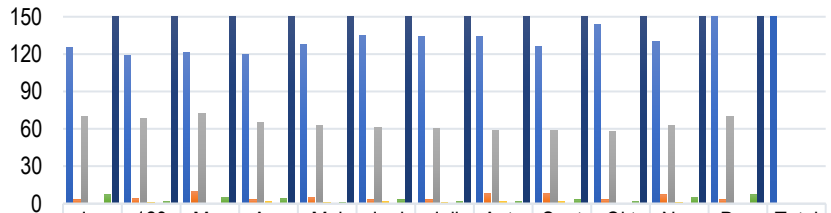


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	1031	942	1012	916	1057	1054	1130	1124	1096	1183	1112	1197	12854
Marunda	635	661	691	643	748	723	732	777	782	889	935	957	9173
Kalibaru	75	75	65	57	107	111	242	237	186	207	162	93	1617
Sunda Kelapa	318	301	273	255	332	338	389	419	343	378	346	369	4061
Muara Baru	233	344	233	260	329	351	376	323	249	211	192	162	3263
Muara Angke	667	1091	801	976	899	888	1107	1026	890	782	649	572	10348
Total	2959	3414	3075	3107	3472	3465	3976	3906	3546	3650	3396	3350	41316

Berdasarkan grafik 4.3 diketahui jumlah keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada Tahun 2025 yaitu sebanyak 41.316 kapal dengan rata-rata perbulan sebanyak 3.443 kapal. Keberangkatan kapal tujuan pelabuhan dalam negeri terbanyak yaitu pada bulan Juli sebanyak 3.976 kapal (9,62%).

2. Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Luar Negeri

Grafik 4. 4 Distribusi Keberangkatan Kapal Tujuan Pelabuhan Luar Negeri



	Jan	129	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	125	119	121	120	128	135	134	134	126	144	130	162	1578
Marunda	3	4	10	3	5	3	3	8	8	3	7	3	60
Kalibaru	70	68	72	65	63	61	60	59	59	58	63	70	768
Sunda Kelapa	0	1	0	2	1	2	1	2	2	0	1	0	12
Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Angke	7	2	5	4	1	3	2	2	3	2	5	7	43
Total	205	194	208	194	198	204	200	205	198	207	206	242	2461

Berdasarkan grafik 4.4 diketahui jumlah keberangkatan kapal tujuan luar negeri di wilayah pengawasan BBKK Tanjung Priok pada tahun 2025 yaitu sebanyak 2.461

kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 205 kapal. Keberangkatan kapal tujuan luar negeri terjangkit terbanyak pada bulan Desember yaitu sebanyak 242 kapal (9,83%).

C. Pemeriksaan Faktor Risiko Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Impor)

Kegiatan Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 ini dianggarkan sebesar Rp 59.590.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pemeriksaan sampel makanan dan minuman. *Output* dari kegiatan ini yaitu berupa penerbitan *Health Certificate* sebanyak 4.429 *certificate* dan hasil pemeriksaan laboratorium sebanyak 27 sampel pemeriksaan. *Outcomenya* yaitu terawasinya lalu lintas komoditi Omkaba ekspor-impor, sedangkan *benefitnya* adalah terlaksananya kegiatan pengawasan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok. *Impact* dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan yang berkualitas dan pelaksanaan pengawasan Omkaba tidak menjadi sarana penularan penyakit potensial wabah.

Penerbitan *Health Certificate* bersifat pasif berdasarkan permintaan. Negara tujuan yang meminta *Health Certificate* diantaranya: China, Africa, United Arab Emirate, Brunai Daru Salam, Mesir, United State America, Iran, Pakistan, Korea Selatan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada penerbitan *Health Certificate* diantaranya: pemeriksaan dokumen, fisik dan pengambilan sampel, pengiriman sampel ke laboratorium terakreditasi dan pengambilan hasil pemeriksaan sampel. Pengambilan sampel dilakukan di wilayah Jabodetabek, Cikarang, Karawang, Cilegon dan Bandung untuk uji laboratoriun sampel komoditi OMKABA di lakukan ke Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Daftar pengawasan lalu lintas komoditi omkaba ekspor-impor untuk hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok selama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Pengawasan Lalu Lintas Komoditi Omkaba Ekspor Impor

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPLE	NAMA PRODUK	HASIL
1	PT. Semeru Indonesia Maju	Jakarta	2 Januari 2025	Daun kelor bubuk	Memenuhi syarat
2	PT. Bisnis International Sentosa	Jakarta	10 Januari 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
3	PT. Tropical International Trading	Tangerang	17 Januari 2025	Palm Sugar	Memenuhi syarat
4	PT. Arta Maja Prima	Tangerang	17 Januari 2025	Sambal ABC	Memenuhi syarat

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	TANGGAL PENGAMBILAN SAMPLE	NAMA PRODUK	HASIL
5	PT. Santos Jaya Abadi	Karawang	17 Januari 2025	Premix	Memenuhi syarat
6	CV. Panen Baru	Jakarta	18 Januari 2025	Lada putih	Memenuhi syarat
7	PT. Kalisabuk Lintas Samudera	Jakarta	21 Januari 2025	Kerupuk Bawang	Memenuhi syarat
8	PT Persatuone Komoditas Indonesia	Jakarta	21 Februari 2025	Cocoa Powder	Memenuhi syarat
9	PT. Pahala Bahari Nusantara	Cikarang	17 Maret 2025	Fish Meal	Memenuhi syarat
10	PT. Niagara Trading Utama	Jakarta	18 Maret 2025	Biji Kopi (Farzin Coffee)	Memenuhi syarat
11	PT. Shiv Jaya Abadi	Jakarta	11 April 2025	Indomie Goreng	Memenuhi syarat
12	PT. Morium Memorindo	Bandung	30 April 2025	Cocoa powder	Memenuhi syarat
13	PT. Terra International Indonesia	Tangerang	4 Juni 2025	Cocoa powder	Memenuhi syarat
14	PT. Herisa Dwi Sejahtera	Jakarta	20 Juni 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
15	PT. Gunung Sarihijau Enam Tiga	Bekasi	25 Juni 2025	Teh hitam	Memenuhi syarat
16	CV. Perdagangan Agung Gumilang	Tangerang	16 Juli 2025	Buah pinang kering	Memenuhi syarat
17	PT. Coco Jaya Makmur	Jakarta	18 Juli 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
18	PT. Dynamic International	Jakarta	21 Juli 2025	Larutan Penyegar Cap Badak Rasa Jambu	Memenuhi syarat
19	PT. Ruby Privatindo	Bekasi	22 Juli 2025	Kopra kering	Memenuhi syarat
20	PT. Prima Aneka Rasa	Jakarta	23 Juli 2025	Strawberry Topping	Memenuhi syarat
21	PT. Mahardhika Bersama Petani	Tangerang	31 Juli 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
22	PT. Sofi Agro Industries	Bekasi	6 Agustus 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
23	PT. Indo Rempah Commodities	Jakarta	8 Agustus 2025	Desiccated Coconut	Memenuhi syarat
24	PT. Deli Indo Duta Sukses	Tangerang	25 September 2025	Daribell Shrimp Roll (Snack)	Memenuhi syarat
25	PT. Yogama Part Manufactur	Jakarta	8 Oktober 2025	Biji pinang	Memenuhi syarat
26	PT. Kino Indonesia	Serang	15 Oktober 2025	Larutan penyegar cap kaki tiga	Memenuhi syarat
27	PT. Hemdev Barokah Jaya Cocoa Abadi	Jakarta	17 Oktober 2025	Cocoa powder	Memenuhi syarat

Realisasi Pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Terhadap Barang (Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Adiktif Ekspor Impor) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 59.429.319,- (99,73%).

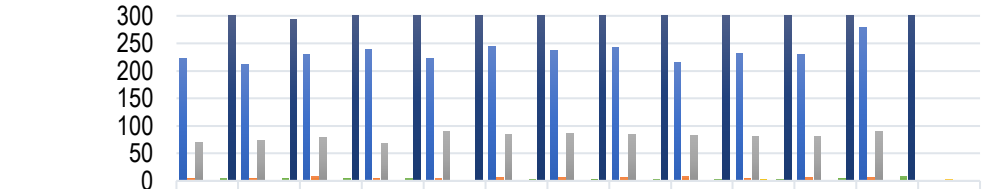
D. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal

Penerbitan dokumen kesehatan merupakan salah satu Tupoksi Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang. Penerbitan dokumen kesehatan ini dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan penerbitan dokumen kesehatan. Keluaran dari kegiatan ini adalah ditebitkannya sertifikat (Dokumen) yang mana kegiatan ini diharapkan semua kapal memiliki dokumen kesehatan, dan komoditi OMKABA dapat diterbitkan *Health Certificate* sehingga melalui dokumen yang diterbitkan dapat terpantau kesehatannya. Dokumen kesehatan yang diterbitkan adalah C*ertificate Of Pratique* (COP), *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC), buku kesehatan, P3K Kapal, SSCEC/SSCC

Berikut ini adalah penerbitan dokumen kesehatan kapal yang sudah dikeluarkan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025:

1. Penerbitan *Certificate Of Pratique*

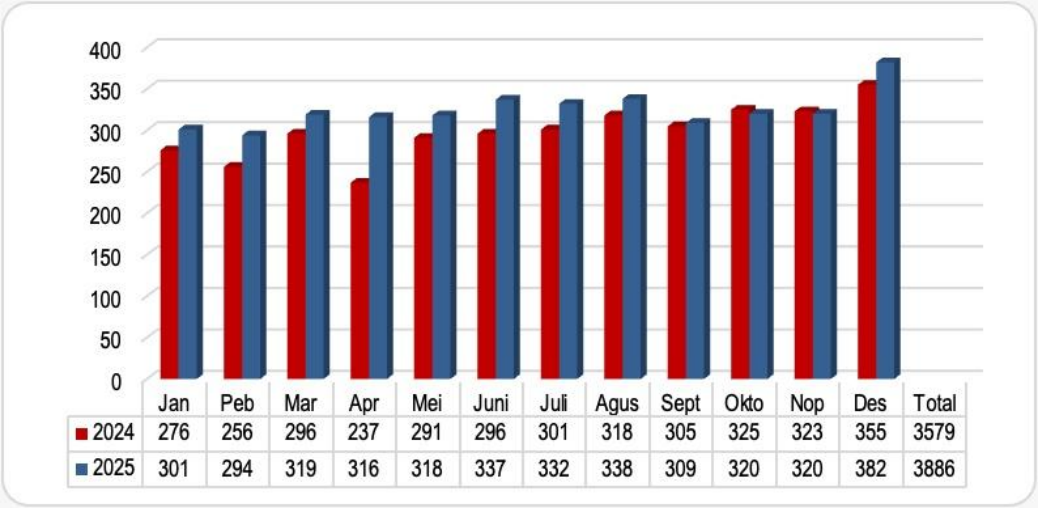
Grafik 4. 5 Distribusi Penerbitan COP



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	223	212	229	239	223	244	237	243	216	231	229	278	2804
Marunda	4	4	8	4	5	6	6	6	8	4	6	6	67
Kalibaru	69	74	78	68	89	84	87	85	82	80	81	90	967
Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Angke	5	4	4	5	1	3	2	3	3	3	4	8	45
Total	301	294	319	316	318	337	332	338	309	320	320	382	3886

Berdasarkan grafik 4.5 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *Certificate of Pratique* di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 3.886 dokumen dengan rata-rata perbulannya sebanyak 324 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak yaitu pada Bulan Desember yaitu sebanyak 382 dokumen (9,83%). Untuk penerbitan *Certificate Of Free Pratique* dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut Tahun 2025 sebanyak 3.871 dokumen sedangkan untuk penerbitan *restricted pratique* sebanyak 15 dokumen.

Grafik 4. 6 Distribusi Perbandingan Penerbitan COP tahun 2024 dan 2025

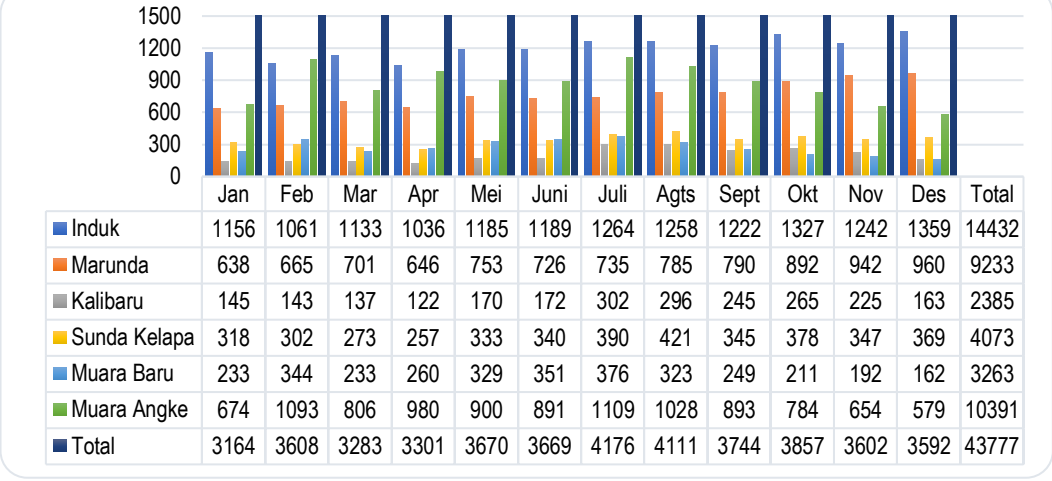


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	276	256	296	237	291	296	301	318	305	325	323	355	3579
2025	301	294	319	316	318	337	332	338	309	320	320	382	3886

Berdasarkan grafik 4.6 diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen *Certificate Of Pratique* (COP) pada Tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan COP pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebanyak 306 dokumen (8%).

2. Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance*

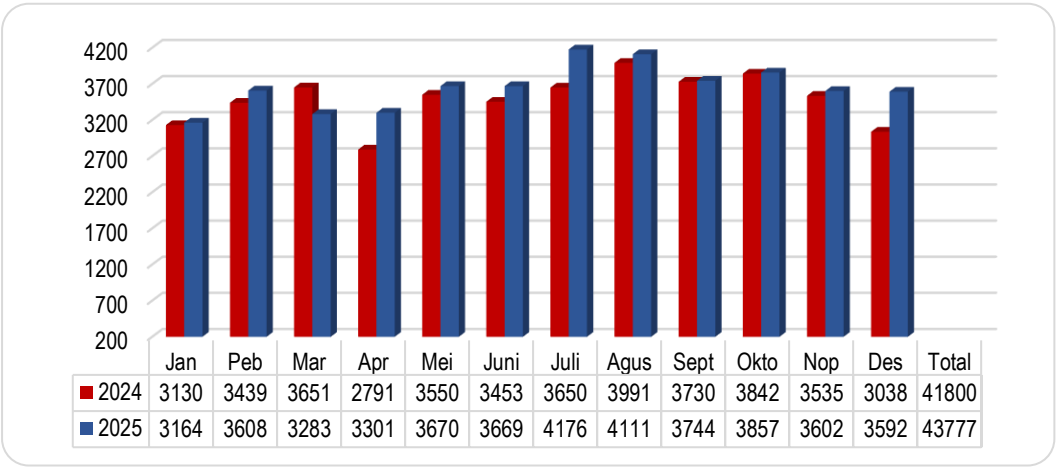
Grafik 4. 7 Distribusi Penerbitan PHQC di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	1156	1061	1133	1036	1185	1189	1264	1258	1222	1327	1242	1359	14432
Marunda	638	665	701	646	753	726	735	785	790	892	942	960	9233
Kalibaru	145	143	137	122	170	172	302	296	245	265	225	163	2385
Sunda Kelapa	318	302	273	257	333	340	390	421	345	378	347	369	4073
Muara Baru	233	344	233	260	329	351	376	323	249	211	192	162	3263
Muara Angke	674	1093	806	980	900	891	1109	1028	893	784	654	579	10391
Total	3164	3608	3283	3301	3670	3669	4176	4111	3744	3857	3602	3592	43777

Berdasarkan grafik 4.7 diketahui jumlah penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Clearance* di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 43.777 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 3.648 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak yaitu pada bulan Juli yaitu sebanyak 4.176 dokumen (9,5%).

Grafik 4. 8 Distribusi Perbandingan Penerbitan PHQC

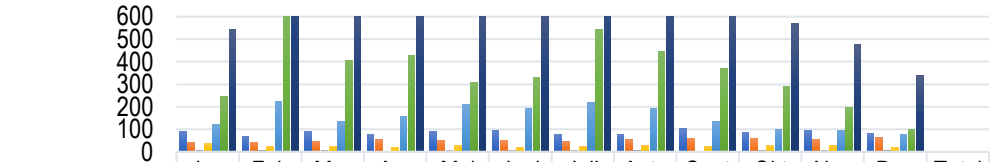


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	3130	3439	3651	2791	3550	3453	3650	3991	3730	3842	3535	3038	41800
2025	3164	3608	3283	3301	3670	3669	4176	4111	3744	3857	3602	3592	43777

Berdasarkan grafik 4.8 diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2025 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1.977 dokumen (5%).

3. Penerbitan Sertifikat SSCEC

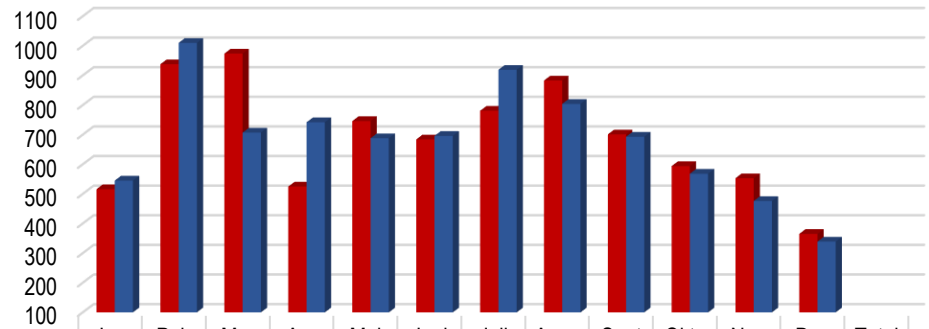
Grafik 4. 9 Distribusi Penerbitan SSCEC



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	91	69	90	76	89	93	78	78	102	87	95	80	1028
Marunda	42	43	48	54	49	49	46	53	60	59	54	64	621
Kalibaru	4	4	5	3	7	8	8	4	0	6	8	4	61
Sunda Kelapa	39	24	25	21	27	20	25	30	23	27	27	18	306
Muara Baru	123	224	133	159	210	194	218	192	136	97	96	75	1857
Muara Angke	246	646	406	429	306	332	544	447	372	292	196	98	4314
Total	545	1010	707	742	688	696	919	804	693	568	476	339	8187

Berdasarkan grafik 4.9 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *SSCEC* di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 8.187 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 682 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan Februari yaitu sebanyak 1.010 dokumen (12,34%).

Grafik 4. 10 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCEC

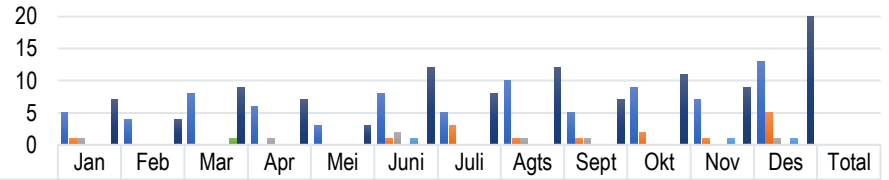


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	516	938	974	525	746	684	781	883	701	594	553	365	8260
2025	545	1010	707	742	688	696	919	804	693	568	476	339	8187

Berdasarkan grafik 4.10 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat SSCEC pada Tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan SSCEC pada Tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 73 dokumen (0,88%).

4. Penerbitan Sertifikat SSCC

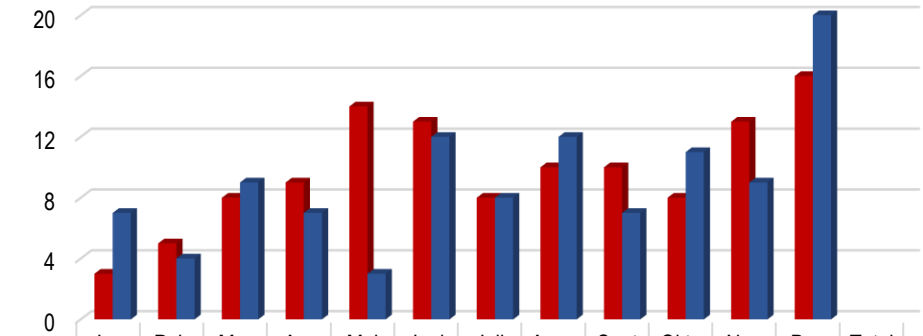
Grafik 4. 11 Distribusi Penerbitan SSCC



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	5	4	8	6	3	8	5	10	5	9	7	13	83
Marunda	1	0	0	0	0	1	3	1	1	2	1	5	15
Kalibaru	1	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	1	7
Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muara Baru	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
Muara Angke	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	7	4	9	7	3	12	8	12	7	11	9	20	109

Berdasarkan grafik 4.11 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen *SSCC* BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 109 dokumen dengan rata-rata perbulannya sebanyak 9 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan Desember yaitu sebanyak 20 dokumen (18,35%). Jumlah penerbitan SSCC berdasarkan permohonan dari pengguna jasa sebanyak 93 dokumen dan temuan dalam rangka pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut sebanyak 16 dokumen.

Grafik 4. 12 Distribusi Perbandingan Penerbitan SSCC

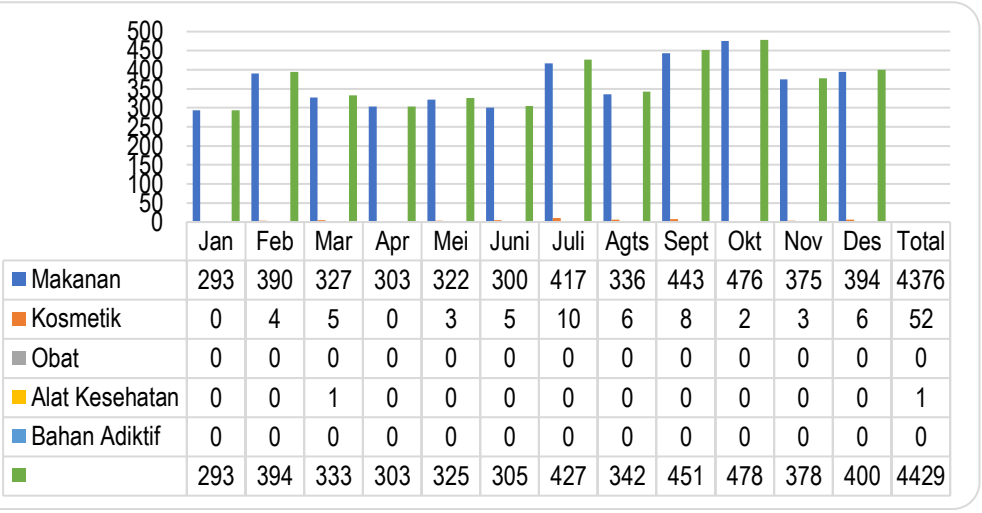


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	3	5	8	9	14	13	8	10	10	8	13	16	117
2025	7	4	9	7	3	12	8	12	7	11	9	20	109

Berdasarkan grafik 4.12 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat SSCC pada Tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan SSCC pada Tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 8 dokumen (7%).

5. Penerbitan *Health Certifcate*

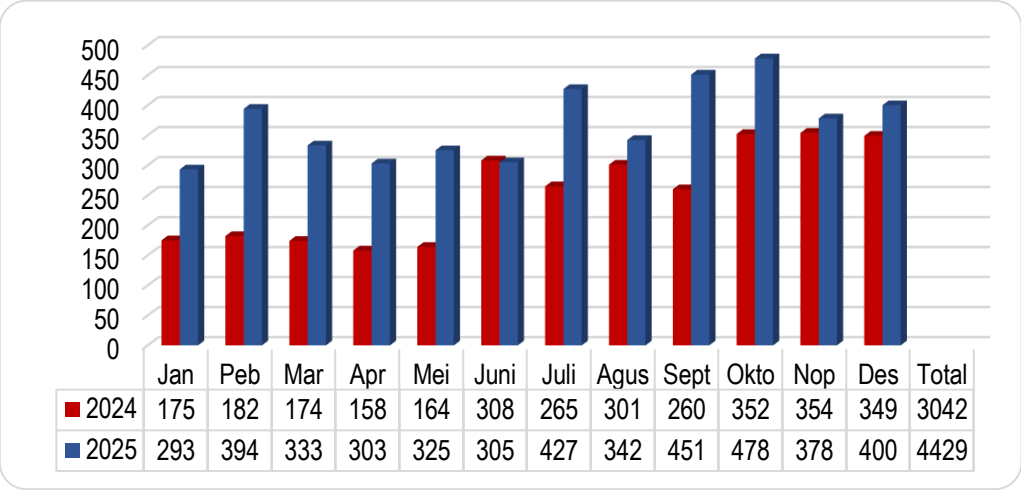
Grafik 4. 13 Distribusi Penerbitan Health Certificate



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Makanan	293	390	327	303	322	300	417	336	443	476	375	394	4376
Kosmetik	0	4	5	0	3	5	10	6	8	2	3	6	52
Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alat Kesehatan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bahan Adiktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	293	394	333	303	325	305	427	342	451	478	378	400	4429

Berdasarkan grafik 4.13 diketahui jumlah penerbitan dokumen *Health Certificate* BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 4.429 dokumen dengan rata–rata per bulannya sebanyak 369 dokumen. Kegiatan pengawasan Omkaba di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 meliputi makanan sebanyak 4.376 sertifikat, kosmetika sebanyak 52 sertifikat dan alkes sebanyak 1 sertifikat.

Grafik 4. 14 Distribusi Perbandingan Penerbitan Health Certificate

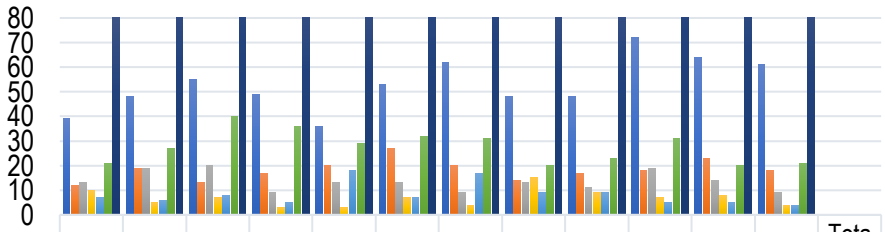


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	175	182	174	158	164	308	265	301	260	352	354	349	3042
2025	293	394	333	303	325	305	427	342	451	478	378	400	4429

Berdasarkan grafik 4.14 diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen *Health Certificate* Omkaba pada Tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan *Health Certificate* pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.387 dokumen (31%). Penerbitan *Health Certificate* di Tahun 2025 meningkat karena bertambahnya jumlah perusahaan yang mengajukan *Health Certificate.*

6. Penerbitan Buku Kesehatan

Grafik 4. 15 Distribusi Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

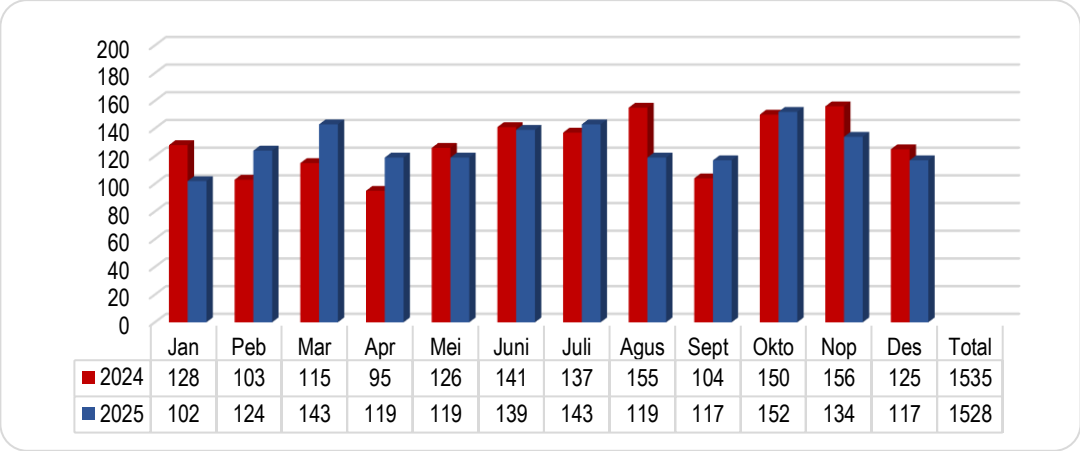


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Induk	39	48	55	49	36	53	62	48	48	72	64	61	635
Marunda	12	19	13	17	20	27	20	14	17	18	23	18	218
Kalibaru	13	19	20	9	13	13	9	13	11	19	14	9	162
Sunda Kelapa	10	5	7	3	3	7	4	15	9	7	8	4	82
Muara Baru	7	6	8	5	18	7	17	9	9	5	5	4	100
Muara Angke	21	27	40	36	29	32	31	20	23	31	20	21	331
Total	102	124	143	119	119	139	143	119	117	152	134	117	1528

Berdasarkan grafik 4.15 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen Buku Kesehatan Kapal di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 1.528 dokumen dengan

rata-rata per bulannya sebanyak 127 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 152 dokumen (9,95%).

Grafik 4. 16 Distribusi Perbandingan Penerbitan Buku Kesehatan Kapal

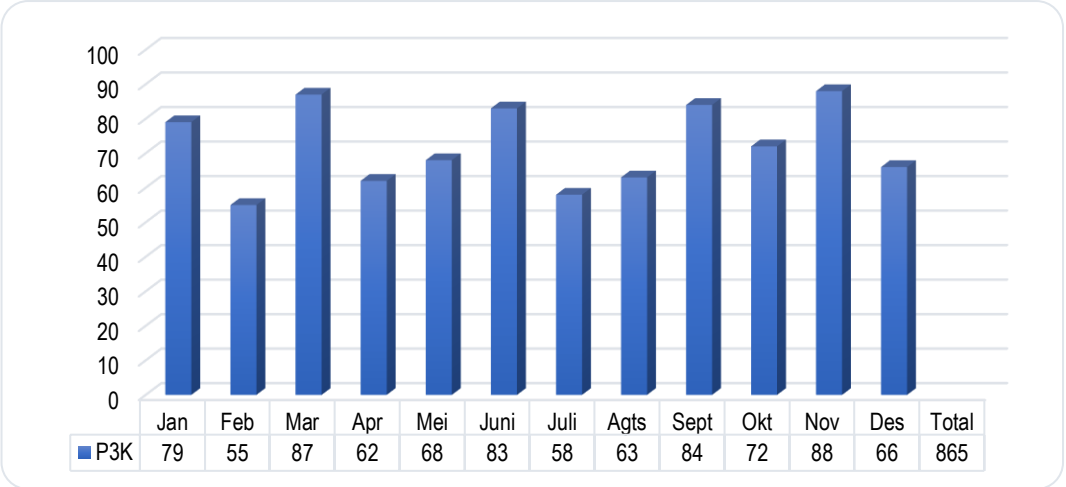


	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okto	Nop	Des	Total
2024	128	103	115	95	126	141	137	155	104	150	156	125	1535
2025	102	124	143	119	119	139	143	119	117	152	134	117	1528

Berdasarkan grafik 4.16 diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat Buku Kesehatan Kapal pada Tahun 2024 dan 2025, dimana jumlah penerbitan buku kesehatan kapal pada Tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 7 dokumen (0,5%).

7. Penerbitan P3K Kapal

Grafik 4. 17 Distribusi Penerbitan P3K Kapal Di Wilayah Pengawasan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Total
P3K	79	55	87	62	68	83	58	63	84	72	88	66	865

Berdasarkan grafik 4.17 diatas diketahui jumlah penerbitan dokumen P3K Kapal di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebanyak 865 dokumen dengan rata-rata per bulannya sebanyak 72 dokumen. Jumlah penerbitan dokumen terbanyak terjadi pada bulan November yaitu sebanyak 88 dokumen (10,20%).

E. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ALAT ANGKUT DAN BARANG.

1. *On The Job Training* Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan

On The Job Training Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Anggaran kegiatan Pelatihan ini sebesar Rp.73,216,000,- yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang yang berasal dari BBKK Tanjung Priok. Acara diselenggarakan pada tanggal 28 - 29 April 2025 di Ruang Rapat Gedung Record Centre Lantai 2 Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta Pusat.

Output dari *On The Job Training* Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas BBKK ini berupa sertifikat pelatihan. *Outcomenya* adalah untuk meningkatkan kapasitas serta me-r*efresh* keterampilan dan pengetahuan tentang pengawasan faktor risiko kesehatan di alat angkut khususnya di kapal, b*enefitnya* adalah petugas dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP (Standart operasional prosedur) pada saat melaksanakan pemeriksaan kapal dalam karantina, *Impactnya* kegiatan petugas terlindungi dari tertularnya penyakit berpotensial KLB dan wabah.

Tabel 4. 6 Daftar Nama Peserta On The Job Training Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Agus Sudarman, SKM, MKM	Sanitarian Ahli Madya
2.	dr. Theresia Hermin S.W	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya
3.	Teti Herawati, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
4.	dr. Imelda Noviana Parana	Dokter Ahli Muda
5.	Masyita, S. Farm	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
6.	M. Jamil, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
7.	M. Fajar Subechi, SKM, MKM	Sanitarian Ahli Muda
8.	Evi Maria, S. Farm	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
9.	M. Zahri SKM, M. Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda
10.	dr. Dwie Meiningwati	Dokter Ahli Muda
11.	dr. Nita Ayu Sormin	Dokter Ahli Muda

No.	Nama	Jabatan
12.	Rudi Salam, SE	Perencana/Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
13.	Cukup Sugianto, SST	Entomolog Kesehatan Ahli Muda
14.	Fatma Zahara	Epidemiolog Kesehatan Penyelia
15.	Hasmuliati	Perawat Penyelia
16.	Hadi Nugraha, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
17	Asri Rahmatia	Sanitarian Mahir
18	Elisabeth B.F. Simanjuntak, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
19	Mutakin Zaenal Mustofa	Entomolog Kesehatan Mahir
20	Yulia Darutantri, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
21	M. Amnurokhim Malahade, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
22	M. Edi Hamdi, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
23	Yufa Zuriya, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
24	Resmaleni, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
25	Setiana, SKM	Sanitarian Ahli Pertama
26	Sri Wahyudi	Perawat Mahir
27	Rhani Desica	Perawat Penyelia
28	Nelly Toding Padang	Arsiparis
29	Ita Amelia, S. Kep	Arsiparis Ahli Pertama
30	Agi Gunawan Wibisono	Sanitarian Mahir
31	Luh Ayu Krisadayanti	Perawat Mahir
32	Afriani	Asisten Perawat
33	Wahyu Kurniawan	Epidemiolog Kesehatan Terampil
34	Baskara Yuda Pratama	Entomolog Kesehatan Terampil
35	Wahyudi	Perawat Terampil
36	Reynaldo	Entomolog Kesehatan Terampil
37	Wiar Bentara Agesang	Sanitarian Terampil
38	Azis Permana	Pranata Keuangan APBN Terampil
39	Hanafi Daulay	Perawat Terampil
40	Ajat Sudrajat, SKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama
41	Micael Agung Kuera	Epidemiolog Kesehatan Terampil
42	Yessi Mariana Gultom	Epidemiolog Kesehatan Terampil

No.	Nama	Jabatan
43	Bambang Wicaksono	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil
44	La Marwan	Perawat Terampil

Realisasi anggaran On The Job Training Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Kapal Bagi Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 73,216,000,- (100%), seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.

2. Pelatihan Pelatihan Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi

Pelatihan Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan kekarantinaan. Anggaran kegiatan Pelatihan ini sebesar Rp 17.558.000- yang dialokasikan untuk kegiatan pelatihan di luar kantor dan webinar sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Pelatihan Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi Tahun 2025

No.	Tanggal	Lokasi	Nama Pelaksana	Kegiatan
1.	30 September 2025	IPB Training Center Bogor	1. Agus Sudarman 2. M.Edi Hamdi 3. Yulia Darutantri 4. Cukup Sugianto 5. Asri Rahmatia 6. Rhani Desica 7. Micael Agung K.	*Fogging Treatment*: Pengenalan, Perawatan dan Aplikasi Yang Baik dan Benar
2.	27 November 2025	Kolam Renang Tirta Bhadrika, Jalan Kemang Bogor	Ajat Sudrajat	Pengembangan Kompetensi ASN Pelatihan *Basic Sea Survival* PT.Omega Safety Indonesia
3.	14 Desember 2025	BBKK Tanjung Priok	1. dr. Theresia 2. Romanika 3. Fatma Zahara 4. Evi Maria 5. Yulia Darutantri 6. Wahyu Kurniawan 7. Micael Agung K.	Webinar Nasional Peran dan Kompetensi Epidemiolog Kesehatan dalam dalam Pencegahan *Foodborne Outbreak* Angkatan 1

Output dari kegiatan Pelatihan Teknis Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi yaitu sertifikat pelatihan. *Outcomenya* adalah meningkatnya ketrampilan petugas dalam mengoperasikan alat teknis dan pengetahuan dalam program cegah tangkal penyakit potensial KLB dan wabah, *benefitnya* adalah meningkatnya kompetensi dan

kepercayaan diri petugas BBKK Tanjung Priok dalam pelaksanaan tugas, *impactnya* meningkatnya produktifitas kerja dan mudah menerapkan teknologi terbaru dilingkungan kerja.

Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp 17.525.000,-(99,81%), seluruh peserta pelatihan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat.

3. Pertemuan Dalam Bidang Epidemiologi dan Karantina

Pertemuan Dalam Bidang Epidemiologi dan Karantina Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 13.920.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan Pertemuan Ilmiah Epidemiologi Nasinoal ke-12 Tanggal 23 s.d 25 Juli 2025 sebanyak 3 orang di Hotel Mustika Yogyakarta, dengan tema utama ”Perubahan Iklim dan Krisis Kesehatan Global: Menghadapi Penyakit Terkait Lingkungan”.

Output dari Pertemuan Dalam Bidang Epidemiologi dan Karantina ini berupa sertifikat. *Outcomenya* adalah diharapkan tenaga epidemilogi mampu dalam mengidentifikasi tantangan utama dalam menghadapi penyakit yang terkait dengan lingkungan serta mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif dalam upaya mitigasi dan adaptasi, *benefitnya* dapat menjadi wadah bagi para epidemiolog untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu terkini tentang kesehatan masyarakat. *Impactnya* adalah peran dan sinergi yang dibangun oleh ahli epidemiolog lapangan, pemerintah dan organisasi nasional dan internasional, akademis serta masyarakat sipil yang dapat menjadi kunci dalam menghadapi krisis kesehatan global yang dipicu oleh perubahan iklim. Realisasi anggaran Pertemuan ini sebesar Rp 13.916.000,- (99,97%).

4. Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara *Online*

Bahan Pendukung Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal Secara *Online* Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 62.064.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan barang di pelayanan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan barang yaitu tas *boarding* dan ATK untuk penerbitan dokumen kekarantinaan. *Outcomenya* adalah tersedianya sarana pendukung kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal. *Benefit* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal secara optimal sehingga pengguna jasa dapat terlayani, *Impactnya* pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Realisasi anggaran untuk bahan pendukung penerbitan dokumen kesehatan kapal secara *online* Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 62.063.985,-(100%).

5. Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan

Formulir Pendukung Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 24.040.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan formulir cetakan di pelayanan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya pengadaan barang formulir pemeriksaan kapal dalam karantina, formular pemeriksaan SSCEC/SSCC, lembar disposisi, formular *health certificate*. *Outcomenya* adalah tersedianya sarana pendukung kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal. *Benefit* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal secara optimal sehingga pengguna jasa dapat terlayani dengan baik. *Impactnya* pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal dapat berjalan dengan baik dan lancar. Realisasi anggaran untuk Formulir ini sebesar Rp 23.771.760- (98,88%).

6. Pengadaan Bahan dan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan

Pengadaan Bahan dan Alat Pelindung Diri Kekarantinaan Kesehatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 12.352.000,- yang dialokasikan untuk pengadaan APD dalam rangka pengawasan kekarantinaan.

Output dari kegiatan ini tersedianya alat pelindung diri bagi petugas berupa masker bedah, masker N95 dan *handscoon*. *Outcomenya* yaitu terlindunginya petugas BBKK Tanjung Priok dari risiko penularan penyakit saat melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengawasan kapal dalam karantina, *benefitnya* meningkatnya kepatuhan menggunakan alat pelindung diri (APD) oleh petugas karantina, *impactnya* menurunnya risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja BBKK Tanjung Priok.

Realisasi anggaran untuk Pengadaan ini sebesar Rp 12.290.475- (99,50%).

7. Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut

Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 1.530.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan fumigasi dan desinseksi kapal.

Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya tindakan penanggulangan faktor risiko di alat angkut sebanyak 82 kapal yang terdiri dari tindakan penanggulang (Fumigasi kapal sebanyak 65 kapal dan desinseksi sebanyak 17 kapal). *Outcomenya* terselenggaranya pengawasan tindakan penanggulangan faktor risiko kesehatan di

alat angkut, *benefitnya* terbebas dari penyebaran faktor risiko penyakit penyakit di alat angkut, *impactnya* mencegah penyebaran penyakit melalui alat angkut.

Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.530.000,-(100%).

8. Koordinasi Teknis Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan dan Kekarantinaan Alat Angkut dan Barang

Kegiatan Koordinasi Teknis Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan dan Kekarantinaan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 53.590.000,- yang dialokasikan untuk acara pertemuan di luar kantor. *Output* dari pertemuan ini adalah dokumen laporan kegiatan dan desiminasi informasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Koordinasi Teknis Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan dan Kekarantinaan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025

No.	Tanggal	Lokasi	Nama Pelaksana	Kegiatan
1	21 Juli 2025	Gedung Record Center Percetakan Negara	1. Evi Maria 2. Cukup Sugianto	Dalam Rangka Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun 2026
2.	18 - 19 September 2025	BKK Kelas II Bandung	1. dr. Theresia 2. M. Jamil 3. M. Zahri 4. Fatma Zahara	Dalam Rangka Peningkatan Sistem Surveilans Pengawasan Pelaku Perjalanandan Berbasis RBA (*Risk Based Assesment*) dan kegiatan desiminasi informasi Implementasi Penerbitan Sertifikat Omkaba
3.	30 Sept - 2 Oktober 2025	Wisma Sukajadi Kemenkes Bandung	Evi Maria	Dalam Rangka Updating Petunjuk Perencanaan Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun 2026
4.	8 Oktober 2025	Gedung Record Center Percetakan Negara	1. Agus Sudarman 2. Evi Maria 3. Cukup S.	Dalam Rangka Desk, Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2026 Ditjen P2P
5.	13 - 15 Oktober 2025	Wisma Sukajadi Kemenkes Bandung	1. Agus Sudarman 2. dr. Theresia 3. Evi Maria 4. Cukup S.	Dalam Rangka Finalisasi Penyusunan Alokasi Anggaran Tahun 2026 Satuan Kerja UPT di Lingkungan P2P
6.	24 - 25 Oktober 2025	BKK Kelas II Panjang	1. dr. Theresia 2. dr. Dwie M. 3. M. Zahri 4. Fatma Z.	Dalam Rangka Implemetasi Terkait Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
7.	15 s.d 17 September 2025	BKK Kelas II Pangkal Pinang	1. Agus Sudarman 2. Cukup S. 3. Rhani D.	Dalam rangka peningkatan kompetensi pengawasan Omkaba

O*utcome* kegiatan ini menguatkan jejaring komunikasi dan informasi yang baik antar lintas sektor dan lintas program, *benefitnya* adalah meningkatnya jejaring komunikasi dan koordinasi. *Impactnya* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKK Tanjung Priok berjalan dengan baik.

Realisasi anggaran Koordinasi Teknis Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan dan Kekarantinaan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025 sebesar Rp 53.373.282- (99,60%).

F. PENCAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2025 ini Tim Kerja 2 Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang mendapatkan anggaran dengan pagu awal sebesar Rp 303.335.000,-(Tiga ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Realisasi anggaran kegiatan Tim Kerja 2 Pengawsan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025 sebesar Rp 302.693.502,-(Tiga ratus dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah) atau sudah terserap 99,79% dari pagu anggaran. Sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp 641.498,- (Enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 0,21% dari pagu anggaran.

Tabel 4. 9 Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang Tahun 2025

No.	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN KINERJA KEGIATAN	
			Realisasi	Capaian
1	Pemeriksaan Alat Angkut Sesuai Standar Karantina 2025	41.806	50.492	120,78%
2	COP	3.400	3.886	114,21%
3	PHQC	36.200	43..777	128.75%
4	SSCC	92	109	117,39%
5	Surat Bebas Karantina Kapal (*Restricted*)	15	15	100%

4.1.3 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN LINGKUNGAN

A. Pencapaian Program Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan

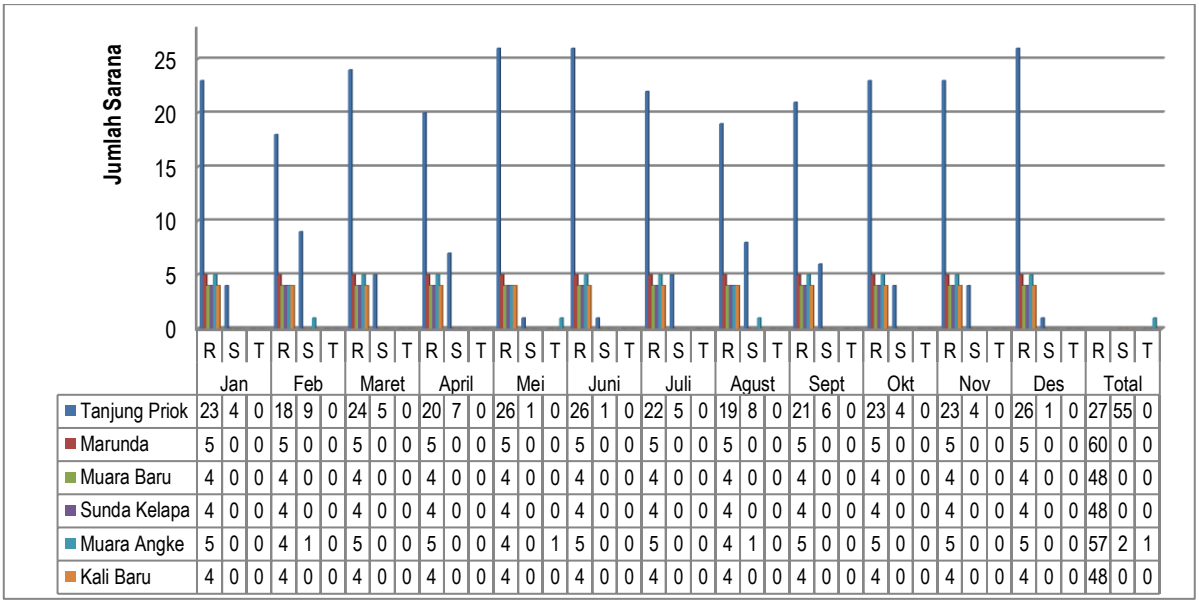
1. Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Minum di Wilayah pelabuhan

Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Minum di Wilayah pelabuhan adalah kegiatan dalam rangka menjalankan salah satu tupoksi Balai Besar

Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yaitu menjamin kualitas air minum di pelabuhan sesuai standart yang dipersyaratkan, sehingga air minum di wilayah pelabuhan Tanjung Priok tidak menjadi faktor risiko penularan berbagai penyakit. Kegiatan pengawasan meliputi verifikasi laporan pengawasan internal, observasi fisik melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), pengambilan dan pengujian kualitas air minum, pengolahan dan analisis data serta laporan, analisis dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitas air minum. International Health Regulation tahun 2005, annex 1B poin d tentang kapasitas inti pelabuhan menyebutkan bahwa pelabuhan harus menjamin lingkungan yang aman termasuk menyediakan fasilitas di pintu masuk Negara, antara lain mencakup air minum. Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang dan atau lingkungan salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan fungsi pengawasan penyediaan air minum secara eksternal.

Kegiatan pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum di pelabuhan, telah mengalokasikan sumberdaya yang diperlukan berupa tenaga serta anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebesar Rp 99.372.000,- yang terdiri dari pembelian peralatan pengawasan, bahan penunjang pemeriksaan sampel air minum, pemeriksaan sampel air minum lengkap ke Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) serta transport petugas pengiriman sampel air minum. Kegiatan pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum dilakukan secara rutin setiap bulan dan pada situasi khusus (lebaran, natal dan tahun baru) secara terpadu. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah pengawasan penyediaan sarana kualitas air minum, pengambilan sampel dan pengujian sampel air secara fisik, kimia dan bakteriologis baik di laboratorium Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika), serta instalasi laboratorium BBKK Tanjung Priok. Hasil yang dicapai adalah tersedianya suplai air minum yang memenuhi syarat, bebas dari kontaminasi, aman dan layak untuk dikonsumsi oleh seluruh pengguna jasa dan masyarakat dipelabuhan, dengan gambaran hasil kegiatan sebagai berikut:

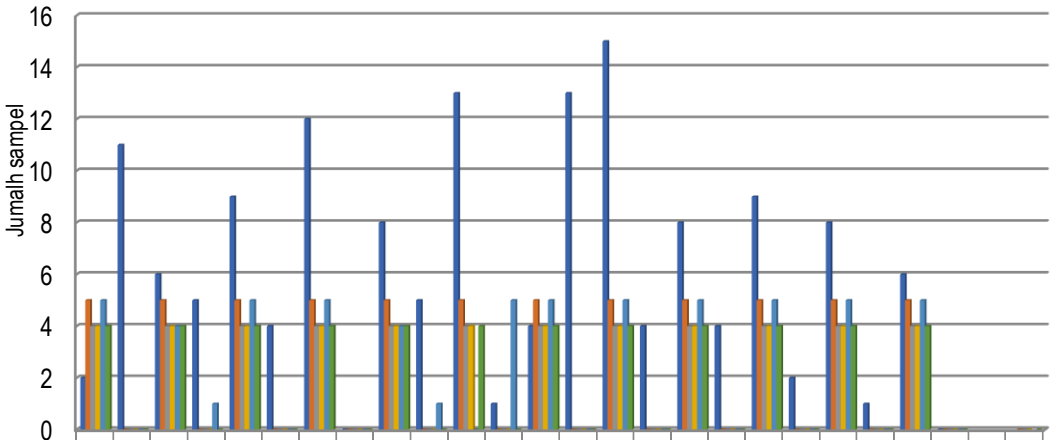
Grafik 4. 18 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Sarana Penyediaan Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan			Feb			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agust			Sept			Okt			Nov			Des			Total		
	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T
Tanjung Priok	23	4	0	18	9	0	24	5	0	20	7	0	26	1	0	26	1	0	22	5	0	19	8	0	21	6	0	23	4	0	23	4	0	26	1	0	27	55	0
Marunda	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	60	0	0
Muara Baru	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	48	0	0
Sunda Kelapa	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	48	0	0
Muara Angke	5	0	0	4	1	0	5	0	0	5	0	0	4	0	1	5	0	0	5	0	0	4	1	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	57	2	1
Kali Baru	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	48	0	0

Dari grafik 4.18 dapat diinformasikan bahwa kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum di wilayah BBKK Tanjung Priok dilakukan setiap bulan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Total inspeksi kesehatan lingkungan yang diawasi tahun 2025 adalah sebesar 590 sarana dengan hasil resiko rendah dan sedang sejumlah 589 atau sebesar 99,8%. Terhadap hasil inspeksi yang tidak memenuhi syarat (risiko tinggi) dilakukan tindak lanjut berupa rekomendasi dan saran perbaikan terhadap sanitasi lingkungan dan kondisi sarana air minum yang ada. Adapun dasar kriteria skor inspeksi kesehatan lingkungan berdasarkan Panduan Surveilans Kualitas Air Minum, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kemenkes 2024. Selanjutnya dalam rangka pengawasan kualitas air minum di pelabuhan juga dilakukan pemeriksaan atau pengujian kualitas air secara fisik, kimia dan bakteriologis. Sampel air diperiksa dilaboratorium kesehatan lingkungan BBKK Tanjung Priok dan di laboratorium Balai Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan (BB Binomika) sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan parameter fisik, kimia dan bakteriologis (pemeriksaan E. Coli).

Grafik 4. 19 Distribusi Hasil Pemeriksaan Pengujian Kualitas Fisik Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025

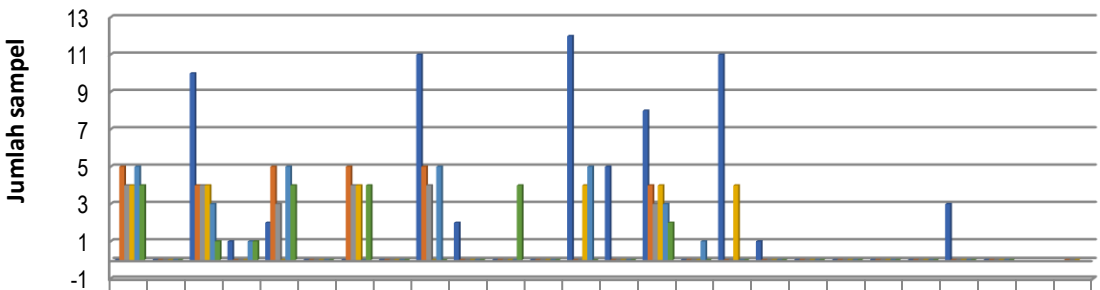


	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Aguts		Sept		Okt		Nov		Des		TOTAL	
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
Tanjung Priok	2	11	6	5	9	4	12	0	8	5	13	1	4	13	15	4	8	4	9	2	8	1	6	0	100	50
Marunda	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	60	0
Muara Baru	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	48	0
Sunda Kelapa	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	48	0
Muara Angke	5	0	4	1	5	0	5	0	4	1	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	53	7
Kali Baru	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	48	0

Dari grafik 4.19 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa secara fisik adalah 414 sampel dengan jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 357 sampel (86,2%) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 57 sampel (13,8 %). Kontribusi tertinggi yang tidak memenuhi persyaratan kualitas fisik air adalah kantor induk Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebesar 12% dan wilker Muara Angke 1,8% sedangkan 4 wilker lainnya yaitu Marunda, Muara Baru, Sunda Kelapa dan Kali Baru kualitas fisik air minum adalah memenuhi syarat 100%. Parameter fisik air minum yang diperiksa adalah bau, kekeruhan, warna, Total Disolved Solid (TDS) dan suhu dengan persyaratan baku mutu sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan lingkungan.

Terkait dengan kualitas fisik air minum yang tidak memenuhi persyaratan telah diberikan rekomendasi kepada penyelenggara/penyedia air minum di pelabuhan untuk dilakukan pengurasan/pembersihan reservoir secara berkala, menutup lubang pengisi air /*manhole* dan hidran secara rapat, dan menjaga kebersihan lingkungan pada semua sarana air minum di pelabuhan.

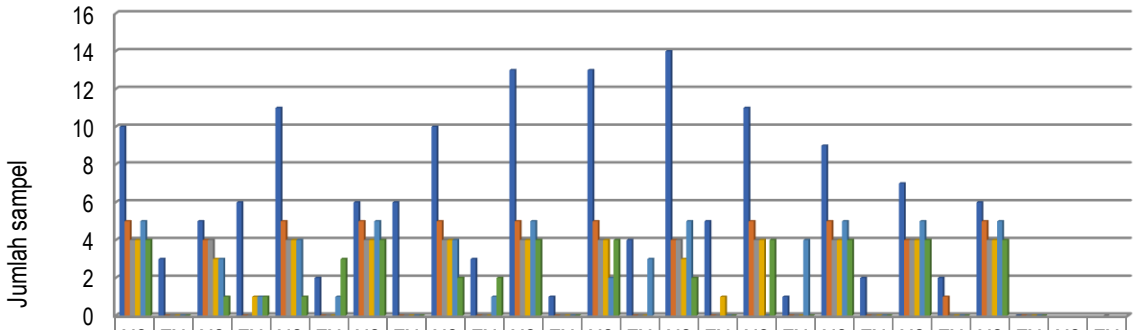
Grafik 4. 20 Distribusi Hasil Pemeriksaan Kimia Air Minum Di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Aguts		Sept		Okt		Nov		Des		TOTAL	
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
Tanjung Priok	0	0	10	1	2	0	0	0	11	2	0	0	12	5	8	0	11	1	0	0	0	0	3	0	57	9
Marunda	5	0	4	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
Muara Baru	4	0	4	0	3	0	4	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0
Sunda Kelapa	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Muara Angke	5	0	3	1	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
Kali Baru	4	0	1	1	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	1

Dari grafik 4.20 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa kualitas kimia di Wilayah BBKK Tanjung Priok adalah 188 sampel dengan jumlah sampel memenuhi syarat sebanyak 176 sampel (93,6%) yang tidak memenuhi syarat 12 sampel (6,4 %). Kontribusi tertinggi untuk kualitas kimia air yang tidak memenuhi syarat adalah di induk sebanyak 9 sampel, kemudian wilker Muara Angke sebanyak 2 sampel, wilker Kali Baru sebanyak 1 sampel sedangkan 3 Wilker lainnya memenuhi syarat. Adapun parameter kimia air minum yang diperiksa adalah Besi (Fe), Cromium, Nitrat, Nitrit, pH, Alumunium (Al), Mangan (Mn), Kadmium (Cd), Arsen (As), Fluoride, Timbal (Pb) dan Sisa Khlor. Terkait dengan hasil pemeriksaan sampel dengan kualitas kimia air minum yang tidak memenuhi syarat maka kepada penyelenggara/penyedia sarana telah diberikan rekomendasi untuk melakukan pemeliharaan perpipaan secara berkala, penggantian selang penyalur mobil tangki yang sudah berkarat, menjaga kebersihan sekitar reservoir dan hidran, membatasi akses orang yang tidak berkepentingan dengan membuat batas pagar sehingga sarana air minum (reservoir) terhindar dari masuknya binatang dan orang yang tidak berkepentingan.

Grafik 4. 21 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Aguts		Sept		Okt		Nov		Des		TOTAL	
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
Tanjung Priok	10	3	5	6	11	2	6	6	10	3	13	1	13	4	14	5	11	1	9	2	7	2	6	0	115	35
Marunda	5	0	4	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	4	0	5	0	5	0	4	1	5	0	57	1
Muara Baru	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	48	0
Sunda Kelapa	4	0	3	1	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	3	1	4	0	4	0	4	0	4	0	46	2
Muara Angke	5	0	3	1	4	1	5	0	4	1	5	0	2	3	5	0	0	4	5	0	5	0	5	0	48	10
Kali Baru	4	0	1	1	1	3	4	0	2	2	4	0	4		2	0	4	0	4	0	4	0	4	0	38	6

Dari grafik 4.21 dapat diinformasikan bahwa total sampel air minum yang diperiksa secara Bakteriologis di Wilayah BBKK Tanjung Priok adalah 406 sampel, dengan jumlah yang memenuhi syarat sejumlah 352 sampel (86,7%) dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 54 sampel (13,3%). Kontribusi tertinggi sampel air yang tidak memenuhi persyaratan kualitas bakteriologis air adalah di kantor induk Pelabuhan Tanjung Priok yaitu sebesar 8,6% kemudian Wilker Muara Angke 2,4%, Wilker Kali Baru 1,5%, Wilker Sunda Kelapa 0,5, Wilker Marunda 0,3% dan Wilker Muara Baru memenuhi syarat 100%.

Parameter Bakteriologis air minum yang diperiksa adalah *E. Coli* dan *Total Coliform* dengan persyaratan baku mutu sesuai dengan Permenkes No 2 Tahun 2023. Terkait dengan hasil pemeriksaan dan kualitas bakteriologis air minum yang diperoleh maka kepada penyelenggara/penyedia sarana telah diberikan rekomendasi untuk melakukan penambahan kaporit berdasarkan pemeriksaan sisa khlor yang dilakukan rutin dalam pengawasan internal untuk mencegah khlorida yang melebihi kadar yang dipersyaratkan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar sarana air serta membatasi akses orang yang tidak berkepentingan dengan membuat batas pagar sehingga sarana air minum (reservoir) terhindar dari masuknya binatang dan orang yang tidak berkepentingan. Beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan kualitas bakteriologis air tidak memenuhi syarat adalah adanya beberapa lokasi sarana air

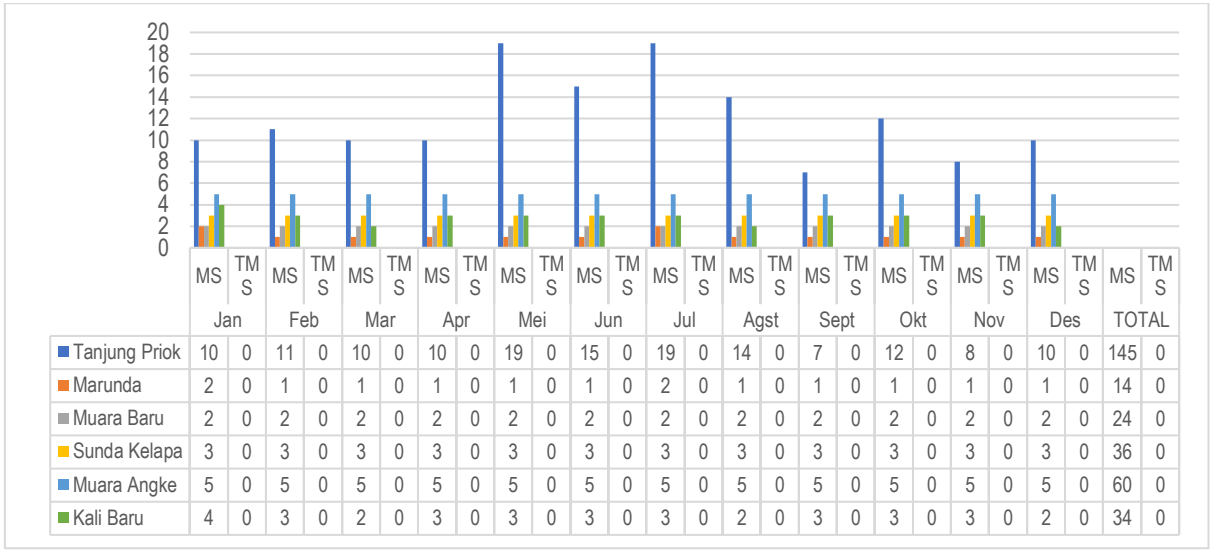
minum yang terdapat tumpukan sampah, serta adanya banjir rob karena lokasi berdekatan dengan kolam pelabuhan. Adapun realisasi serapan anggaran kegiatan pengawasan Penyediaan air minum oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025 sebesar Rp 99.372.000 (100%).

2. Makanan/Minuman, Laik Sehat Jasaboga dan Pengawasan *Supplier* Bahan Makanan Kapal di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

   Kegiatan pengamanan makanan dan minuman di pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara rutin setiap bulan. Sesuai dengan *International Health Regulation* 2005, annex 1B poin d tentang kapasitas inti pelabuhan yang menjamin pengamanan terhadap makanan dan tempat pengelolaannya. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan menyatakan bahwa Tempat Pengelolaan Pangan Olahan Siap Saji yang selanjutnya disebut TPP adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut Pangan Olahan Siap Saji baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Penyelenggaraan pengawasan TPP dilakukan melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali dan pada saat situasi khusus lebaran, Natal dan Tahun Baru sebagai bentuk pengawasan dan pengamanan makanan minuman di SITUS NATARU. Adapun tempat pengelolaan pangan yang diawasi di wilayah pelabuhan Tanjung Priok antara lain adalah rumah makan, sentra kantin dan pangan jajanan, jasa boga/katering dan kegiatan pengawasan supplier bahan makanan ke kapal.

   Kegiatan pengawasan pengamanan makanan dan minuman di pelabuhan telah mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA BBKK Tanjung Priok sebesar Rp 16.987.000,- dengan alokasi penggunaan dana sebesar Rp 9.847.000,- untuk biaya pengadaan alat dan bahan kesehatan dalam rangka pengamanan makanan/minuman di Pelabuhan, sedangkan biaya transport petugas pengiriman sampel ke laboratorium sebesar Rp 5.100.000.- dan biaya transport petugas inspeksi jasaboga sebesar Rp 2.040.000,-.

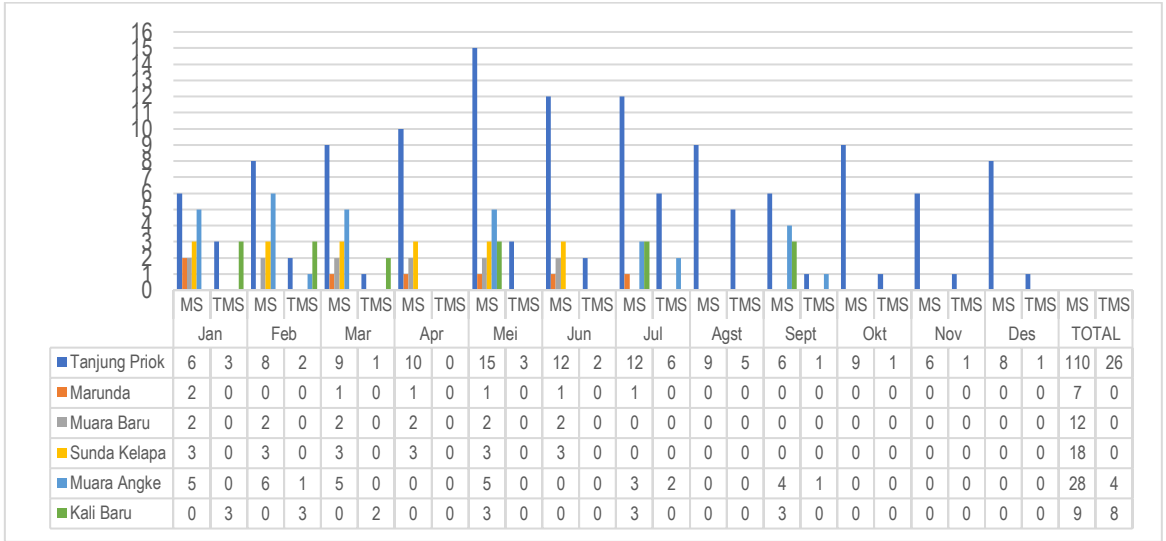
Grafik 4. 22 Distribusi Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nov		Des		TOTAL	
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
Tanjung Priok	10	0	11	0	10	0	10	0	19	0	15	0	19	0	14	0	7	0	12	0	8	0	10	0	145	0
Marunda	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	14	0
Muara Baru	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	24	0
Sunda Kelapa	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	36	0
Muara Angke	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	60	0
Kali Baru	4	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0	3	0	2	0	34	0

Dari grafik 4.22 dapat diinformasikan bahwa jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan di wilayah BBKK Tanjung Priok tahun 2025 adalah sebanyak 313 dengan hasil inspeksi memenuhi syarat sebesar 313 TPP (100%). Namun demikian dari beberapa hasil pengamatan masih ditemukan kondisi TPP yang perlu perhatian sehingga saran dan rekomendasi tetap diberikan seperti menjaga sanitasi lingkungan, penyediaan tempat sampah yang tertutup serta menyediakan sarana cuci tangan, dan pengendalian vektor secara mandiri untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat pelabuhan.

Grafik 4. 23 Distribusi Hasil Pemeriksaan Bakteriologis Sampel Makanan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Agst		Sept		Okt		Nov		Des		TOTAL	
	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS
Tanjung Priok	6	3	8	2	9	1	10	0	15	3	12	2	12	6	9	5	6	1	9	1	6	1	8	1	110	26
Marunda	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Muara Baru	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Sunda Kelapa	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
Muara Angke	5	0	6	1	5	0	0	0	5	0	0	0	3	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	28	4
Kali Baru	0	3	0	3	0	2	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	9	8

Dari grafik 4.23 dapat diinformasikan bahwa pemeriksaan sampel dan pengujian Bakteriologis makanan tahun 2025 di wilayah BBKK Tanjung Priok adalah sebanyak 222 sampel dimana 184 sampel yang memenuhi syarat (82,88%) dan bila dibandingkan dengan hasil pengujian tahun 2024 jumlah sampel yang memenuhi syarat pengujian bakteriologis makanan adalah sebesar 88% sehingga terdapat penurunan sebesar 5,12%. Sedangkan untuk hasil pengujian sampel usap alat makan hanya dilakukan di wilayah kantor induk pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 137 sampel dengan hasil ditemukannya total kuman pada 60 sampel (43,79%) yang tidak memenuhi persyaratan total kuman alat makan.

Pada Tahun 2025 Kantor Induk Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan pengawasan terhadap jasa boga dengan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan sebanyak 5 jasa boga dengan hasil memenuhi persyaratan 100%. Demikian juga pengawasan *suplier* bahan makanan ke kapal telah dilakukan sebanyak 435 kapal dengan hasil 100% laik sehat suplai bahan makanan.

Terkait dengan hasil pemeriksaan uji kualitas mikrobioogis maka kepada pihak pengelola TPP diberikan rekomendasi berupa saran dan edukasi untuk selalu menjaga kebersihan pangan serta peralatan yang digunakan, dan tetap memperhatikan *personal food handler* khususnya dalam proses pengolahan pangan, agar makanan yang dijual atau disajikan terjamin dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan pengunjung dipelabuhan, selain itu juga dilakukan upaya pemantauan dan pembinaan kepada pengelola kantin dan pangan jajanan untuk mencegah dan meminimalisir kualitas pangan yang tidak sehat agar masyarakat pelabuhan terhindar dari bahaya dan gangguan kesehatan. Adapun realisasi serapan anggaran kegiatan pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025 sebesar Rp 16.987.000,- (100%).

3. Pengelolaan Limbah Medis di BBKK Tanjung Priok

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Tanjung Priok berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pengelolaan limbah medis yang aman dan efektif. Kegiatan pengelolaan limbah medis ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, BBKK Tanjung Priok telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.500.000,- untuk pembelian plastik limbah dan Rp 7.395.000,- dalam DIPA untuk biaya pemusnahan limbah medis infeksius serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jenis

limbah medis yang dikelola meliputi limbah padat, tajam, cair yang bersifat infeksius, serta limbah B3 non medis.

BBKK Tanjung Priok telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang telah memiliki perizinan resmi dalam pengolahan dan pemusnahan limbah. Pengangkutan limbah dilakukan secara berkala, yakni sebanyak 4 kali pada tahun 2025, yaitu bulan Februari, Juli, dan 2 kali di bulan Desember. Selama periode tersebut, total limbah medis yang dihasilkan dan dikelola mencapai 378,36 kg. Proses pengelolaan limbah medis ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi serapan anggaran kegiatan pengelolaan limbah medis di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.500.000,- (100%) untuk pembelian plastik limbah dan sebesar Rp 7.395.000 (100%) untuk pemusnahan limbah medis.

4. Pengawasan Sanitasi Lingkungan Sarana Bangunan dan Tempat Fasilitas Umum (TFU) di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

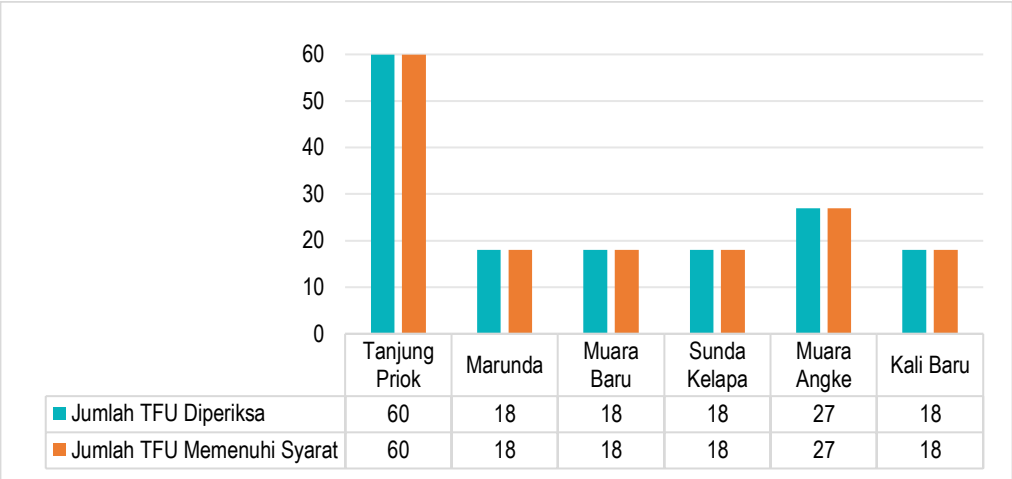
Dalam Permenkes RI No.10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan pada pasal 6 yaitu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan atau lingkungan. Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kesehatan lingkungan gedung/bangunan perkantoran/perusahaan dan Tempat Fasilitas Umum yang berada di wilayah pelabuhan dan sekitarnya, dengan tujuan agar faktor risiko kesehatan yang ditemukan dapat dikendalikan. Adapun jenis sarana bangunan dan tempat fasilitas umum di wilayah BBKK Tanjung Priok antara lain; terminal pelabuhan, pasar, masjid, pergudangan, perkantoran/perusahaan yang melayani umum. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia bisa melaksanakan kegiatannya dengan optimal, sehat, aman dan selamat sehingga lingkungan kerja harus didesain sedemikian rupa agar menjadi kondusif, aman dan nyaman bagi pekerja.

Kegiatan Pengawasan kesehatan lingkungan sarana gedung/bangunan dan tempat fasilitas umum di BBKK Tanjung Priok mengalokasikan dana dalam DIPA KKP BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebesar Rp 8.177.000, untuk belanja barang operasional dan biaya transport petugas dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap sanitasi tempat fasilitas umum dan gedung bangunan perkantoran di

Pelabuhan Tanjung Priok. *Output* dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan Sanitasi Tempat Fasilitas Umum di wilayah BBKK Tanjung Priok yaitu sejumlah 82 sarana antara lain Kantor Induk = 20, Wilker Marunda = 6, Muara Baru = 6, Sunda Kelapa = 6, Muara Angke = 9 dan Kali Baru sebanyak 6.

Pengawasan dilakukan 3 kali dalam setahun melalui kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan, pengukuran parameter kesehatan lingkungan, pemberian rekomendasi kepada pihak pengelola bangunan. Adapun hasil kegiatan pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4. 24 Distribusi Sarana Tempat Fasilitas Umum Yang Memenuhi Persyaratan Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Tanjung Priok	Marunda	Muara Baru	Sunda Kelapa	Muara Angke	Kali Baru
Jumlah TFU Diperiksa	60	18	18	18	27	18
Jumlah TFU Memenuhi Syarat	60	18	18	18	27	18

Berdasarkan data pada grafik 4.24 dapat diinformasikan bahwa kegiatan pengawasan kesehatan lingkungan gedung bangunan perkantoran dan tempat fasilitas umum di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk Tempat-Tempat Umum (TTU) ditetapkan sebanyak 159 pemeriksaan sarana. Berdasarkan pada data hasil kegiatan, sasaran tersebut berhasil dipenuhi secara menyeluruh, yakni sebanyak 159 pemeriksaan (100%). Seluruh sarana yang diperiksa dinyatakan memenuhi persyaratan sanitasi berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan, sehingga pencapaian target IKK TTU tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Meskipun pencapaian target telah terpenuhi, hasil observasi lapangan menunjukkan masih adanya sejumlah komponen penilaian yang perlu dioptimalkan lebih lanjut. Sebagai langkah tindak lanjut, BBKK Tanjung Priok telah memberikan saran serta rekomendasi teknis kepada seluruh pemilik dan pengelola sarana agar segera melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Upaya ini dilakukan demi menjamin kualitas lingkungan gedung bangunan perkantoran

dan tempat fasilitas umum tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, terutama dalam hal standar sanitasi kebersihan sarana prasarana serta fasilitas pendukung lainnya. Realisasi anggaran untuk kegiatan Pengawasan Kesehatan Lingkungan Gedung Bangunan Perkantoran dan Tempat Fasilitas Umum di BBKK Tanjung Priok terserap sebesar Rp8.177.000 atau mencapai 100%. Capaian serapan ini sebanding dengan realisasi target kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

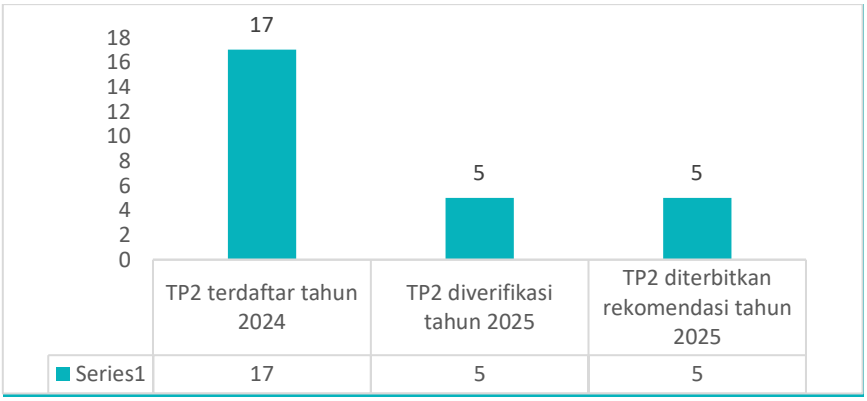
5. Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) di Wilayah BBKK Tanjung Priok

   Pengawasan tempat pengelolaan pestisida (TP2) di Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan oleh BBKK Tanjung Priok sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1350 tahun 2001 tentang pestisida dan Permenkes No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Disebutkan bahwa penggunaan pestisida untuk pemberantasan vektor penyakit dan hama semakin meningkat dan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan apabila pengelolaan pestisida tidak memenuhi syarat kesehatan.

   Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) di pelabuhan ditujukan agar dapat melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan akibat dampak buruk zat kimia tersebut. Kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan diarahkan pada pengawasan terhadap Badan Usaha Swasta (BUS) yang melakukan kegiatan fumigasi kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka pengajuan permohonan perpanjangan sertifikat izin penyelenggaraan fumigasi. Untuk kegiatan pengawasan TP2 Pestisida tidak dialokasikan pada anggaran DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025.

   Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengawasan dan pemberian rekomendasi permohonan dan perpanjangan izin pada BUS dalam rangka penyelenggaraan tindakan hapus tikus dan serangga pada kapal di pelabuhan. Adapun hasil kegiatan pengawasan dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 4. 25 Distribusi Hasil Pengawasan Tempat Pengelolaan Pestisida (TP2) Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



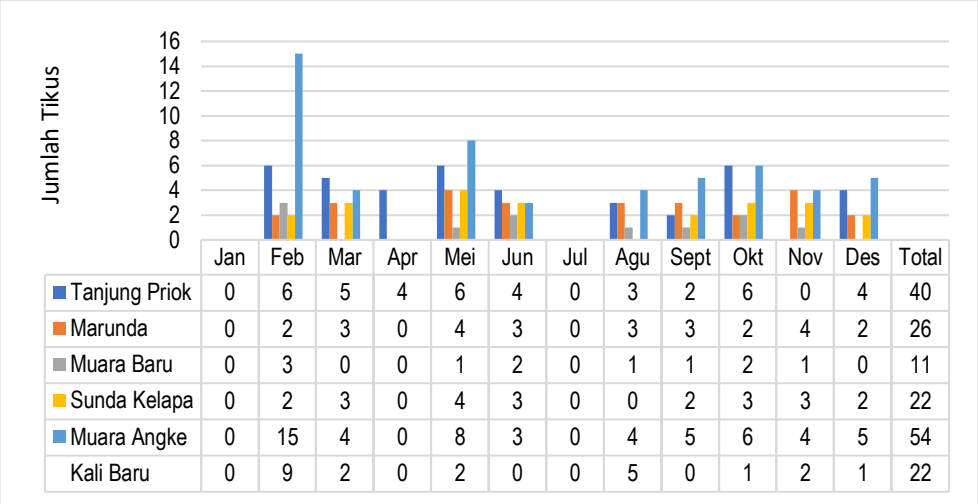
Dari grafik 4.25 dapat diinformasikan bahwa dari 17 lokasi tempat pengelolaan pestisida (TP2) pada BUS yang terdaftar di Wilayah BBKK Tanjung Priok, ada 5 lokasi yaitu PT Sarana Gama Sejahtera, PT Rentokil Indonesia, PT. Inari Jaya Nusantara, Puskopal Kolinlamil Jakarta, PT. Palapa Bumi Serasi yang mengajukan permohonan izin perpanjangan usaha dengan hasil pemeriksaan inspeksi keseatan lingkungan sanitasi memenuhi syarat 100%.

6. Layanan Pengendalian Vektor Pes di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok

Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok memiliki fungsi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah pelabuhan. Salah satunya adalah upaya pengendalian vektor Pes. Penyakit Pes adalah penyakit yang ditularkan oleh tikus dan pinjal yang disebabkan oleh agen infeksi Y*ersina pestis.* Penyakit ini ditularkan kepada manusia langsung melalui gigitan pinjal yang telah terinfeksi salah satu jenis pinjal adalah *Xenopsylla cheopis*.

Dalam rangka layanan pengendalian vektor Pes di Pelabuhan, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok, mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025 sebesar Rp 63.288.000,- untuk pembelian umpan tikus dan transport kader pada kegiatan pemasangan perangkap di Pelabuhan Tanjung Priok serta lima wilayah kerja lainnya. Dan anggaran sebesar Rp 15.012,000,- untuk pembelian perangkap tikus. O*utput* dari kegiatan ini adalah terkendalinya tingkat kepadatan (*density*) tikus dan pinjal melalui pemasangan perangkap dan identifikasi tikus dan pinjal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan wilayah kerja lainnya, dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

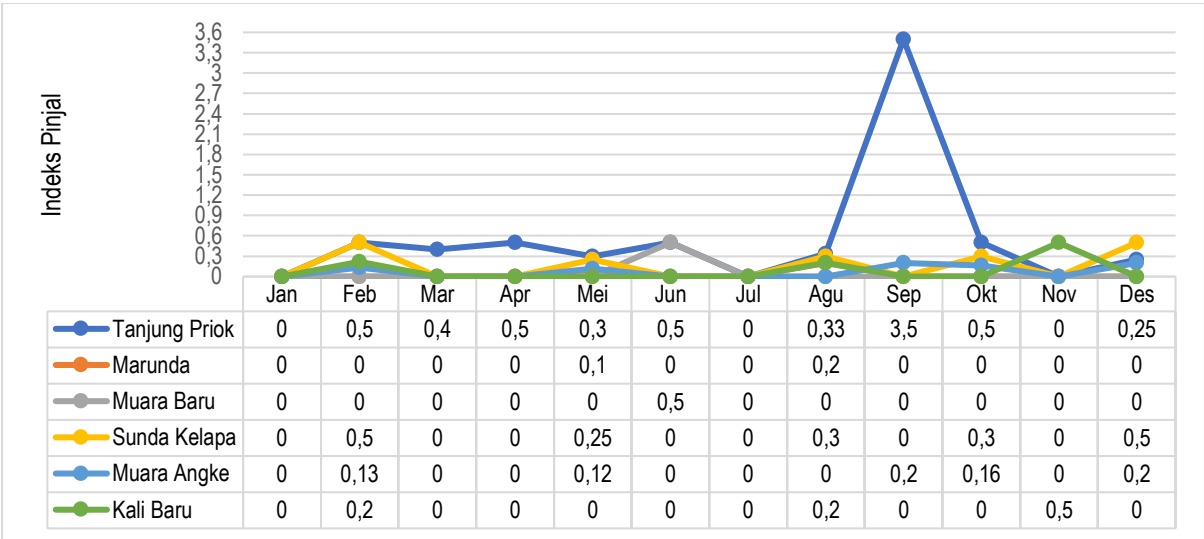
Grafik 4. 26 Distribusi Jumlah Tikus Tertangkap Pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Tanjung Priok	0	6	5	4	6	4	0	3	2	6	0	4	40
Marunda	0	2	3	0	4	3	0	3	3	2	4	2	26
Muara Baru	0	3	0	0	1	2	0	1	1	2	1	0	11
Sunda Kelapa	0	2	3	0	4	3	0	0	2	3	3	2	22
Muara Angke	0	15	4	0	8	3	0	4	5	6	4	5	54
Kali Baru	0	9	2	0	2	0	0	5	0	1	2	1	22

Dari grafik 4.26 berdasarkan hasil survei sepanjang tahun 2025, ditemukan variasi jumlah populasi tikus yang cukup signifikan di enam lokasi pengamatan. Muara Angke menjadi wilayah dengan tingkat tertinggi karena mencatatkan total tangkapan sebanyak 54 ekor tikus, disusul oleh Tanjung Priok dengan 40 ekor tikus. Sementara itu, wilayah Marunda, Sunda Kelapa, dan Kali Baru berada pada kategori sedang dengan jumlah tangkapan di kisaran 22 hingga 26 ekor tikus. Lonjakan populasi terbesar terjadi pada bulan Februari, terutama di Muara Angke yang mencapai angka tertinggi dalam satu bulan sebayak 15 ekor tikus.

Grafik 4. 27 Distribusi Indeks Pinjal Pada Kegiatan Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES Di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	0	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0	0,33	3,5	0,5	0	0,25
Marunda	0	0	0	0	0,1	0	0	0,2	0	0	0	0
Muara Baru	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0
Sunda Kelapa	0	0,5	0	0	0,25	0	0	0,3	0	0,3	0	0,5
Muara Angke	0	0,13	0	0	0,12	0	0	0	0,2	0,16	0	0,2
Kali Baru	0	0,2	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0,5	0

Dari grafik 4.27 berdasarkan hasil survei tahun 2025, analisis indeks pinjal secara umum, sebagian besar lokasi menunjukkan angka indeks yang cukup rendah dan masih berada di bawah ambang batas aman yaitu antara 0 – 0,5 (<1), yang berarti rata-rata jumlah pinjal yang ditemukan pada setiap ekor tikus tidak terlalu banyak. Lokasi seperti Muara Angke, Marunda, dan Muara Baru memiliki indeks yang rendah. Pada wilayah Tanjung Priok yang mencatatkan lonjakan indeks pinjal sangat signifikan pada bulan September dengan angka Indeks Pinjal sebesar 3,5. pada periode tersebut. Meskipun di bulan-bulan lainnya kondisi cenderung melandai, temuan di Tanjung Priok ini menunjukkan adanya pola musiman tertentu yang perlu diantisipasi melalui langkah pengendalian vektor yang tepat.

Realisasi serapan anggaran kegiatan pengendalian tikus dan pinjal di pelabuhan dalam rangka layanan pengendalian vektor pes di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 adalah sebesar Rp 63.288.000,- (100%) dan serapan untuk pembelian perangkap tikus sebesar Rp 15.012.000,- (100%).

7. Layanan Pengendalian Vektor Diare di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

Tempat fasilitas umum di wilayah pelabuhan memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Karena tempat umum merupakan tempat kegiatan orang banyak sehingga perlu memperhatikan sanitasi lingkungannya. Tempat umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan salah satunya yaitu tempat pengelolaan pangan.

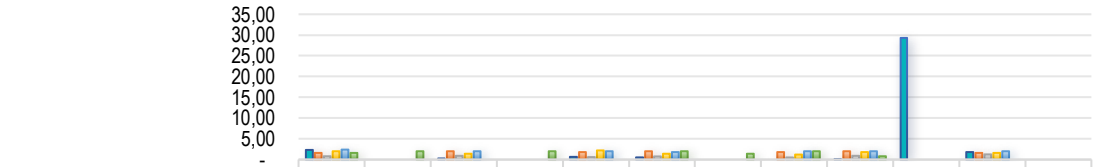
Tempat Fasilitas Umum seperti tempat Pengelolaan Pangan, kantin, Tempat Penampungan Sementara sampah juga menjadi sasaran dalam pengendalian lalat dan kecoak di pelabuhan.

Lalat dan kecoak merupakan salah satu vektor penyakit pada sistem pencernaan yang mempunyai tempat perindukan di tempat-tempat yang kotor dan keberadaan lalat dan kecoak di suatu tempat dapat menunjukkan bahwa tempat tersebut tidak bersih / tidak higienis. Lalat dan kecoak mempunyai peranan yang cukup penting dalam penularan penyakit. Kuman penyebab diare seperti salmonella, entamoeba histolitica dapat ditularkan oleh vektor mekanik yaitu lalat dan kecoak. Selain itu lalat dan kecoak juga merupakan vektor bagi mikro organisme patogen penyebab typhoid/thypus, disentri, cholera dan virus hepatitis A.

Untuk itu diperlukan upaya menjaga kualitas makanan dan minuman dengan cara memelihara sanitasi kantin untuk mencegah datangnya lalat dan kecoak. Berdasarkan *International Health Regulations* (IHR) Tahun 2005 dan Permenkes No.44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, pelabuhan harus bebas dari keberadaan serangga/vektor penular penyakit termasuk vektor lalat dan kecoak. Pengawasan sanitasi lingkungan di wilayah pelabuhan bertujuan membuat wilayah pelabuhan tidak menjadi sumber perkembangbiakan vektor lalat dan kecoak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan sanitasi tempat pengolahan pangan (TPP).

Kegiatan Layanan Pengendalian Vektor Diare di KKP Kelas I Tanjung Priok telah mengalokasikan anggaran yang tuangkan ke dalam DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025 sebesar Rp 39.053.000,- terdiri atas kegiatan kegiatan survey vektor diare, pengendalian vektor diare, dan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian berupa peralatan dan bahan pengendalian lalat dan kecoak. Keluaran (*output)* dari kegiatan pengendalian vektor diare meliputi data hasil survei kepadatan lalat dan kecoak yang dilaksanakan di lokasi potensial risiko keberadaan vektor lalat dan kecoak. Terkendalinya tingkat kepadatan (*density*) lalat dan kecoak melalui pengukuran kepadatan lalat menggunakan *flygrill* dan pemasangan perangkap kecoak pakai habis di wilayah pelabuhan Tanjung Priok. Jika hasil survei didapatkan hasil kepadatan tinggi langsung dilakukan kegiatan pengendalian menggunakan *spraying* (penyemprotan) menggunakan bahan kimia insektisida. Adapun hasil kegiatan pengendalian lalat dan kecoak dapat dilihat pada grafik berikut :

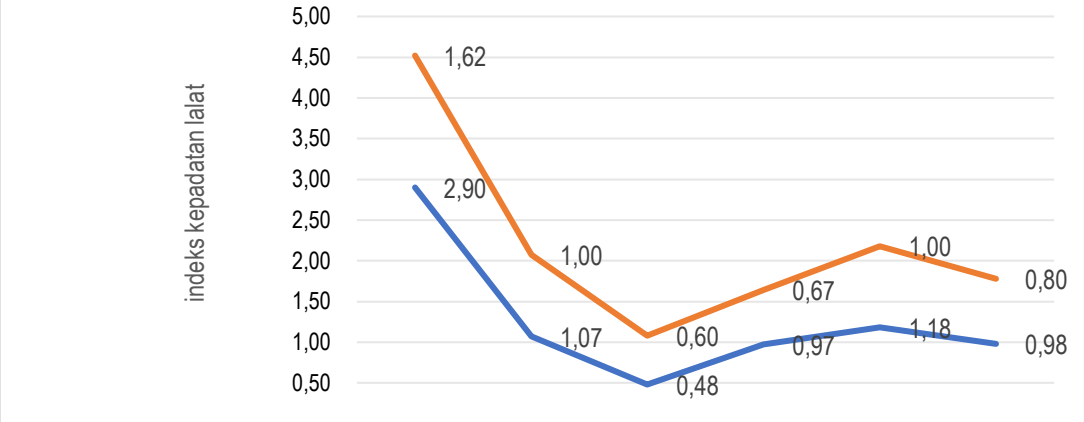
Grafik 4. 28 Distribusi Indeks Populasi Lalat berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Lalat di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Induk	2,30		0,20		0,60	0,50		-	0,10	29,30	1,80	
Pelabuhan Laut Marunda	1,60		2,00		1,80	2,00		1,80	2,00		1,60	
Pelabuhan Samudera Muara Baru	0,80		0,90		0,60	0,75		0,50	0,90		1,25	
Pelabuhan Laut Sunda Kelapa	2,00		1,40		2,20	1,40		1,20	1,80		1,60	
Pelabuhan Laut Muara Angke	2,40		2,00		2,00	1,80		2,00	2,00		2,00	
Pelabuhan Kalibaru	1,60	2,00		2,00		2,00	1,40	2,00	0,80			

Berdasarkan grafik 4.28 dapat diinformasikan bahwa indeks populasi lalat di wilayah kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok bervariasi sesuai hasil pengukuran kepadatan lalat yang dilakukan, antara lain kepadatan lalat tertinggi terdapat di wilayah kerja Induk dengan indeks kepadatan sebesar 29.3 yaitu pada bulan Oktober. Berdasarkan hasil survei, analisa sementara penyebab tingginya kepadatan lalat adalah adanya penumpukan sampah organik pada TPS yang disediakan di pelabuhan, ketidaktepatan waktu pengangkutan sampah dari jadwal yang telah ditentukan serta perilaku masyarakat di pelabuhan baik pengunjung/penumpang, dan para pemilik kantin/warung yang kadang-kadang tidak menyediakan tempat sampah yang memadai. Terkait dengan kepadatan populasi lalat yang masih tinggi, rekomendasi telah disampaikan kepada pihak pengelola pelabuhan, agar sampah dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan mengatur jadwal pengangkutan yang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama, dalam rangka pengendalian kepadatan lalat yang tinggi, serta melakukan *spraying* menggunakan bahan kimia insektisida sebagai alternatif terakhir untuk menekan populasi lalat yang tinggi.

Grafik 4. 29 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Lalat Pasca Tindakan Pengendalian di Wilayah Kerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

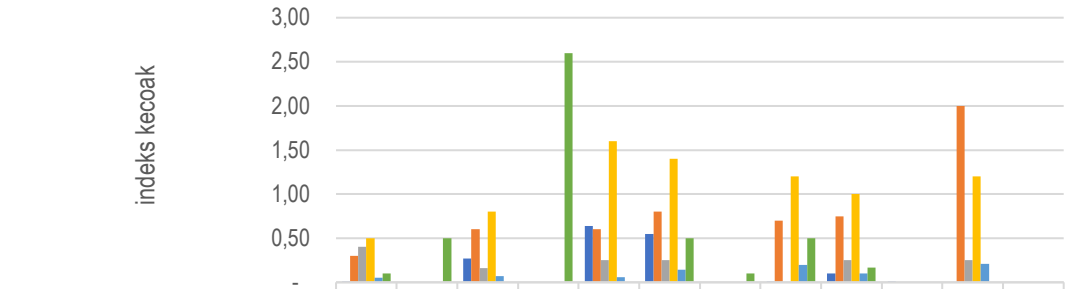


	induk	pelabuhan laut marunda	pelabuhan samudera muara baru	pelabuhan laut sunda kelapa	pelabuhan laut muara angke	pelabuhan kalibaru
pasca pengendalian	1,62	1,00	0,60	0,67	1,00	0,80
rata-rata pra pengendalian	2,90	1,07	0,48	0,97	1,18	0,98

Berdasarkan grafik 4.29, dapat diinformasikan bahwa angka kepadatan lalat rata-rata di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok berdasarkan hasil pengukuran telah melebihi standar baku mutu yang dipersyaratkan sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian untuk menurunkan angka kepadatan lalat tersebut. Setelah dilakukan

pengendalian lalat maka tingkat kepadatan lalat pasca pengendalian kurang dari 2 (< 2) dengan tingkat kepadatan lalat tertinggi yaitu 1.62 di Wilayah Induk Peabuhan Tanjung Priok.

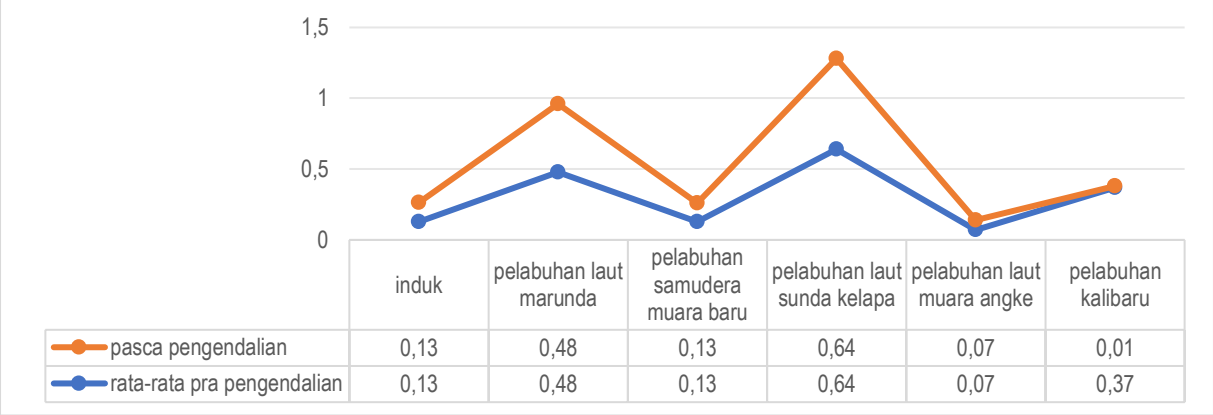
Grafik 4. 30 Distribusi Indeks Populasi Kecoak Berdasarkan Hasil Survei Kepadatan Kecoak di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Dec
Induk	0,01		0,27		0,64	0,55		0,01	0,10	0,01		
Pelabuhan Laut Marunda	0,30		0,60		0,60	0,80		0,70	0,75		2,00	
Pelabuhan Samudera Muara Baru	0,40		0,16		0,25	0,25		-	0,25		0,25	
Pelabuhan Laut Sunda Kelapa	0,50		0,80		1,60	1,40		1,20	1,00		1,20	
Pelabuhan Laut Muara Angke	0,05		0,07		0,06	0,14		0,20	0,10		0,21	
Pelabuhan Kalibaru	0,10	0,50		2,60		0,50	0,10	0,50	0,17			

Berdasarkan grafik 4.30 dapat diiformasikan indeks populasi kecoak tertinggi ada di pelabuhan laut Marunda pada bulan November 2025. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sanitasi lingkungan di pelabuhan oleh penumpukan sampah organik hasil sisa-sisa makanan yang sangat menguntungkan bagi perkembangbiakan kecoak, serta masa siklus perkembangbiakan kecoak yang lebih singkat mendukung dan mempercepat proses pertambahan kepadatan populasi kecoak. Selain kurangnya sanitasi lingkungan di pelabuhan oleh penumpukan sampah organik hasil sisa-sisa makanan yang sangat menguntungkan bagi perkembangbiakan kecoak, tingkat kelembaban udara yang tinggi serta curah hujan yang mulai tinggi ikut menunjang perkembangbiakan populasi kecoak serta masa siklus perkembangbiakan yang lebih singkat mendukung dan mempercepat proses pertambahan kepadatan populasinya.

Grafik 4. 31 Distribusi Rata-Rata Tingkat Kepadatan Kecoak Pasca Tindakan Pengendalia di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	induk	pelabuhan laut marunda	pelabuhan samudera muara baru	pelabuhan laut sunda kelapa	pelabuhan laut muara angke	pelabuhan kalibaru
pasca pengendalian	0,13	0,48	0,13	0,64	0,07	0,01
rata-rata pra pengendalian	0,13	0,48	0,13	0,64	0,07	0,37

Berdasarkan grafik 4.31 di atas dapat diiformasikan bahwa angka kepadatan kecoak rata-rata di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok di beberapa lokasi telah melebihi standar baku mutu, dan telah dilakukan tindakan pengendalian sehingga angka kepadatan kecoak pasca pengendalian menjadi rendah dan masih dalam batas standar baku mutu sesuai tingkat kepadatan kecoak kurang dari dua atau (<2).

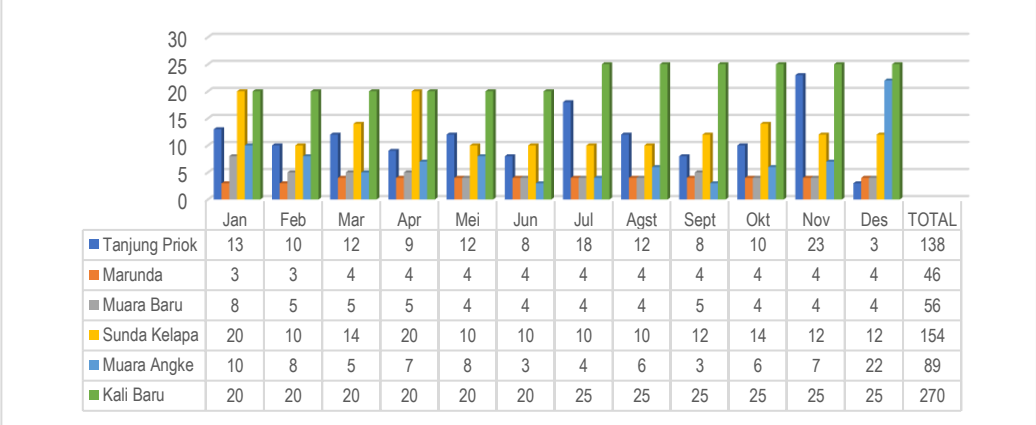
Terkait dengan indeks populasi kecoak yang tinggi, kepada pengelola pelabuhan juga telah diberikan rekomendasi agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan di semua tempat-tempat umum dan bangunan yang memiliki kegiatan dan aktivitas di pelabuhan. Selain itu, disarankan agar sampah yang ada dikelola dengan baik dengan menjadwalkan frekuensi pengangkutan sampah dari TPS setiap hari atau kurang dari 24 jam. Disamping itu juga diberikan edukasi kepada para pengelola rumah makan/warung/kantin untuk menjaga sanitasi lingkungan tempat pengelolaan pangan dengan menyediakan dan membuang sampah pada tempat sampah yang disediakan. Dalam tindakan pengendalian dilakukan penyemprotan (*desinseksi*) dengan menggunakan insektisida sebagai alternatif terakhir untuk menekan populasi kecoak yang tinggi. Realiasi serapan anggaran kegiatan layanan survei vektor diare tahun 2025 adalah sebesar Rp 39.053.000,- (100%).

8. Layanan Pengendalian Vektor DBD Dalam Rangka Pengendalian Vektor Nyamuk di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

Pengendalian vektor nyamuk DBD di wilayah BBKK Tanjung Priok adalah merupakan langkah dan upaya pengendalian penyakit dengan maksud tujuan mencegah dan mengendalikan populasi nyamuk khususnya vektor penyakit DBD yang

dapat ditularkan kepada masyarakat dipelabuhan. Adapun kegiatan pengendalian nyamuk DBD meliputi survey, *larvasidasi* dan *fogging* dengan luas wilayah layanan survei vektor DBD. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan survei Vektor DBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24.624.000,- untuk alat bahan survei, sebesar Rp 24.480.000,- untuk kegiatan survei jentik dan sebesar Rp 1.384.000,- untuk bahan bakar solar fogging pada DIPA Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tahun 2025. *Output* dari kegiatan layanan survei vektor DBD meliputi survei dan pengendalian tingkat kepadatan jentik nyamuk di pelabuhan dengan menggunakan metode visual, pelaksanaan *fogging* dilakukan bila index jentik tinggi dan antisipasi pada situasi khusus. Berikut hasil kegiatan layanan pengendalian vektor DBD dipelabuhan Wilayah BBKK Tanjung Priok. Untuk survey jentik nyamuk DBD dilakukan pada tempat-tempat seperti bangunan dan *container* atau bak-bak penampungan air. Adapun tujuan dari survey ini adalah untuk mengetahui banyaknya bangunan dan *container* tempat penampungan air yang berisi jentik nyamuk vektor DBD di area pelabuhan. Berikut hasil kegiatan survey jentik nyamuk DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025.

Grafik 4. 32 Distribusi Jumlah Bangunan Diperiksa Pada Kegiatan Survei Vektor DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

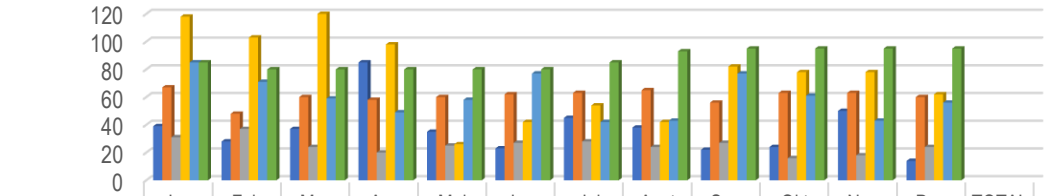


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
Tanjung Priok	13	10	12	9	12	8	18	12	8	10	23	3	138
Marunda	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46
Muara Baru	8	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	56
Sunda Kelapa	20	10	14	20	10	10	10	10	12	14	12	12	154
Muara Angke	10	8	5	7	8	3	4	6	3	6	7	22	89
Kali Baru	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	270

Dari grafik 4.32 dapat diinformasikan bahwa total bangunan yang dilakukan survei jentik di wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 jumlah bangunan yang diawasi terbanyak adalah di wilker Kalibaru sebanyak 270 bangunan, kemudian di wilayah kerja Pelabuhan Sunda Kelapa sebanyak 154 bangunan dan kemudian di Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 138 bangunan. Pemeriksaan yang dilakukan dilakukan di wilayah kerja lebih banyak bangunan karena berdekatan dengan pemukiman warga.

sedangkan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok merupakan kawasan terbatas dan tidak ada pemukiman penduduk.

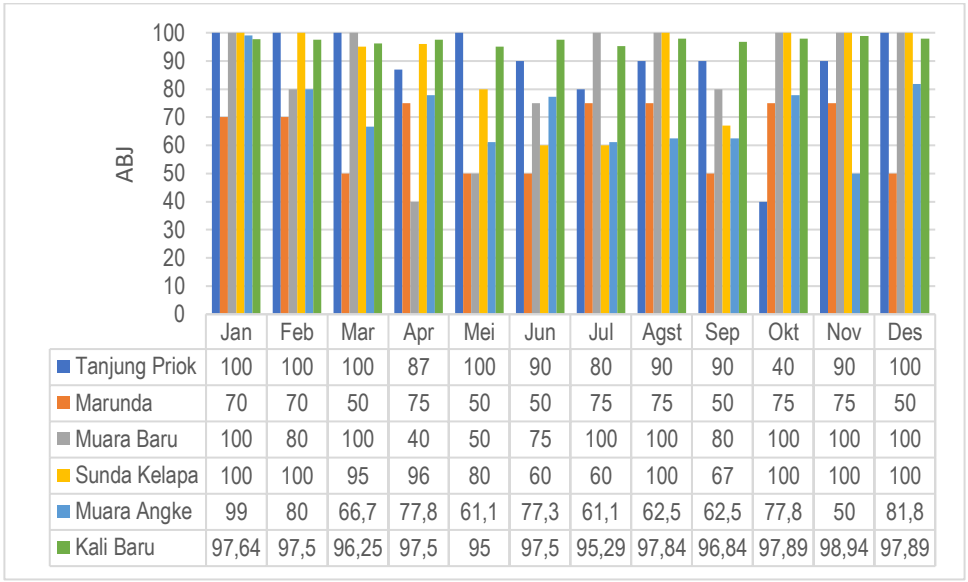
Grafik 4. 33 Distribusi Jumlah Container di Periksa Pada Kegiatan Layanan Survei Vektor DBD di Wilayah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	TOTAL
Tanjung Priok	39	28	37	85	35	23	45	38	22	24	50	14	440
Marunda	67	48	60	58	60	62	63	65	56	63	63	60	725
Muara Baru	31	37	24	20	25	27	28	24	27	16	18	24	301
Sunda Kelapa	118	103	122	98	26	42	54	42	82	78	78	62	905
Muara Angke	85	71	59	49	58	77	42	43	77	61	43	56	721
Kali Baru	85	80	80	80	80	80	85	93	95	95	95	95	1043

Dari grafik 4.33 dapat diinformasikan bahwa *container* tempat penampungan air yang diperiksa jentiknya dalam tahun 2025 dengan jumlah tertinggi yang diperiksa adalah Kalibaru dengan jumlah 1043 *container*, sedangkan jumlah terendah *container* yang diperiksa adalah di ada wilayah kerja Muara Baru sebanyak 301 *container.*

Grafik 4. 34 Distribusi Angka Bebas Jentik (ABJ) di Wilayah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
Tanjung Priok	100	100	100	87	100	90	80	90	90	40	90	100
Marunda	70	70	50	75	50	50	75	75	50	75	75	50
Muara Baru	100	80	100	40	50	75	100	100	80	100	100	100
Sunda Kelapa	100	100	95	96	80	60	60	100	67	100	100	100
Muara Angke	99	80	66,7	77,8	61,1	77,3	61,1	62,5	62,5	77,8	50	81,8
Kali Baru	97,64	97,5	96,25	97,5	95	97,5	95,29	97,84	96,84	97,89	98,94	97,89

Dari grafik 4.34 dapat diinformasikan bahwa rata-rata angka Angka Bebas Jentik (ABJ) tertinggi pada tahun 2025 terdapat di Kantor Induk Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan angka terendah ada di Pelabuhan Tanjung Priok pada bulan Oktober,

Muara Baru pada Bulan April dan Pelabuhan Marunda pada bulan Maret, Mei, Juni November. Kegiatan pengendalian vektor yang dilakukan adalah kombinasi dari beberapa metode secara terpadu serta mendorong peran serta masyarakat pelabuhan untuk tidak selalu melakukan pengendalian menggunakan bahan kimiawi yang jika dilakukan secara terus menerus dapat menimbulkan resistensi vektor. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan adalah pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus dengan tujuan memutuskan daur hidup nyamuk Aedes. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan adalah:

- Pengendalian jentik dengan larvasidasi yang dilakukan setiap bulan yakni pada saat hasil survei tingkat kepadatan jentik tinggi dan ditempat penampungan air yang susah atau jarang sekali dilakukan pengurasan.
- Pengendalian nyamuk dewasa dengan Pengasapan/*Fogging* berdasarkan hasil survei jentik dengan indikator CI dan HI yang tinggi.
- Diseminasi Informasi terhadap para pengelola bangunan dan *stake holder* di lingkungan pelabuhan.

Realisasi serapan anggaran Layanan Pengendalian Vektor DBD di oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2025 sebesar Rp 45.925.937**,-** (90,96%).

9. Koordinasi Teknis Program Pengendalian Risiko Lingkungan

Pada tahun anggaran 2025, kegiatan Koordinasi Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem kekarantinaan di wilayah pintu masuk negara, seperti pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara balai kekarantinaan kesehatan.

Kegiatan ini membahas prosedur teknis, alur koordinasi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Output dari kegiatan ini antara lain berupa pemahaman persepsi pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam laporan lengkap pelaksanaan kegiatan yang disertai dokumentasi kegiatan.

Hasil atau *outcome* yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya penerapan kekarantinaan secara ketat dan sesuai prosedur. Hal ini juga mendorong terciptanya koordinasi dalam merespons ancaman kesehatan lintas negara. Secara tidak langsung, kegiatan ini berkontribusi dalam

menurunkan potensi masuknya penyakit menular dari luar wilayah Indonesia melalui wilayah pelabuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- Kegiatan koordinasi program kesehatan lingkungan dengan BKK Banten (realisasi anggaran Rp. 6.481.100,-).
- Kegiatan pembahasan LAKIP di Bekasi – Jawa Barat (realisasi anggaran Rp. 1.240.000,-).
- Kegiatan Hari Kesehatan Nasional, melakukan Tabur Bunga di Makam Pahlawan kesehatan San Diego Hills (realisasi anggaran Rp. 4.427.300,-).
- Pertemuan Teknis Wolbachia di Semarang, Jawa Tengah (realisasi anggaran Rp. 10.180.447 dan Rp. 5.472.040,-).
- Kegiatan desk dan review anggaran di Bekasi, Jawa Barat (realisasi anggaran Rp. 8.330.000,-).
- koordinasi wolbachia berupa pengiriman spesimen nyamuk berwolbachia ke BBLKM Jakarta.

Dari sisi anggaran, kegiatan ini dialokasikan pagu sebesar Rp 44.170.000**,** dengan realisasi anggaran mencapai Rp 43.225.953,- Sisa anggaran sebesar Rp 944.047,- menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, tanpa mengurangi kualitas dan keluaran kegiatan yang telah direncanakan.

B. PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pencapaian visi dan misi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok yaitu mewujudkan pintu masuk negara dan wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko, Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BBKK Tanjung Priok tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu:

1) Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan
2) Persentase faktor resiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan
3) Indeks Pengendalian Faktor Resiko di pintu masuk negara.

Pencapaian Kinerja pada masing- masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 10 Hasil Pencapaian Kinerja Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Faktor Risiko Penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar (TTU, TPP, Inspeksi Sanitasi Penyehatan Air Bersih, Pemeriksaan Air, Rekapitulasi Hasil Survei Vektor)	1717	1993	116 %
		Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut barang dan lingkungan. Pemeriksaan Lingkungan (TTU, TPP, Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, Tindakan Pengendalian Vektor)	100 %	100%	100 %
		Indeks Pengendalian Faktor Resiko di Pintu Masuk Negara (Jumlah)			
		Indeks pinjal ≤ 1	100%	100%	100 %
		Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva *anopheles* (<1)	100%	100%	100 %
		Kepadatan Kecoak <2	100%	100%	100 %
		Kepadatan lalat < 2	100%	100%	100 %
		Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0	100%	100%	100 %
		Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	100%	100%	100 %
		Lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	84	84	100 %
		lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	133 32	133 32	100% 100 %

C. Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BBKK Tanjung Priok terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 11 Tabel Alokasi dan Penyerapan Anggaran Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan BBKK Tanjung Priok

Anggaran	Pagu (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan	360.930.000	355.423.890	98,5%

Sesuai dengan tabel 4.11 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2025 untuk penyerapan anggran mencapai Rp 355.423.890,- (98,5%).

D. Target Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan berupa sertifikat izin penyelenggaraan hapus tikus dan hapus serangga, sertifikat surat izin jasa boga dan jasa pemeriksaan/pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan atau restoran di lingkungan pelabuhan dan jasa pemeriksaan/pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat kualitas air di Pelabuhan/Bandar Udara/Pos lintas Batas Darat Negara, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12 Tabel Penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

No	Jenis PNBP	Target		Realisasi	
		Jumlah Dokumen	Rupiah (Rp)	Jumlah Dokumen	Rupiah
1	Jasa Pelayanan Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat)	1	1.000.000	5	5.000.000
2	Jasa pemeriksaan/pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan atau restoran di lingkungan pelabuhan	-	-	-	-
3	Jasa pemeriksaan/pengawasan Dalam rangka Penerbitan Sertifikat surat izin Jasa Boga di Lingkungan Pelabuhan				
	Kelas A	-	-	-	-
	Kelas B	1	75.000	-	-

No	Jenis PNBP	Target		Realisasi	
		Jumlah Dokumen	Rupiah (Rp)	Jumlah Dokumen	Rupiah
	Kelas C	-	-	-	-
4	Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kualitas Air di Pelabuhan untuk Keperluan Alat Angkut	2	100.000	8	400.000
JUMLAH		**4**	**1.175.000**	**13**	**5.400.000,-**

Berdasarkan tabel 4.12 Total penerimaan PNBP Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan pada Tahun 2025 sebesar Rp 5.400.000,- atau sebesar (459,57 %) melebihi target PNBP yang telah ditentukan.

4.1.4 PENCAPAIAN PENGAWASAN FAKTOR RISIKO KESEHATAN ORANG, KEGAWATDARURATAN DAN SITUASI KHUSUS

A. Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah

Kegiatan yang menunjang pada Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah adalah sebagai berikut :

a) Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri dan Nataru

1) Input:
   a) Pagu anggaran sebesar Rp 21.631.000,-
   b) Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Situasi Khusus Idul Fitri bertempat di Ruang Rapat Onrust Lantai 4 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
   c) Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Natal Tahun Baru bertempat di Ruang Rapat Kantor Walikota Jakarta Utara
2) Ouput:
   a) Realisasi anggaran Rp 21.631.000,- atau 100%
   b) Tanggal 24 Januari 2025 dilaksanakan kegiatan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang;
   c) Tanggal 14 Maret 2025 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri Tahun 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang;

d) Tanggal 21 Mei 2025 dilaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Idul Fitri Tahun 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang;
e) Tanggal 10 Desember 2025 dilaksanakan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Situasi Khusus Natal dan Tahun Baru 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 45 orang;
f) Terlaksananya koordinasi persiapan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru dengan lintas program dan lintas sektor;
g) Terlaksananya koordinasi evaluasi pelaksanaan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru guna mengetahui capaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

3) Manfaat :
a) Tersedianya Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang memadai
b) Mengetahui kendala pada saat pelaksanaan kegiatan

4) Dampak:
Pelaksanaan penanganan kesehatan pada situasi khusus Idul Fitri dan Nataru terlaksana dengan baik dan tidak ada kendala.

b) Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan VCT Mobile dan Deteksi Dini Terduga TB

1) Input :
a) Pagu anggaran Koordinasi dan evaluasi sebesar Rp 4.050.000,-
b) Belanja bahan sebesar Rp 4.050.000,-
c) Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Onrust Lantai 4 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

2) Output :
a) Realisasi anggaran sebesar Rp 4.050.000,00 atau 100% dari pagu anggaran;
b) Kegiatan koordinasi dilaksanakan pada 24 Februari 2025;
c) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok melaksanakan layanan deteksi dini terduga TB sebanyak 12 Kali;
d) Dari 400 orang yang menjalani skrining TB, terdapat 46 orang terduga TB dan 0 orang terkonfirmasi positif TB;
e) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dapat melaksanakan mobile VCT sebanyak 25 kali dengan 393 orang yang discreening HIV/AIDS;
f) Dari 393 orang yang discreening HIV/AIDS tidak ada yang reaktif HIV/AIDS;

g) Terjalinnya komunikasi dan sinergi dengan lintas sektor terkait program pengendalian TB dan HIV/AIDS di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

3) Manfaat:

a) Diketahuinya angka kejadian penyakit TB dan HIV/AIDS di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok;

b) Kasus TB dan HIV/AIDS yang terdeteksi dapat segera ditindaklanjuti dengan pengobatan dan rujukan;

c) Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam program pengendalian TB dan HIV/AIDS berjalan dengan baik.

4) Dampak:

Menurunnya risiko penularan penyakit TB dan HIV/AIDS di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

c) Koordinasi dan Sosialisasi Implementasi Penerbitan e-ICV untuk Klinik dan Rumah Sakit

1) Input:

a) Anggaran Rp 41.130.000,-

b) Belanja bahan sebesar Rp 24.300.000,- dan belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp16.830.000,-

c) Pertemuan dilaksanakan di apat Rajawali Lantai 2 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Ruang Rapat Kantor Walikota Jakarta Utara.

2) Output:

a) Realisasi anggaran sebesar Rp 41.130.000,- atau 100% dari pagu anggaran;

b) Kegiatan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 8,9,11,15 dan September 2025;

c) Peserta pertemuan sebanyak 300 orang yang terdiri dari Penanggungjawab/ Manajemen Rumah Sakit/Klinik, Direktorat Jendral Penanggulangan Penyakit serta staf BBKK Tanjung Priok

d) Tersampaikannya implementasi penerbitan e-ICV di klinik dan rumah sakit binaan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok

e) Meningkatnya pemahaman Rumah Sakit dan Klinik terkait prosedur pelayanan vaksinasi internasional;

f) Terimplementasinya pemeriksaan dan pelayanan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional;

g) Terlaksananya koordinasi penggunaan aplikasi SINKARKES terbaru dalam rangka penerbitan Buku ICV/e-ICV di Rumah Sakit dan Klinik.

3) Manfaat:

Terjalinnya jejaring dan koordinasi yang lebih kuat antara Klinik dan Rumah Sakit pelaksana vaksinasi internasional dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

4) Dampak:

Meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan vaksinasi internasional di Klinik dan Rumah Sakit karena terjamin keaslian vaksin dan keabsahan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV).

d) Penguatan Jejaring Klinik dan RS Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional

1) Input:

a) Anggaran Rp 8.100.000,-

b) Belanja bahan sebesar Rp 8.100.000,-

c) Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Onrust Lantai 4 Balai Bessar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

2) Output:

a) Realisasi anggaran sebesar Rp 8.100.000,- atau 100% dari pagu anggaran;

b) Kegiatan penguatan jejaring Klinik dan Rumah Sakit pelaksana pelayanan vaksinasi internasional terlaksana sebanyak 1 (dua) kali;

c) Jumlah peserta pertemuan sebanyak 100 orang, terdiri atas 90 orang perwakilan Klinik dan Rumah Sakit dan 10 orang pegawai Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

3) Manfaat:

a) Terjalinnya jejaring dan koordinasi yang lebih kuat antara Klinik dan Rumah Sakit pelaksana vaksinasi internasional dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;

b) Tersampaikannya informasi mengenai penerapan perubahan dari ICV fisik ke e-ICV bagi pelaku perjalanan umroh/haji.

4) Dampak:

Meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan vaksinasi internasional di Klinik dan Rumah Sakit karena terjamin keaslian vaksin serta keabsahan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV).

e) Koordinasi dan sosialisasi Implementasai Penerbitan e-ICV untuk agen awak kapal

1) Input:
   a) Realisasi anggaran sebesar Rp 6.770.000,- atau 100% dari pagu anggaran;
   b) Kegiatan dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2025;
   c) Peserta pertemuan sebanyak 50 orang yang terdiri dari agen pelayaran di lingkungan BBKK Tanjung Priok serta staf BBKK Tanjung Priok;
2) Output:
   a) Tersampaikannya implementasi penerapan e-ICV bagi awak kapal di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
   b) Meningkatnya pemahaman agen pelayaran terkait prosedur pelayanan vaksinasi internasional;

f) Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus

Kegiatan Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2025.

1. Input:

   Anggaran Rp 48.910.000,-
2. Output:
   1) Realisasi anggaran sebesar Rp 48.902.414,- atau 99,98% dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.586,-;
   2) Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko kesehatan orang dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat evaluasi penyelenggaraan angkutan natal 2024 dan tahun baru 2025 pada tanggal 13 Januari 2025 Rp 1.828.500,-;
   3) Terlaksananya Pertemuan koordinasi Pelaksanaan Penerbitan ICV oleh Fasyankes Binaan Regional Pulau Jawa+ di Aula BBKK Soekarno Hatta tanggal 17 Januari 2024 Rp 2.110.000,-;
   4) Transport dan uang Harian Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Pengawasan Inspektorat III di Ruang Kerja Inspektorat III, Jakarta Selatan Pada tanggal 8 januari 2025 Rp 340.000,-;

5) Pembayaran transport Verifikasi persyaratan pelayanan dan penerbitan ICV Klinik Hilda Alnaira tanggal 24 Januari 2025 Rp 510.000,- ;
6) Terlaksananya kegiatan Rapat Pembahasan PKA/KKA Audit Kepatuhan Perizinan Kekerantinaan Kesehatan di Ruang Kerja Inspektorat III, Jalan Rasuna Said Nomor Kavling 4-9 Blok X-5, Rt.1 Rw. 2, Jakarta Selatan tanggal 6 Maret 2025 Rp 340.000,- ;
7) Terlaksananya kegiatan pengambilan reagent HIV/AIDS dan Sifilis ke Pergudangan Satya Wirya, Kelapa Gading, Jakarta Utara tanggal 17 April 2025 Rp 170.000,-;
8) Terlaksananya Koordinasi dan Advokasi Pengawasan Faktor Risiko Kes Orang, Kegawatdaruratan dan Situasi Khusus terkait pemenuhan kebutuhan Vaksin YF dan Thypoid di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung tgl 15 Mei 2025 Rp 938.000,-;
9) Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio bagi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di kantor BPK RI Jakarta Pusat pada tanggal 02 Mei 2025 Rp 340.000,- ;
10) Terlaksananya Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio vaksinasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kantor DPR RI Jakarta tanggal 7 Mei 2025 Rp 340.000,-;
11) Terlaksananya Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Unit Pelaksana Kegiatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tanggal 27 Mei 2025 Rp 340.000,-;
12) Terlaksananya penyusunan Petunjuk Perencanaan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Aula A – Gedung D, Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta Pusat, pada tanggal 2, 3 dan 5 Juni 2025 Rp 1.010.000,-;
13) Terlaksananya Koordinasi dan advokasi dalam rangka pembuatan akun Sisitem Informasi Tuberkulosis (SITB) di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tgl 23 Juni 2025 Rp 170.000,-;
14) Terlaksananya Koordinasi dan advokasi dalam rangka kegiatan rapat penyusunan Tool Assessment Kapasitas Sentinel Like Illnes (ILI) di pintu masuk negara di Hotel Santika Bandung pada tanggal 23 s.d 26 Juni 2025 Rp 3.557.694,-;

15) Terlaksananya Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio pimpinan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenekeu RI) di kantor Kemenkeu RI tanggal 1 Juli 2025 Rp 340.000,-;
16) Terlaksannya Koordinasi dan advokasi dalam rangka kegiatan penelitian dan reviu RKA-K/L pagu anggaran Ditjen penanggulangan penyakit tahun anggaran 2026 di gedung record center, jakarta pusat tanggal 21 Juli 2025 Rp 676.000,-;
17) Terlaksananya koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus keg Tinjau TB di Puskesmas Tanjung Priok tanggal 23 Juli 2025 Rp 170.000,-;
18) Koordinasi dan advokasi dalam rangka pembuatan akun Sisitem Informasi Tuberkulosis (SITB) di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara tgl 24 Juli 2025 Rp 170.000,- ;
19) Terlaksanaya kegiatan koordinasi dalam rangka kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alkes di PT. Samator Indo Gas Tbk Cakung Jakarta Timur tgl 12 dan 14 Agustus 2025 Rp 340.000,- ;
20) koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di Unit Pelaksana Teknis Nizam zachman, muara baru, penjaringan tanggal 8 Agustus 2025 Rp 1.020.000,- ;
21) koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di Wilayah Kerja Muara Angke tanggal 8 Agustus 2025 Rp 510.000,- ;
22) koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di Terminal Penumpang Nusantara Pura II Tanjung Priok tanggal 11 Agustus 2025 Rp 680.000,- ;
23) koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di PT Karya Teknik Utama Marunda pada tanggal 21 Agustus 2025 Rp 1.020.000,-;
24) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di Wilayah Kerja Kalibaru tanggal 26 Agustus 2025 Rp 1.020.000,- ;

25) Koordinasi dan advokasi pengamanan kegiatan Haul Habib Hasan Bin Muhammad Al Haddad (Mbah Priok) ke-270 Tahun 2025 di Jalan Dobo Koja Tanjung Priok tanggal 24 Agustus 2025 Rp 1.352.000,-;
26) koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di Unit Pelaksana Teknis Nizam zachman, muara baru, penjaringan tanggal 28 Agustus 2025 Rp 680.000,-;
27) Koordinasi dan advokasi dalam rangka melaksanakan dukungan kesehatan peringatan HUT ke 80 RI di poskes 4 simpang kebon sirih jakarta tanggal 17 Agustus 2025 Rp 676.000,-;
28) Pembayaran uang harian, penginapan dan transpor petugas pada kegiatan pertemuan koordinasi sentinel Influenza Like Ilness (ILI) di pintu masuk negara tanggal 1 s.d 4 September 2025, di Balai Besar Pelatihan Ciloto Cianjur Rp 6.058.865,-;
29) Koordinasi dan advokasi peningkatan kapasitas deteksi dan penilaian resiko kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyakit emerging di kawasan ASEAN di Wyndham Casablanca Jakarta tanggal 19 September 2025 Rp 1.590.000,-;
30) Koordinasi dan advokasi dalam rangka pertemuan diseminasi hasil focus group discussion population connectivity across Border (popcab) pada tanggal 30 September 2025 di dinas kesehatan kabupaten bogor tanggal 30 September 2025 Rp 1.556.500,-;
31) Koordinasi dan advokasi kegiatan finaliasasi penyusunan alokasi anggaran 2026, satker UPT dil lingkungan Ditjen P2, tanggal 13-15 Oktober 2025 di wisma sukajadi, kemenkes, bandung Rp 7.375.655,-;
32) Koordinasi dan advokasi kegiatan pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina penerbitan International Certificate Vaccination (ICV) di Klinik Pratama Rawat Jalan Kalisuren Medika, Jalan Raya Kalisuren Bogor, tanggal 13 Oktober 2025 Rp 1.627.200,-;
33) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis di balai besar karantina hewan, ikan dan tumbuhan daerah khusus ibukota Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2025 Rp 1.530.000,-;
34) Koordinasi dan advokasi dalam rangka kegiatan Sarasehan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Kebijakan dan

Implementasi Penerapan Electronic International Certificate of Vaccination (e-ICV) di Ruang Hall A, Lantai 3 Blok A Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Oktober 2025 Rp 510.000,-;

35) Koordinasi dan advokasi pelaksanaan deteksi dini kanker leher rahim (HVP/DNA) di puskesmas Tanjung Priok jalan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok pada tanggal 24 Oktober 2025 Rp 340.000,-;
36) Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Kantor Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 22 Oktober 2025 Rp 340.000,-;
37) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak Cesium-137 di Puskesmas Cikande tanggal 29 Oktober 2025 Rp 1.592.000,-;
38) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi Lansia di panti Wresa Atmabrata tanggal 31 Oktober 2025 Rp 850.000,-;
39) Koordinasi dan advokasi dalam rangka vaksinasi Meningitis dan Polio bagi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di kantor BPK RI Jakarta Pusat pada tanggal 03 November 2025 Rp 340.000,-;
40) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor resiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka pemeriksaan cek kesehatan gratis bagi lansia di panti wreda yayasan hj. Andi asmah noor tanggal 7 November 2025 Rp 680.000,-;
41) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka kegiatan konsultasi pelayanan publik terpadu pada hari kesehatan nasional ke 61 di balai kartini, kuningan, jakarta selatan tanggal 8 desember 2025 Rp 680.000,-;
42) Koordinasi dan advokasi pengawasan faktor risiko pada orang, kegawatdaruratan dan situasi khusus dalam rangka kegiatan konsultasi pelayanan publik terpadu pada hari kesehatan Nasional ke 61 di balai kartini, Kuningan Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2025 Rp 510.000,-;
43) Kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alkes di PT Samator Indo Gas Tbk Cakung Jakarta Timur tanggal 12 dan 15 Desember 2025 Rp 340.000,-;

44) Kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan angkutan laut natal 2025 dan tahun baru 2026 di avenzel hotel & convention cibubur, Jawa barat pada tanggal 9 desember 2025 Rp 632.000,-.

3. Manfaat:

Terselenggaranya pengawasan faktor risiko kesehatan orang secara optimal dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan dan situasi khusus.

B. Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

a) Verifikasi dan Pengawasan Rumah Sakit/Klinik Pratama Dalam Rangka Penerbitan Buku ICV

1) Input:

a. Pagu anggaran sebesar Rp 49.770.000,-

b. Dasar pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Imunisasi dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional.

2) Output:

a. Realisasi anggaran Rp 85.331.356,- atau 99,96% serapan, sisa anggaran Rp 36.644,-

b. Realisasi anggaran sebesar Rp 49.769.000,- atau 99,99% dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.000,-

c. Dari total 76 Rumah Sakit/Klinik Pratama yang mengajukan permohonan izin pelayanan vaksinasi internasional, seluruhnya telah dilakukan verifikasi. Sebanyak 75 Rumah Sakit/Klinik Pratama dinyatakan memenuhi persyaratan dan diberikan izin, sedangkan 1 Klinik Pratama tidak diberikan izin karena tidak memenuhi ketentuan sesuai Perdirjen Nomor SR.03.04/II/2745/2018.

d. Verifikasi dalam rangka penerbitan Buku ICV di Rumah Sakit/Klinik Pratama di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan sebanyak 26 kali.

e. Verifikasi dalam rangka penerbitan Buku ICV di Rumah Sakit/Klinik Pratama di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebanyak 50 kali.

f. Pengawasan penerbitan Buku ICV dilaksanakan sebanyak 1 kali di Provinsi DKI Jakarta dan 1 kali di Provinsi Jawa Barat

g. Rumah Sakit/Klinik Pratama di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang diberikan izin pelayanan vaksinasi internasional berjumlah 75 fasilitas pelayanan kesehatan,

sedangkan 1 Rumah Sakit/Klinik Pratama tidak diberikan izin karena tidak memenuhi ketentuan sesuai Perdirjen Nomor SR.03.04/II/2745/2018.

3) Manfaat :
   a. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan vaksinasi internasional bagi pelaku perjalanan agar lebih mudah dijangkau
   b. Mendukung terselenggaranya sistem koordinasi dalam rangka kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui kerja sama lintas sektor dan lintas program
4) Dampak:

   Mencegah terjadinya penularan penyakit yang berpotensi menjadi Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

C. Pelayanan Publik Lainnya

a) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV AIDS

1) Input:
   a. Pagu anggaran sebesar Rp 16.016.000,-
   b. Terdiri dari belanja bahan sebesar Rp 13.636.000,- dan belanja transport petugas fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 2.380.000,-
   c. Target sasaran sebanyak 350 orang untuk dilakukan skrining HIV/AIDS
2) Output:
   a) Realisasi anggaran sebesar Rp 15.915.000,- atau 99,93% dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp 48.645,-
   b) Terlaksananya kegiatan Mobile VCT di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok
   c) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penyakit HIV/AIDS
   d) Petugas BBKK Tanjung Priok melaksanakan kegiatan Mobile VCT sebanyak 25 kali dengan jumlah sasaran skrining HIV/AIDS sebanyak 393 orang
   e) Dari 393 orang yang dilakukan skrining HIV/AIDS, tidak terdapat hasil reaktif HIV/AIDS
3) Manfaat :
   a) Memberikan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang bermanfaat kepada peserta pemeriksaan Mobile VCT
   b) Mengetahui gambaran angka kesakitan penyakit HIV/AIDS di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok

c) Memungkinkan tindak lanjut secara cepat apabila ditemukan hasil reaktif HIV/AIDS melalui koordinasi dengan puskesmas kecamatan setempat

d) Mendukung upaya pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok

b) Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB

1) Input:

a) Pagu anggaran sebesar Rp 42.280.000,-

b) Terdiri dari belanja bahan sebesar Rp 40.920.000,- dan belanja transport lokal petugas fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 1.360.000,-

c) Target sasaran sebanyak 400 orang untuk dilakukan skrining Tuberkulosis (TB)

2) Output:

a) Realisasi anggaran sebesar Rp 42.262.378,- atau 99,99% dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp17.622,-

b) Terlaksananya kegiatan deteksi dini terduga TB di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok sebanyak 6 kali dan di wilayah BBKK Tanjung Priok sebanyak 2 kali.

c) Terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai faktor risiko dan gejala penyakit TB

d) Petugas puskesmas kecamatan setempat melaksanakan layanan survei faktor risiko penyakit TB sebanyak 8 kali dengan jumlah sasaran skrining sebanyak 400 orang

e) Dari 400 orang yang dilakukan skrining TB, terdapat 46 orang terduga TB; selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rapid Test dan tidak ditemukan dengan hasil reaktif TB.

3) Manfaat:

a) Mengetahui gambaran angka kesakitan penyakit TB di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok

b) Memungkinkan tindak lanjut secara cepat apabila ditemukan hasil reaktif TB melalui koordinasi dengan puskesmas kecamatan setempat

c) Mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penularan penyakit TB di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok

D. Layanan Pemeriksaan orang, barang, alat angkut

a) Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS

1) Input:

Anggaran Rp 12.750.000,-

2) Output:

a) Realisasi anggaran sebesar Rp 12.750.000,- atau 100% dari pagu anggaran;

b) Kegiatan dilaksanakan sebanyak 25 kali, masing-masing dengan penyediaan transport bagi petugas BBKK Tanjung Priok.;

c) Setiap kegiatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas BBKK Tanjung Priok.

b) Pelaksanaan Survei Faktor Risiko Penyakit TB

1) Input:

Anggaran Rp 4.080.000,-

2) Output:

a) Realisasi anggaran sebesar Rp4.080.000,- atau 100% dari pagu anggaran;

b) Kegiatan dilaksanakan sebanyak 8 kali, masing-masing dengan penyediaan transport bagi petugas BBKK Tanjung Priok.

c) Setiap kegiatan dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas BBKK Tanjung Priok;

d) Dari 400 orang yang dilakukan skrining, terdapat 46 orang terduga TB; selanjutnya dilakukan pemeriksaan Rapid Test tidak ditemukan dengan hasil reaktif TB.

3) Manfaat:

a. Mengetahui gambaran angka kesakitan penyakit TB di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok;

b. Memungkinkan tindak lanjut secara cepat apabila ditemukan hasil reaktif TB melalui koordinasi dengan puskesmas kecamatan setempat;

c. Mendukung upaya pencegahan penularan penyakit TB di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.

E. Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk

a. Pengadaan Bahan/Alat Bahan Media dan Non Medis untuk Pelayanan dan Advokasi Kesehatan

1) Input :

Anggaran Rp 125.000.000,-

2) Output :

a) Realisasi anggaran sebesar Rp 124.945.249,- atau 99,95% dari pagu anggaran, dengan sisa anggaran sebesar Rp 54.751,-

b) Terdiri dari bahan habis pakai dan belanja modal

c) Tersedianya bahan dan alat penunjang kegiatan teknis Program Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

3) Manfaat:

Petugas kesehatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan dukungan ketersediaan bahan dan alat kesehatan yang memadai.

4) Dampak:

Pelaksanaan program upaya kesehatan dan pelayanan lintas wilayah di pintu masuk negara dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

F. On The Job Training Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Medis

Pelatihan *On The Job Training* Petugas dalam Penanganan Kegawatdaruratan Medis:

1. Input:

   Anggaran Rp 70.500.000,-

2. Output:

   Realisasi anggaran sebesar Rp70.500.000**,-** atau 100% dari pagu anggaran;

3. Manfaat:

   Petugas kesehatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan dukungan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBKK Tanjung Priok.

4. Dampak:

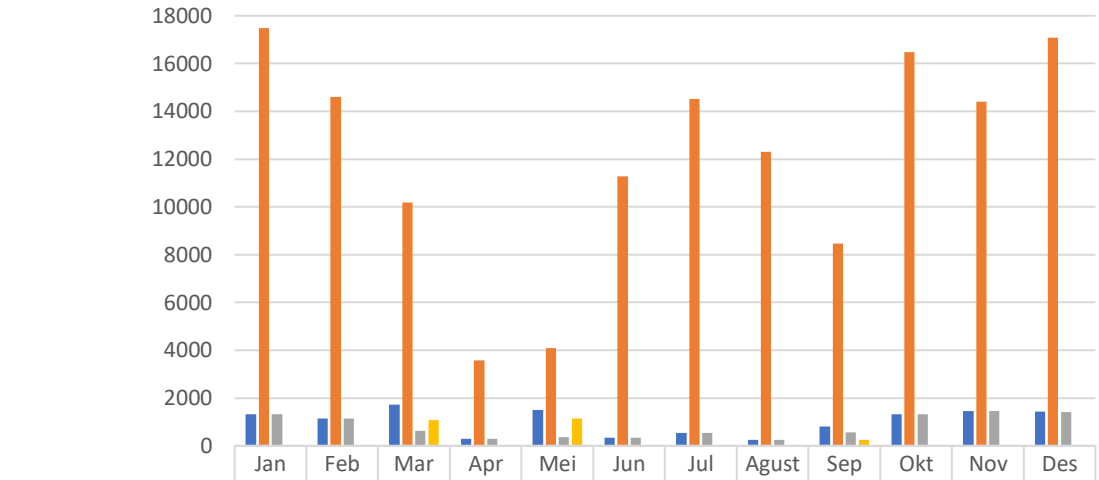
   Pelaksanaan program upaya kesehatan dan pelayanan lintas wilayah di pintu masuk negara dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

G. Kegiatan Penunjang

1. Penerbitan ICV

   Distribusi penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV/e-ICV) di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 disajikan pada diagram berikut. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai volume layanan, pola penerbitan sepanjang tahun, serta dinamika kebutuhan sertifikasi vaksinasi internasional yang berkaitan dengan mobilitas perjalanan lintas negara.

Grafik 4. 35 Distribusi Penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
Pemakaian BBKK	1331	1146	1713	298	1510	338	537	248	805	1327	1463	1433
Pemakaian Klinik/RS	17482	14603	10193	3586	4096	11280	14517	12314	8456	16476	14401	17079
PNBP	1331	1146	627	297	368	336	535	248	555	1319	1463	1404
NON PNBP	0	0	1086	1	1142	2	2	0	250	8	0	29

Distribusi penerbitan ICV/e-ICV sepanjang tahun 2025 menunjukkan beban layanan yang sangat tinggi dengan total 156.632 sertifikat, yang menegaskan peran strategis BBKK Tanjung Priok sebagai otoritas penerbit Sertifikat Vaksinasi Internasional dalam mendukung mobilitas perjalanan internasional. Seluruh penerbitan masih terpusat di kantor induk dan klinik/rumah sakit binaan, sehingga fungsi penerbitan bersifat tersentralisasi dan wilayah kerja belum berperan sebagai titik layanan.

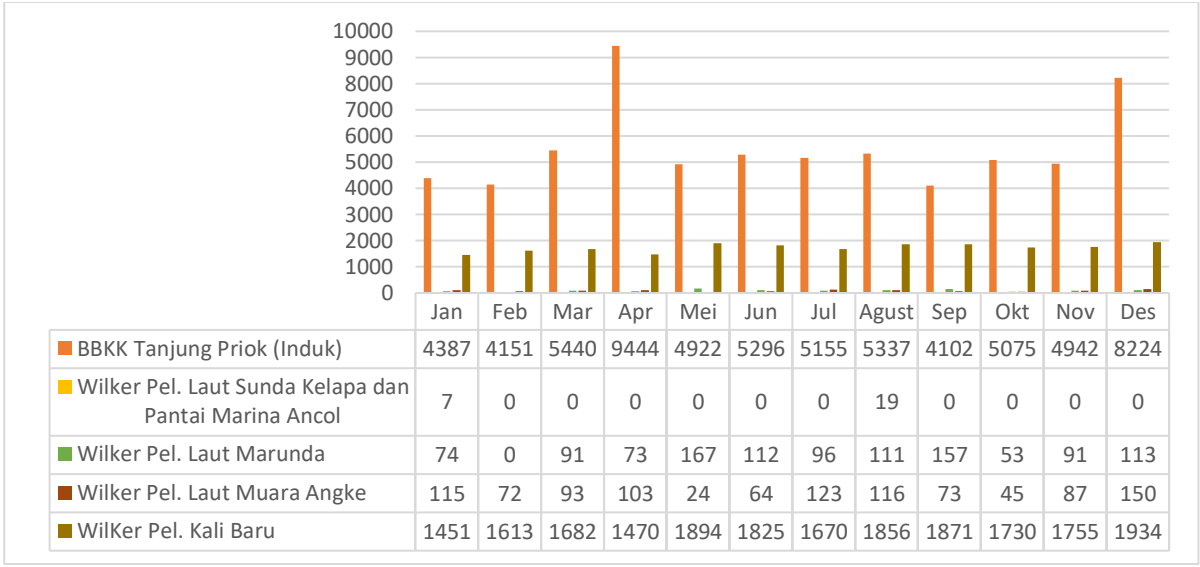
Penerbitan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 18.813 sertifikat, mencerminkan meningkatnya kebutuhan sertifikasi pasca libur akhir tahun, sementara penurunan signifikan pada bulan April sebanyak 3.884 sertifikat menunjukkan pengaruh faktor musiman, khususnya periode Ramadan dan Idul fitri. Fluktuasi antarbulan ini menunjukkan bahwa penerbitan ICV/e-ICV sangat dipengaruhi oleh dinamika mobilitas internasional.

Sebanyak 2.520 sertifikat diterbitkan dengan PNBP Rp 0 sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik untuk mendukung kebijakan dan penugasan tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada keberlanjutan pembiayaan operasional, sehingga diperlukan penguatan perencanaan kapasitas berbasis tren musiman, evaluasi pemerataan peran wilayah kerja, serta optimalisasi pengelolaan sistem e-ICV guna menjaga mutu layanan dan efisiensi pembiayaan pada tahun berikutnya.

2. Jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal

Pemeriksaan kesehatan awak kapal melalui penerbitan ICV merupakan salah satu indikator utama pengawasan kesehatan pelaut di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Diagram berikut menyajikan distribusi pemeriksaan ICV awak kapal sepanjang Tahun 2025, yang menggambarkan intensitas pelayanan, pola waktu pemeriksaan, serta sebaran pelaksanaan layanan di kantor induk dan wilayah kerja.

Grafik 4. 36 Distribusi jumlah pemeriksaan ICV Awak Kapal BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK Tanjung Priok (Induk)	4387	4151	5440	9444	4922	5296	5155	5337	4102	5075	4942	8224
Wilker Pel. Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol	7	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Wilker Pel. Laut Marunda	74	0	91	73	167	112	96	111	157	53	91	113
Wilker Pel. Laut Muara Angke	115	72	93	103	24	64	123	116	73	45	87	150
WilKer Pel. Kali Baru	1451	1613	1682	1470	1894	1825	1670	1856	1871	1730	1755	1934

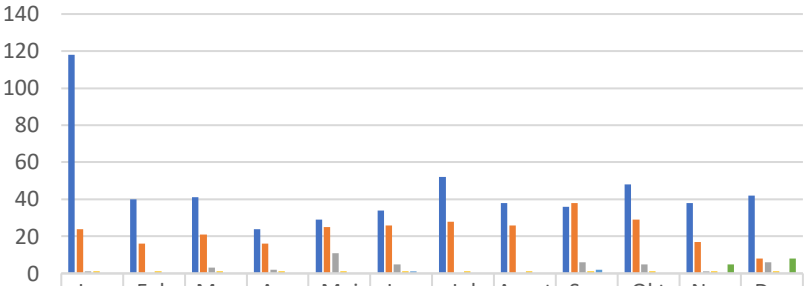
Distribusi pemeriksaan ICV awak kapal sepanjang tahun 2025 menunjukkan beban pelayanan yang tinggi dengan total 89.584 pemeriksaan, yang menegaskan peran BBKK Tanjung Priok sebagai pintu utama pengawasan kesehatan pelaut dan lalu lintas kapal internasional. Pemeriksaan masih didominasi oleh wilayah Induk sebanyak 66.604 pemeriksaan, sementara kontribusi wilayah kerja lainnya relatif rendah, yang menunjukkan masih terpusatnya pelayanan di kantor induk.

Pemeriksaan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 11.090 pemeriksaan, mencerminkan meningkatnya aktivitas pelayaran dan pergantian awak kapal, sedangkan jumlah terendah tercatat pada bulan Januari sebanyak 5.836 pemeriksaan akibat menurunnya aktivitas pelayaran pada awal tahun. Pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pemeriksa, kesiapan sistem pelayanan, dan penataan peran wilayah kerja perlu disesuaikan dengan siklus operasional pelayaran tahunan guna meningkatkan pemerataan layanan dan efisiensi sumber daya secara berkelanjutan.

3. Jumlah Kunjungan Poliklinik (selain penumpang)

Pelayanan poliklinik selain penumpang merupakan bagian dari upaya BBKK Tanjung Priok dalam memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat pelabuhan. Diagram berikut menyajikan distribusi jumlah kunjungan poliklinik selain penumpang sepanjang Tahun 2025, yang menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan, sebaran kunjungan berdasarkan wilayah, serta dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan pelabuhan.

Grafik 4. 37 Distribusi Jumlah Kunjungan Poliklinik selain penumpang BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK Tanjung Priok (Induk)	118	40	41	24	29	34	52	38	36	48	38	42
Wilker Pel. Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol	24	16	21	16	25	26	28	26	38	29	17	8
Wilker Pel. Laut Marunda	1	0	3	2	11	5	0	0	6	5	1	6
Wilker Pel. Muara Baru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wilker Pel. Laut Muara Angke	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
WilKer Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8

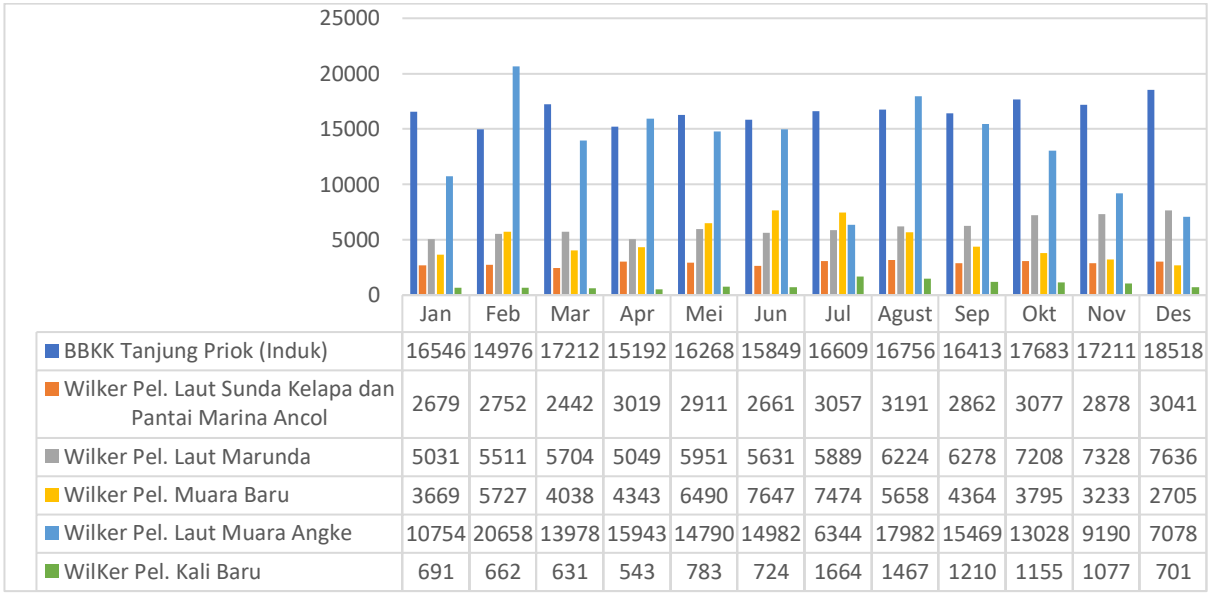
Jumlah kunjungan poliklinik selain penumpang sepanjang Tahun 2025 tercatat sebanyak 871 orang, yang mencerminkan peran layanan kuratif dan promotif-preventif bagi pekerja pelabuhan, awak kapal, dan masyarakat sekitar. Kunjungan masih didominasi oleh Kantor Induk dengan 540 orang, menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan poliklinik belum merata dan masih terpusat di lokasi induk.

Kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 118 orang, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan pada awal tahun, sementara sangat rendahnya kunjungan di beberapa wilayah kerja, khususnya Pelabuhan Muara Angke dengan 3 kunjungan, mengindikasikan keterbatasan fungsi layanan di wilayah tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi penataan layanan poliklinik di wilayah kerja melalui penguatan peran wilayah, peningkatan ketersediaan tenaga dan sarana, serta integrasi dengan kegiatan pengawasan kesehatan pelabuhan agar layanan dapat menjangkau sasaran secara lebih merata dan berkelanjutan.

4. Jumlah Pemeriksaan ABK dalan negeri

Pemeriksaan kesehatan Anak Buah Kapal (ABK) dalam negeri merupakan bagian penting dari pengawasan kesehatan pelayaran nasional. Diagram berikut menyajikan distribusi pemeriksaan ABK dalam negeri sepanjang Tahun 2025, yang menggambarkan intensitas pelayanan berdasarkan wilayah kerja dan waktu pelaksanaan, serta mencerminkan dinamika aktivitas pelayaran domestik.

Grafik 4. 38 Distribusi Jumlah Pemeriksaan ABK Dalam Negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK Tanjung Priok (Induk)	16546	14976	17212	15192	16268	15849	16609	16756	16413	17683	17211	18518
Wilker Pel. Laut Sunda Kelapa dan Pantai Marina Ancol	2679	2752	2442	3019	2911	2661	3057	3191	2862	3077	2878	3041
Wilker Pel. Laut Marunda	5031	5511	5704	5049	5951	5631	5889	6224	6278	7208	7328	7636
Wilker Pel. Muara Baru	3669	5727	4038	4343	6490	7647	7474	5658	4364	3795	3233	2705
Wilker Pel. Laut Muara Angke	10754	20658	13978	15943	14790	14982	6344	17982	15469	13028	9190	7078
WilKer Pel. Kali Baru	691	662	631	543	783	724	1664	1467	1210	1155	1077	701

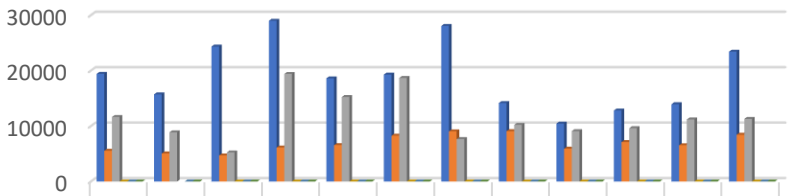
Pemeriksaan ABK dalam negeri sepanjang Tahun 2025 menunjukkan beban pengawasan kesehatan yang tinggi dengan konsentrasi terbesar di Wilayah Induk BBKK Tanjung Priok sebanyak 199.233 orang, yang menegaskan peran pelabuhan ini sebagai pusat utama pergerakan kapal dan aktivitas maritim nasional. Sebaliknya, Wilayah Kali Baru mencatat jumlah pemeriksaan terendah sebanyak 11.868 orang, yang mengindikasikan terbatasnya intensitas sandar kapal atau fungsi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Dari aspek waktu, pemeriksaan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 51.388 ABK seiring meningkatnya aktivitas logistik dan rotasi awak kapal menjelang akhir tahun, sedangkan jumlah terendah tercatat pada bulan Januari sebanyak 39.567 ABK akibat penurunan aktivitas pelayaran pada awal tahun. Pola ini menunjukkan bahwa pemeriksaan ABK bersifat musiman dan mengikuti siklus logistik nasional, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya yang adaptif serta penataan peran wilayah kerja agar pengawasan kesehatan awak kapal dalam negeri dapat berjalan lebih merata, efektif, dan berkelanjutan.

5. Jumlah Pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri

Pengawasan penumpang datang, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan bagian penting dari upaya pencegahan masuk dan keluarnya risiko kesehatan melalui jalur laut. Diagram berikut menyajikan distribusi pengawasan penumpang datang di BBKK Tanjung Priok sepanjang Tahun 2025, yang menggambarkan intensitas pengawasan berdasarkan wilayah kerja dan waktu pelaksanaan.

Grafik 4. 39 Distribusi pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	1942	1572	2434	2899	1860	1927	2806	1415	1044	1281	1394	2341
Wilker Pel. Sunda Kelapa	5547	5065	4709	6131	6566	8270	9049	9084	5922	7121	6541	8435
Wilker Pel. Marunda	1164	8867	5252	1939	1523	1868	7654	1021	9088	9627	1119	1129
Wilker Pel. Muara Baru	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pengawasan penumpang datang dalam dan luar negeri sepanjang Tahun 2025 menunjukkan peran sentral Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk utama pergerakan orang melalui jalur laut, dengan jumlah pengawasan terbanyak terpusat di Kantor Induk BBKK Tanjung Priok sebanyak 228.552 orang. Tidak tercatatnya pengawasan penumpang di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda, Muara Baru, dan Kali Baru disebabkan karena pelabuhan-pelabuhan tersebut tidak berfungsi sebagai pelabuhan penumpang, sehingga tidak melayani kedatangan penumpang kapal baik dalam negeri maupun luar negeri.

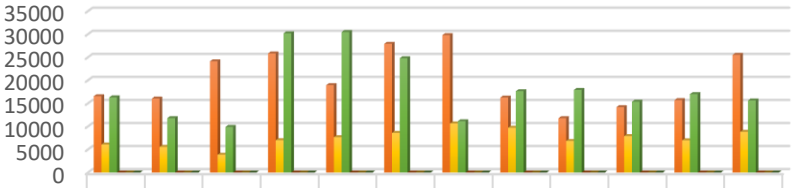
Ditinjau dari aspek waktu, pengawasan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 54.523 penumpang, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode Idulfitri, sedangkan jumlah terendah pada bulan September sebanyak 25.451 penumpang mencerminkan normalisasi aktivitas perjalanan setelah musim libur panjang. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pengawasan penumpang sangat dipengaruhi oleh pola musiman, sehingga diperlukan perencanaan kesiapsiagaan yang adaptif melalui

pengaturan petugas, penguatan sarana skrining kesehatan, serta koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pengawasan tetap optimal dan efisien sepanjang tahun.

6. Jumlah Pengawasan Penumpang Berangkat Dalam dan Luar Negeri

Pengawasan penumpang berangkat, baik dalam negeri maupun luar negeri, merupakan bagian penting dari upaya pengendalian risiko kesehatan masyarakat melalui jalur laut. Diagram berikut menyajikan distribusi pengawasan penumpang berangkat di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, yang memberikan gambaran mengenai intensitas pengawasan, pola waktu keberangkatan, serta sebaran pelaksanaan pengawasan berdasarkan wilayah pelayanan.

Grafik 4. 40 Distribusi pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	16556	16052	24118	25833	18948	27919	29802	16271	11787	14175	15720	25513
Wilker Pel. Sunda Kelapa	6092	5567	3866	7014	7669	8608	10655	9716	6852	7903	6999	8834
Wilker Pel. Marunda	16311	11791	9893	30194	30469	24789	11129	17642	17909	15368	17008	15625
Wilker Pel. Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pengawasan penumpang berangkat dalam dan luar negeri sepanjang Tahun 2025 menunjukkan intensitas yang tinggi dan berfluktuasi, sejalan dengan dinamika mobilitas penumpang melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dari aspek waktu, jumlah pengawasan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 63.041 orang, yang mencerminkan lonjakan keberangkatan penumpang pada periode menjelang dan setelah Hari Raya Idulfitri. Sebaliknya, jumlah pengawasan terendah tercatat pada bulan Februari sebanyak 33.410 orang, yang menunjukkan relatif rendahnya aktivitas pelayaran setelah libur awal tahun.

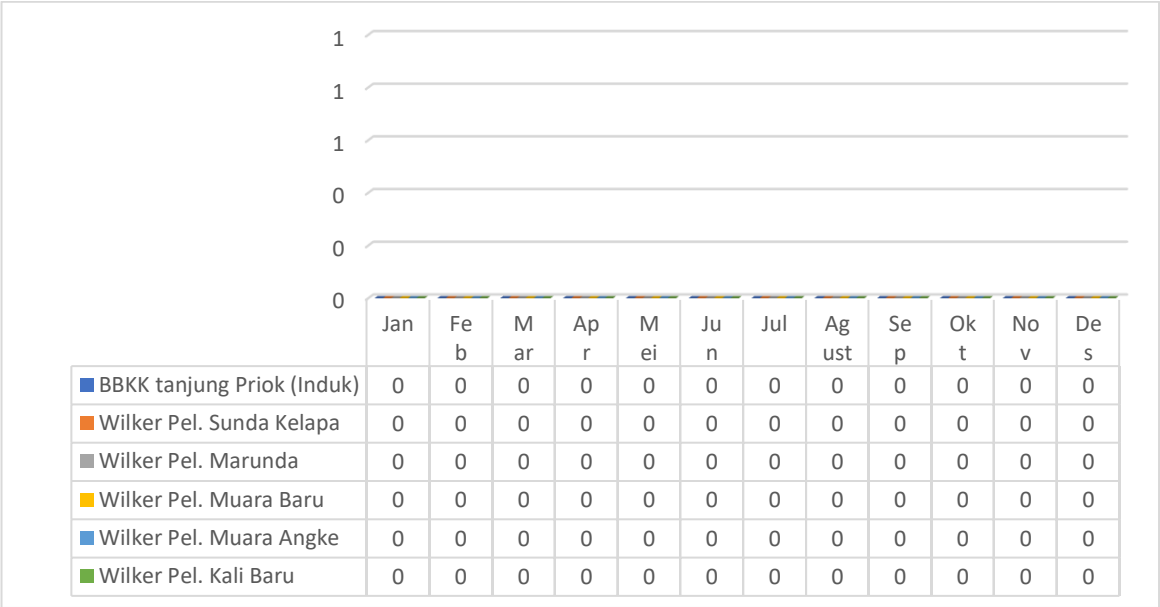
Perbedaan yang cukup signifikan antarbulan menunjukkan bahwa beban pengawasan penumpang berangkat bersifat musiman. Kondisi ini menuntut perencanaan kesiapan sumber daya yang adaptif, khususnya dalam penempatan petugas, pengaturan jadwal kerja, serta penguatan sarana pemeriksaan kesehatan

pada periode puncak keberangkatan, guna menjamin pelaksanaan pengawasan yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

7. Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah

   Penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah merupakan salah satu layanan kekarantinaan kesehatan yang bersifat insidental dan situasional. Diagram berikut menyajikan distribusi penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan layanan tersebut selama periode pelaporan.

Grafik 4. 41 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Marunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan distribusi penerbitan Surat Izin Pengangkutan Jenazah BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, diketahui bahwa sepanjang tahun pelaporan tidak terdapat penerbitan surat izin, baik di Kantor Induk maupun di seluruh wilayah kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat permohonan pengangkutan jenazah melalui jalur laut di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok selama periode tersebut.

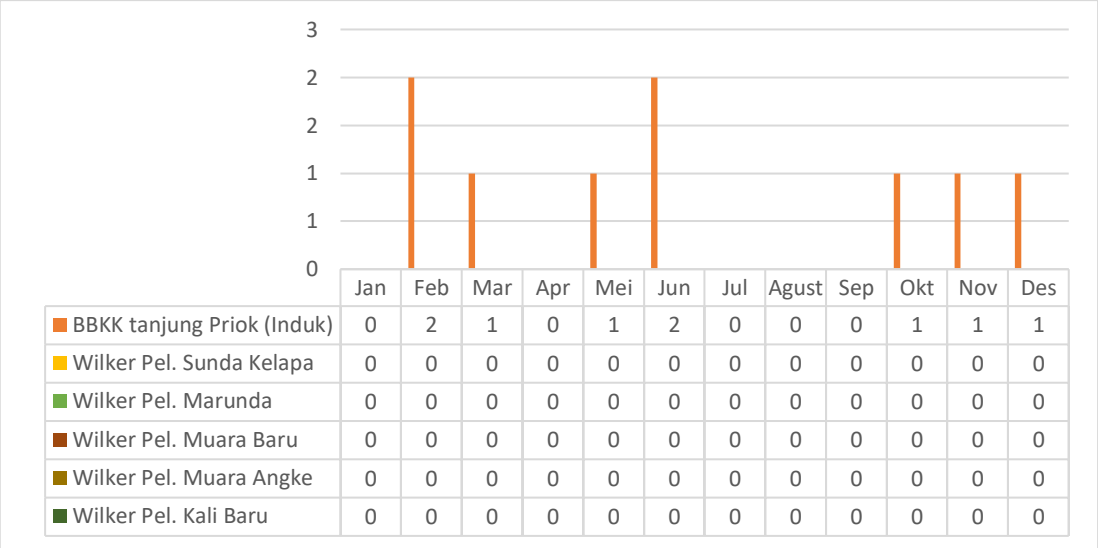
Tidak adanya penerbitan surat izin dapat mengindikasikan rendahnya kejadian yang memerlukan pengangkutan jenazah melalui jalur laut, serta adanya kecenderungan penggunaan moda transportasi lain seperti jalur darat atau udara. Meskipun demikian, layanan ini tetap memerlukan kesiapsiagaan, mengingat sifatnya yang mendesak dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, standar operasional, koordinasi lintas sektor, dan kesiapan sumber daya perlu tetap

dipertahankan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat dan sesuai ketentuan apabila dibutuhkan di kemudian hari.

8. Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit

   Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit merupakan bagian dari pelayanan kekarantinaan kesehatan yang bersifat insidental dan terkait dengan kondisi kedaruratan medis. Diagram berikut menyajikan distribusi penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, sebagai gambaran pelaksanaan layanan tersebut selama periode pelaporan.

Grafik 4. 42 Distribusi Penerbitan Surat Ijin Angkut Orang Sakit BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	0	2	1	0	1	2	0	0	0	1	1	1
Wilker Pel. Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Marunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

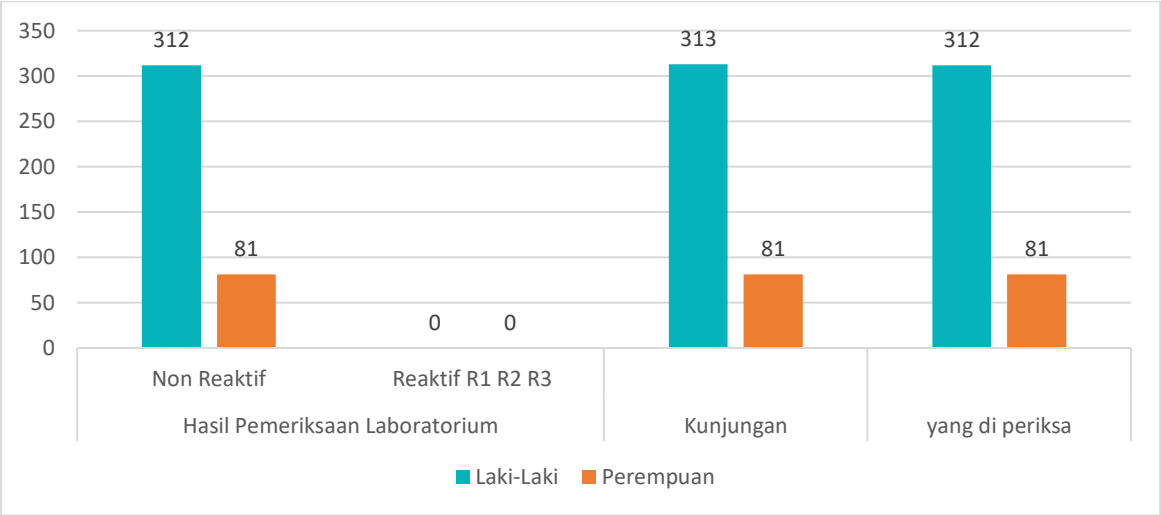
Distribusi penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit sepanjang Tahun 2025 menunjukkan bahwa layanan ini berfrekuensi rendah dengan total penerbitan sebanyak 7 surat, seluruhnya dilaksanakan oleh Kantor Induk BBKK Tanjung Priok. Tidak terdapat penerbitan di wilayah kerja lainnya, yang mengindikasikan bahwa kebutuhan pengangkutan orang sakit melalui jalur laut relatif terbatas atau ditangani melalui moda transportasi dan mekanisme lain.

Ditinjau dari aspek waktu, penerbitan terbanyak terjadi pada bulan Februari sebanyak 2 surat, sementara pada bulan-bulan lainnya berlangsung secara sporadis dan tidak membentuk pola musiman. Meskipun volumenya rendah, layanan ini bersifat darurat dan berisiko tinggi, sehingga kesiapsiagaan petugas, kejelasan alur pelayanan, serta koordinasi lintas sektor perlu tetap dipertahankan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan kesehatan dalam situasi kedaruratan medis.

9. Capaian Skrining HIV/ AIDS

Kegiatan skrining HIV/AIDS melalui layanan VCT bergerak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penularan HIV/AIDS di lingkungan pelabuhan. Diagram berikut menyajikan distribusi capaian skrining HIV/AIDS BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.

Grafik 4. 43 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS berdasarkan Penemuan Kasus Positif BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



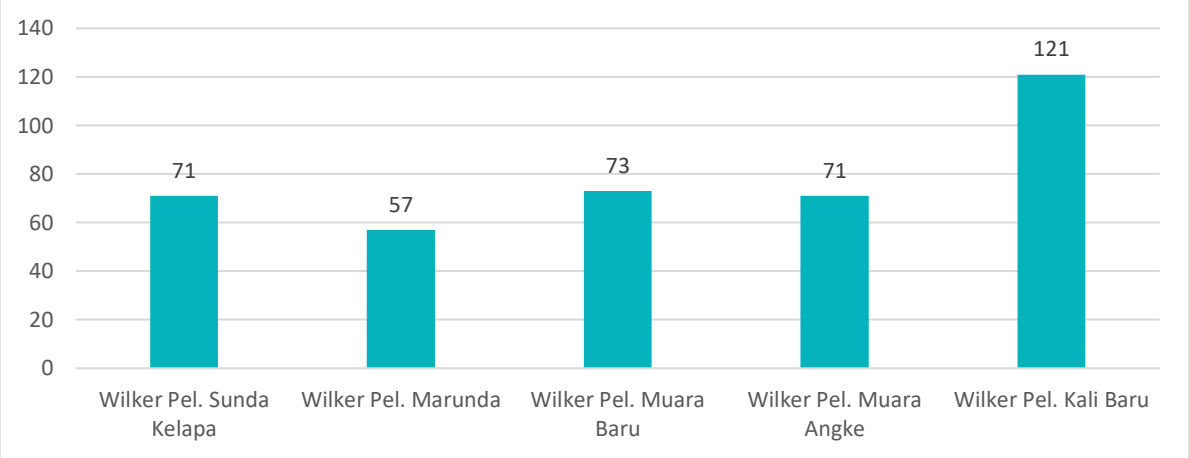
Pelaksanaan skrining HIV/AIDS melalui layanan VCT bergerak merupakan salah satu upaya deteksi dini dan pencegahan penularan HIV/AIDS di lingkungan pelabuhan. Diagram berikut menyajikan distribusi capaian skrining HIV/AIDS BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Sepanjang Tahun 2025, kegiatan skrining HIV/AIDS diikuti oleh 393 orang, dengan peserta didominasi oleh laki-laki sebanyak 312 orang dan perempuan sebanyak 81 orang. Komposisi ini mencerminkan karakteristik kelompok sasaran layanan, khususnya pekerja pelabuhan, awak kapal, dan tenaga kerja sektor maritim yang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dan memiliki mobilitas tinggi.

Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh peserta memperoleh hasil non-reaktif, sehingga tidak ditemukan kasus positif HIV selama periode pelaksanaan skrining. Kondisi ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi awal efektivitas upaya pencegahan dan promosi kesehatan di lingkungan pelabuhan. Namun demikian, mengingat karakteristik kelompok sasaran memiliki potensi risiko tertentu, kegiatan skrining tetap perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan diperluas

cakupannya, disertai penguatan edukasi, konseling pra dan pascapemeriksaan, serta penjangkauan kelompok berisiko.

Grafik 4. 44 Distribusi Capaian Skrining HIV/ AIDS berdasarkan Tempat Pelaksanaan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



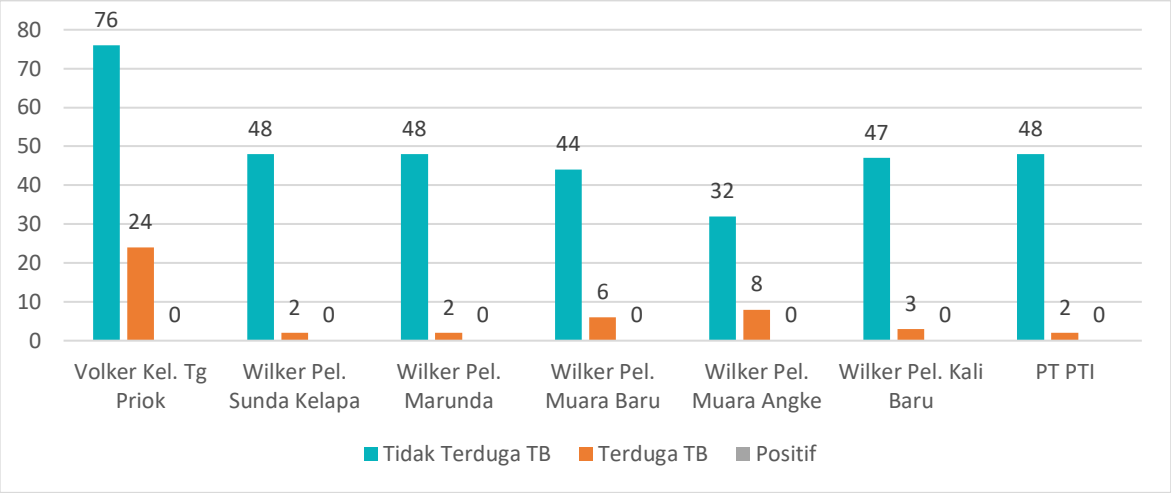
Berdasarkan lokasi pelaksanaan kegiatan, capaian skrining HIV/AIDS tertinggi tercatat di Wilayah Kerja Kali Baru sebanyak 121 orang, yang mencerminkan tingginya aktivitas kelompok sasaran serta penerimaan yang baik terhadap layanan skrining. Sebaliknya, capaian terendah terdapat di Wilayah Kerja Marunda sebanyak 57 orang, yang menunjukkan masih perlunya penguatan akses layanan dan sosialisasi kepada kelompok sasaran setempat.

Perbedaan capaian antarwilayah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan skrining belum merata dan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi skrining yang lebih terarah dan berbasis wilayah, melalui penguatan kegiatan di wilayah dengan capaian rendah serta replikasi praktik baik dari wilayah dengan capaian tinggi, guna meningkatkan pemerataan deteksi dini dan memperkuat upaya pengendalian HIV/AIDS secara berkelanjutan di wilayah kerja BBKK Tanjung Priok.

10. Capaian Layanan Skrining Terduga TB

Skrining terduga tuberkulosis (TB) merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit menular di lingkungan pelabuhan. Diagram berikut menyajikan distribusi layanan skrining terduga TB di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 berdasarkan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Grafik 4. 45 Distribusi Layanan Skrining Terduga TB BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Sebanyak 47 orang teridentifikasi sebagai terduga TB, dengan jumlah terbanyak berasal dari wilayah Induk (Jalan Volker, Kelurahan Tanjung Priok) sebanyak 8 orang. Konsentrasi temuan di wilayah Induk mencerminkan tingginya intensitas penjangkauan sasaran dan aktivitas skrining di lokasi tersebut, sehingga meningkatkan peluang deteksi dini.

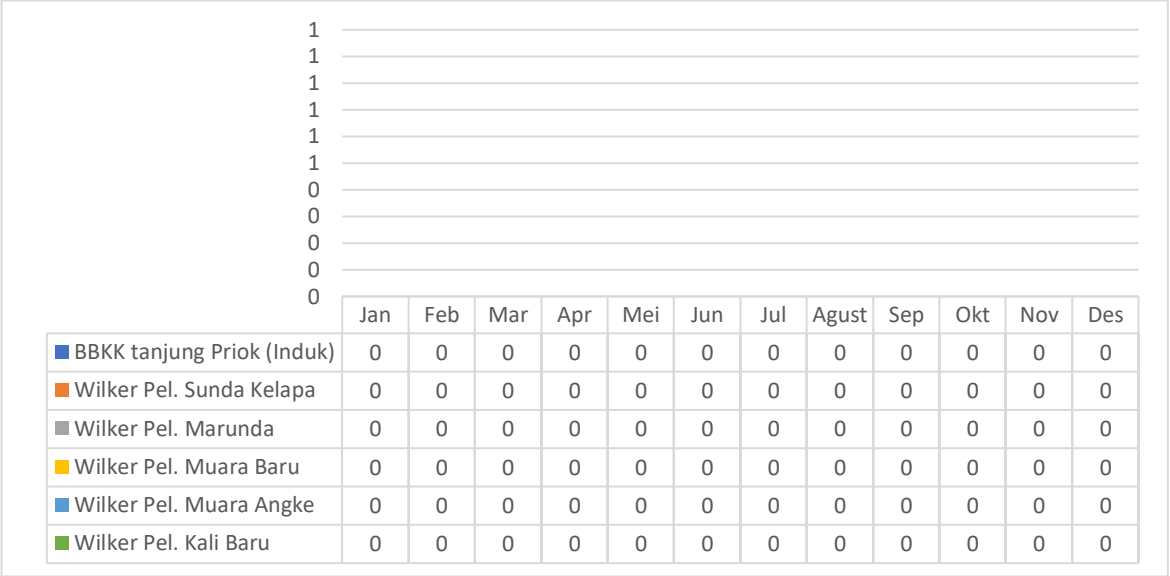
Seluruh terduga TB telah menjalani pemeriksaan lanjutan berupa Tes Cepat Molekuler (TCM) oleh petugas puskesmas kecamatan setempat, dengan hasil tidak ditemukan kasus TB positif. Meskipun demikian, pelaksanaan skrining tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat karakteristik lingkungan pelabuhan yang memiliki mobilitas tinggi dan potensi risiko penularan.

Secara keseluruhan, layanan skrining TB telah berjalan dengan baik sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. Namun, diperlukan penguatan penjangkauan kelompok berisiko, peningkatan kewaspadaan petugas, serta kesinambungan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat guna menjaga kesiapsiagaan terhadap potensi munculnya kasus TB di wilayah pelabuhan.

11. Pertolongan Gawat Darurat

Pelayanan pertolongan gawat darurat merupakan bagian dari kesiapsiagaan kesehatan di lingkungan pelabuhan. Diagram berikut menyajikan distribusi kejadian pertolongan gawat darurat di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan layanan tersebut selama periode pelaporan.

Grafik 4. 46 Distribusi Pertolongan Gawat Darurat BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Marunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

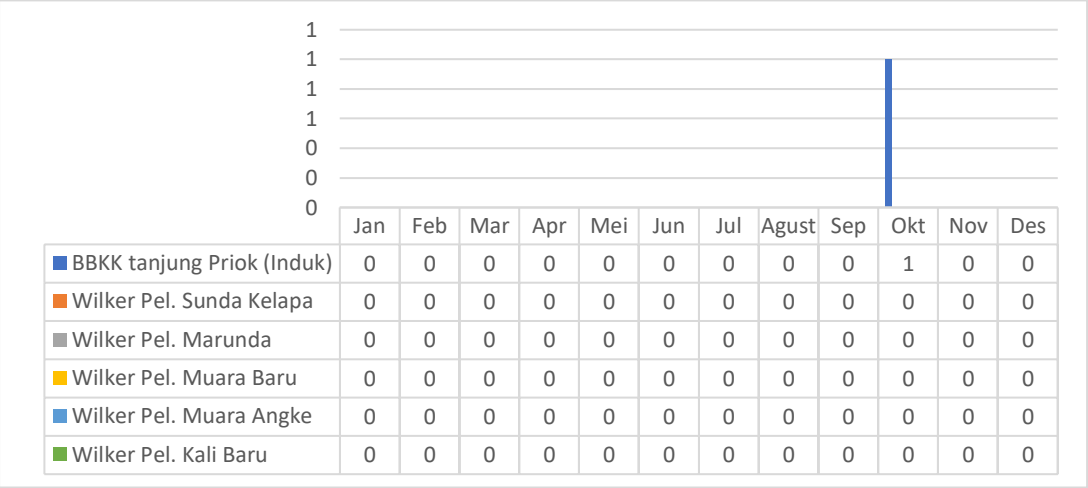
Sepanjang Tahun 2025 tidak tercatat kejadian kegawatdaruratan yang memerlukan tindakan pertolongan gawat darurat, baik di Kantor Induk BBKK Tanjung Priok maupun di seluruh wilayah kerja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa situasi operasional pelabuhan relatif aman dan terkendali, serta mencerminkan efektivitas upaya pencegahan dan pengawasan kesehatan yang telah dilaksanakan.

Meskipun tidak terdapat kejadian, kesiapsiagaan tetap harus dipertahankan mengingat pertolongan gawat darurat merupakan layanan kritis yang bersifat insidental dan berisiko tinggi. Oleh karena itu, standar operasional, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, serta koordinasi lintas sektor perlu terus dijaga dan diuji secara berkala agar BBKK Tanjung Priok tetap mampu memberikan respons cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat kesehatan di kemudian hari.

12. Pelayanan Rujukan

Pelayanan rujukan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan berjenjang dalam penanganan kasus yang memerlukan tindak lanjut medis lanjutan. Diagram berikut menyajikan distribusi pelayanan rujukan di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 sebagai gambaran pelaksanaan layanan tersebut selama periode pelaporan.

Grafik 4. 47 Distribusi Pelayanan Rujukan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
BBKK tanjung Priok (Induk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Wilker Pel. Sunda Kelapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Marunda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Muara Angke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wilker Pel. Kali Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Selama Tahun 2025 tercatat hanya 1 (satu) penerbitan surat rujukan, yang seluruhnya dilakukan oleh Kantor Induk BBKK Tanjung Priok, tanpa adanya penerbitan rujukan di wilayah kerja lainnya. Rendahnya jumlah rujukan menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kesehatan yang ditangani dapat diselesaikan di fasilitas pelayanan BBKK Tanjung Priok melalui layanan kesehatan dasar dan penanganan awal yang memadai.

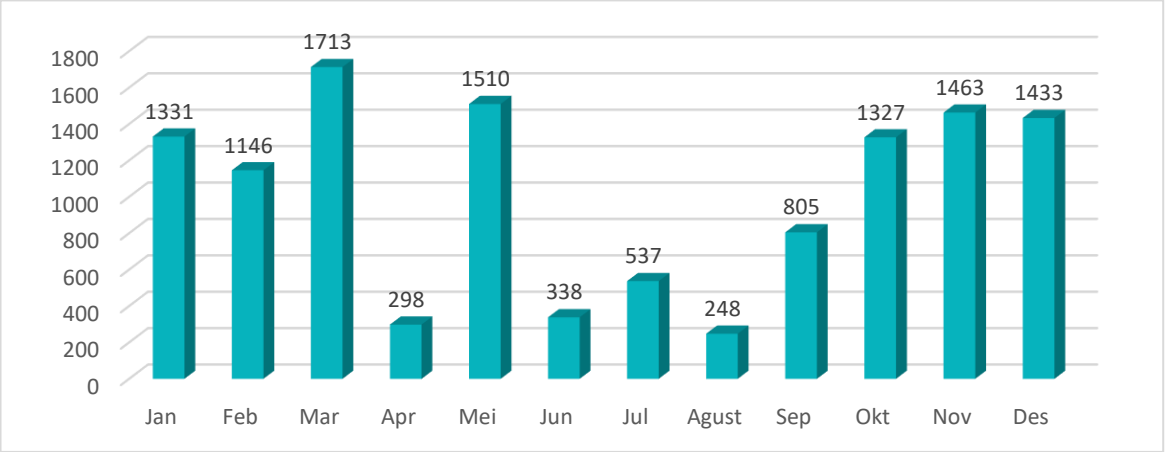
Meskipun frekuensi rujukan sangat rendah, pelayanan rujukan tetap merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kesiapan sistem rujukan, kejelasan alur pelayanan, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan rujukan perlu terus dipertahankan guna menjamin kesinambungan pelayanan dan keselamatan pasien apabila diperlukan penanganan medis lanjutan di kemudian hari.

13. Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV)

Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) di Klinik BBKK Tanjung Priok merupakan bagian dari pelayanan vaksinasi internasional kepada pelaku perjalanan luar negeri. Data penerbitan ICV digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan layanan klinik serta dinamika permintaan vaksinasi internasional sepanjang Tahun 2025.

Data penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV/e-ICV) ini hanya mencakup penerbitan yang dilakukan langsung oleh Klinik BBKK Tanjung Priok kepada akseptor yang memperoleh layanan vaksinasi di klinik, dan tidak termasuk penerbitan melalui klinik atau rumah sakit binaan. Dengan demikian, data ini merefleksikan secara langsung tingkat pemanfaatan layanan klinik BBKK Tanjung Priok.

Grafik 4. 48 Distribusi Penerbitan ICV BBKK Tanjung Priok tahun 2025



Data penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV/e-ICV) ini berbeda dengan data penerbitan ICV sebelumnya, karena hanya mencakup penerbitan yang dilakukan langsung oleh Klinik BBKK Tanjung Priok kepada akseptor yang datang dan memperoleh layanan vaksinasi di klinik. Data ini tidak termasuk penerbitan ICV yang dilakukan melalui distribusi ke klinik atau rumah sakit binaan.

Sepanjang Tahun 2025, penerbitan ICV tertinggi tercatat pada bulan Maret sebanyak 1.713 sertifikat, yang mencerminkan meningkatnya kunjungan akseptor dan kebutuhan vaksinasi internasional pada periode tersebut. Sebaliknya, penerbitan terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 248 sertifikat, yang mengindikasikan penurunan kunjungan akseptor, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman, pola perjalanan internasional, atau pemanfaatan layanan vaksinasi di fasilitas kesehatan lain.

Secara keseluruhan, distribusi penerbitan ICV ini memberikan gambaran nyata mengenai fluktuasi pemanfaatan layanan klinik BBKK Tanjung Priok dan menjadi dasar penting dalam evaluasi kinerja pelayanan, perencanaan kebutuhan sumber daya, serta penyesuaian kapasitas layanan agar mampu merespons dinamika permintaan secara efektif dan berkelanjutan.

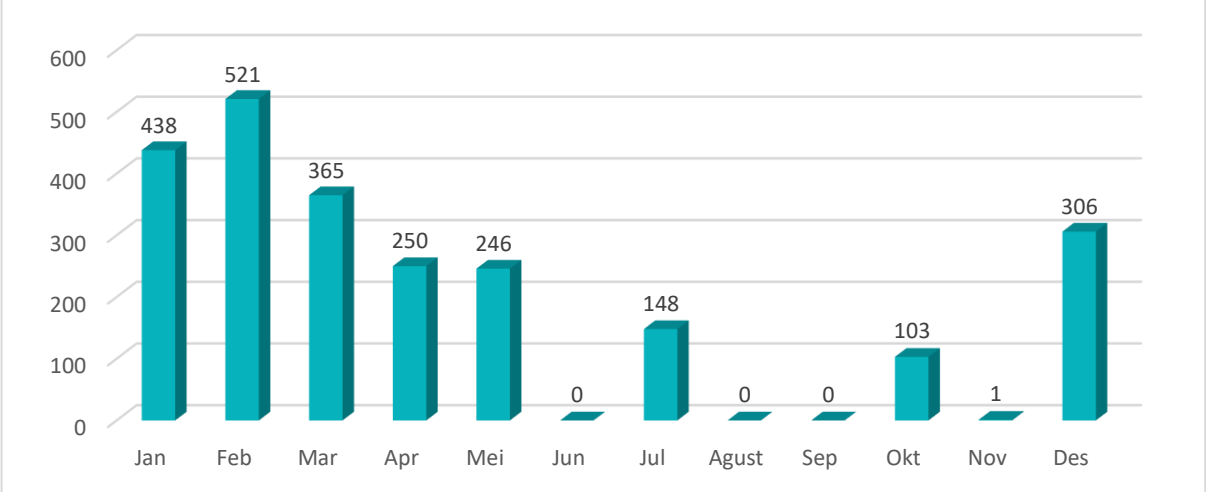
14. Pemakaian Vaksin Yellow Fever

Pemakaian vaksin Yellow Fever merupakan salah satu indikator penting dalam pelayanan vaksinasi internasional di BBKK Tanjung Priok. Pola pemakaian vaksin sepanjang Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai tingkat kebutuhan layanan

vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional serta keterkaitannya dengan ketersediaan stok vaksin.

Sepanjang tahun 2025, pemakaian vaksin Yellow Fever menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarbulan, yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan stok vaksin. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesinambungan pasokan vaksin memiliki peran krusial dalam menjaga keberlangsungan pelayanan vaksinasi internasional di BBKK Tanjung Priok.

Grafik 4. 49 Distribusi Pemakaian Vaksin Yellow Fever BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

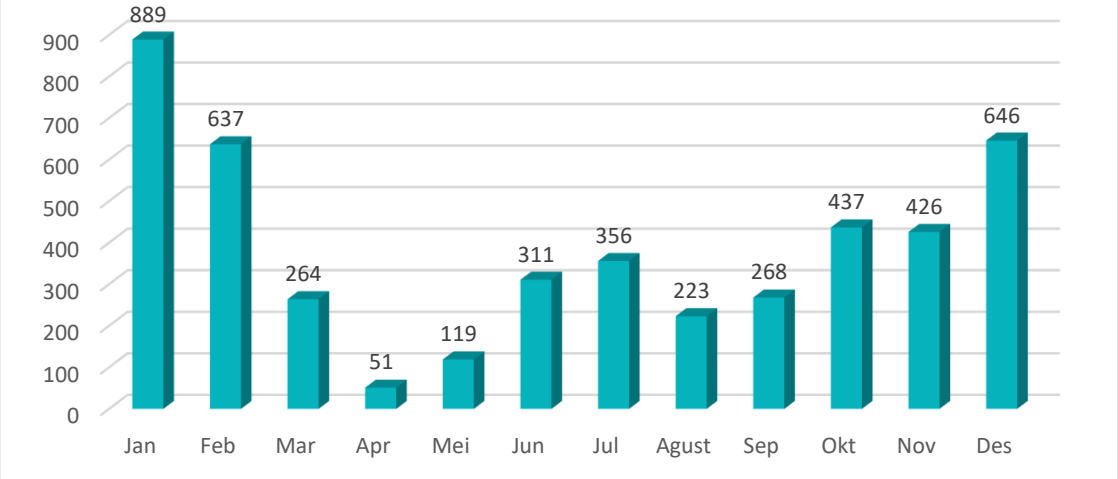


Pemakaian vaksin Yellow Fever sepanjang Tahun 2025 menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh ketersediaan stok. Pemakaian tertinggi terjadi pada bulan Februari sebanyak 521 dosis, diikuti Januari dan Maret, yang mencerminkan tingginya kebutuhan vaksinasi pada awal tahun seiring meningkatnya mobilitas perjalanan internasional. Pemakaian menurun pada bulan April dan Mei, dan pada bulan Juni, Agustus, serta September tidak tercatat pemakaian karena stok vaksin dalam kondisi kosong.

Pelayanan vaksinasi kembali berjalan secara terbatas pada bulan Juli dan Oktober setelah adanya relokasi vaksin, sementara pada bulan November pemakaian sangat minimal akibat keterbatasan stok. Pada bulan Desember 2025, BBKK Tanjung Priok menerima distribusi vaksin Yellow Fever dari pusat sehingga pelayanan kembali berjalan lebih optimal. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa kesinambungan pasokan vaksin menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan pelayanan vaksinasi internasional.

15. Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus*

Grafik 4. 50 Distribusi Pemakaian Vaksin Meningitis *Meningococcus* BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Berdasarkan diagram distribusi pemakaian vaksin Meningitis Meningokokus di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, terlihat bahwa pemakaian vaksin mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Pemakaian vaksin tertinggi tercatat pada bulan Januari sebanyak 889 dosis, yang mencerminkan tingginya kebutuhan vaksinasi pada awal tahun, terutama bagi pelaku perjalanan internasional dan kelompok tertentu yang memerlukan vaksin Meningitis Meningokokus sebagai persyaratan kesehatan.

Sementara itu, pemakaian vaksin terendah terjadi pada bulan April dengan jumlah 51 dosis. Penurunan signifikan pada periode tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor musiman, pola perjalanan masyarakat, serta kemungkinan penurunan permintaan layanan vaksinasi pada bulan tersebut.

Setelah bulan April, pemakaian vaksin menunjukkan kecenderungan meningkat kembali secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya, dengan peningkatan yang cukup nyata pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pada bulan Desember, pemakaian vaksin tercatat sebanyak 646 dosis, yang mengindikasikan meningkatnya kebutuhan vaksinasi menjelang akhir tahun seiring dengan meningkatnya mobilitas perjalanan dan persiapan keberangkatan internasional.

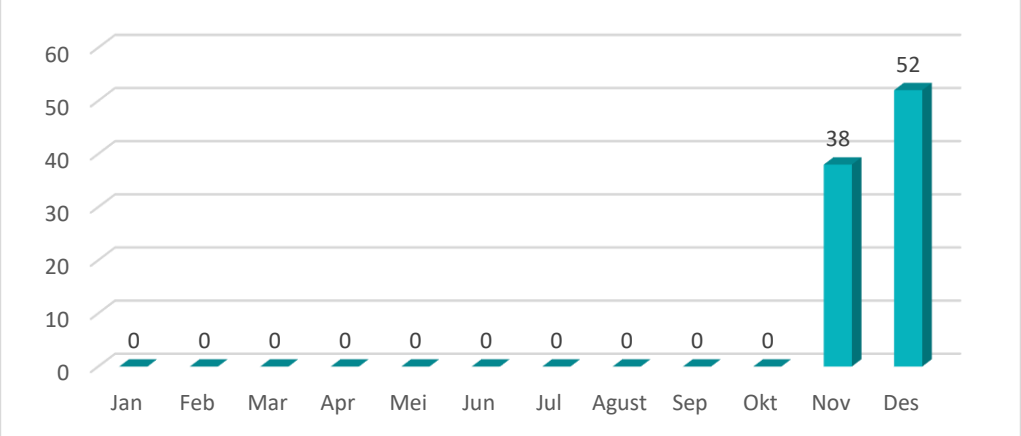
Secara keseluruhan, data pemakaian vaksin Meningitis Meningokokus menunjukkan bahwa permintaan layanan vaksinasi dipengaruhi oleh dinamika mobilitas masyarakat dan pola perjalanan internasional. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik vaksin yang berbasis tren bulanan

agar ketersediaan vaksin tetap terjaga dan pelayanan vaksinasi dapat berlangsung secara optimal sepanjang tahun.

16. Pemakaian Vaksin Influenza

Pelayanan vaksinasi Influenza di BBKK Tanjung Priok merupakan layanan yang pelaksanaannya bergantung pada penerimaan pasokan vaksin dari pusat dan tidak berlangsung secara kontinu. Vaksin Influenza memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit saluran pernapasan, khususnya bagi pelaku perjalanan internasional, termasuk masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah.

Grafik 4. 51 Distribusi Pemakaian Vaksin Influenza BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Berdasarkan diagram distribusi pemakaian vaksin Influenza di BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, diketahui bahwa pemakaian vaksin Influenza hanya tercatat pada dua bulan terakhir tahun 2025. Pemakaian vaksin terbanyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 52 dosis, sedangkan pada bulan November tercatat pemakaian sebanyak 38 dosis.

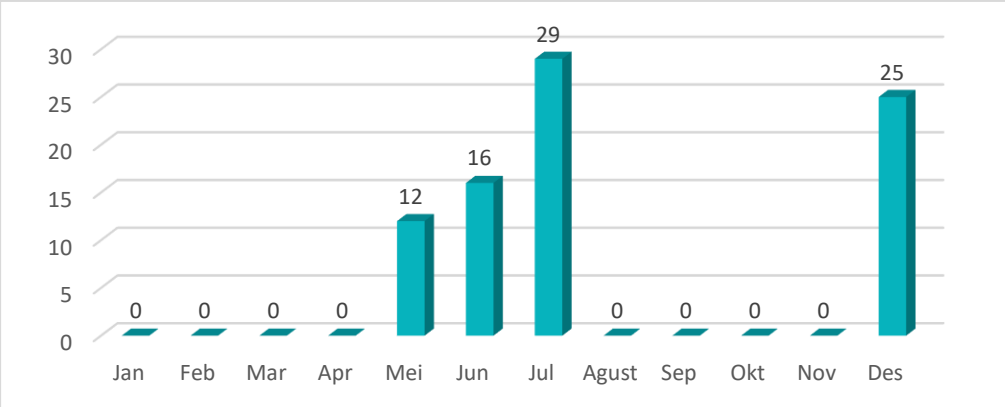
Pada periode Januari sampai dengan Oktober 2025 tidak terdapat pemakaian vaksin Influenza, yang menunjukkan bahwa layanan vaksinasi Influenza belum dilaksanakan atau belum tersedia pada periode tersebut. Mulainya pemakaian vaksin pada akhir tahun mengindikasikan adanya kebutuhan vaksinasi Influenza yang meningkat menjelang akhir tahun, kemungkinan terkait dengan kesiapan perjalanan, kondisi musiman, atau tersedianya stok vaksin pada periode tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa pemakaian vaksin Influenza di BBKK Tanjung Priok masih bersifat terbatas dan belum merata sepanjang tahun. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap perencanaan ketersediaan vaksin dan strategi pelayanan agar layanan vaksinasi Influenza dapat dilaksanakan secara lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

17. Pemakaian Vaksin Thypoid

Pemakaian vaksin Tifoid di BBKK Tanjung Priok merupakan bagian dari pelayanan vaksinasi yang bersifat selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu. Distribusi pemakaian vaksin Tifoid sepanjang Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai pola permintaan layanan serta waktu pelaksanaan vaksinasi yang tidak berlangsung secara rutin.

Grafik 4. 52 Distribusi Pemakaian Vaksin Thypoid BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Sepanjang Tahun 2025, pemakaian vaksin Tifoid di BBKK Tanjung Priok hanya tercatat pada beberapa bulan tertentu, dengan pemakaian tertinggi pada bulan Juli sebanyak 29 dosis, diikuti bulan Desember sebanyak 25 dosis, serta bulan Mei dan Juni masing-masing sebanyak 12 dan 16 dosis. Tidak tercatat pemakaian vaksin pada bulan Januari hingga April serta bulan Agustus hingga November, yang menunjukkan bahwa pelayanan vaksinasi Tifoid tidak berlangsung secara kontinu.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan vaksin, sehingga pelayanan hanya dapat dilakukan pada periode tertentu ketika stok tersedia. Di sisi lain, vaksin Tifoid merupakan salah satu persyaratan kesehatan bagi awak kapal yang akan berlayar, sehingga kebutuhan terhadap vaksin ini relatif tinggi. Selain itu, biaya vaksin Tifoid yang lebih terjangkau dibandingkan beberapa jenis vaksin lainnya menjadikan vaksin ini cukup diminati oleh masyarakat dan pelaku pelayaran. Pola ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dan ketersediaan pasokan.

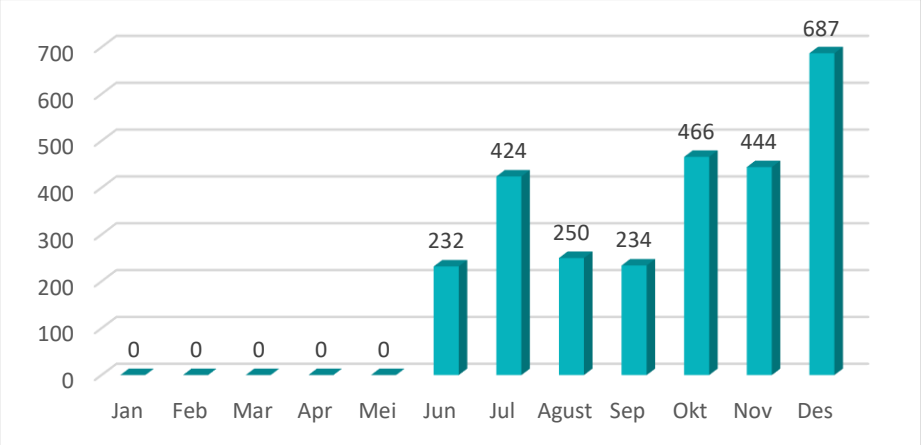
Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan logistik vaksin Tifoid agar ketersediaan vaksin dapat lebih terjamin, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih terjadwal, responsif terhadap kebutuhan awak kapal dan masyarakat, serta berkelanjutan sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan ketersediaan dan strategi pelayanan vaksin Tifoid agar pelaksanaannya dapat lebih terjadwal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.

18. Pemakaian Vaksin Polio

Pemakaian vaksin Polio merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit menular yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan layanan dan kebijakan program kesehatan. Distribusi pemakaian vaksin Polio di BBKK Tanjung Priok sepanjang Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai waktu pelaksanaan vaksinasi serta dinamika kebutuhan layanan di wilayah pelabuhan.

Grafik 4. 53 Distribusi Pemakaian Vaksin Polio BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Sepanjang Tahun 2025, pemakaian vaksin Polio belum tercatat pada periode Januari hingga Mei, yang menunjukkan belum adanya kebutuhan layanan atau belum dimulainya pelaksanaan vaksinasi pada awal tahun. Pemakaian mulai tercatat pada bulan Juni sebanyak 232 dosis dan meningkat signifikan pada bulan Juli menjadi 424 dosis, yang menandai dimulainya pelaksanaan vaksinasi Polio secara aktif.

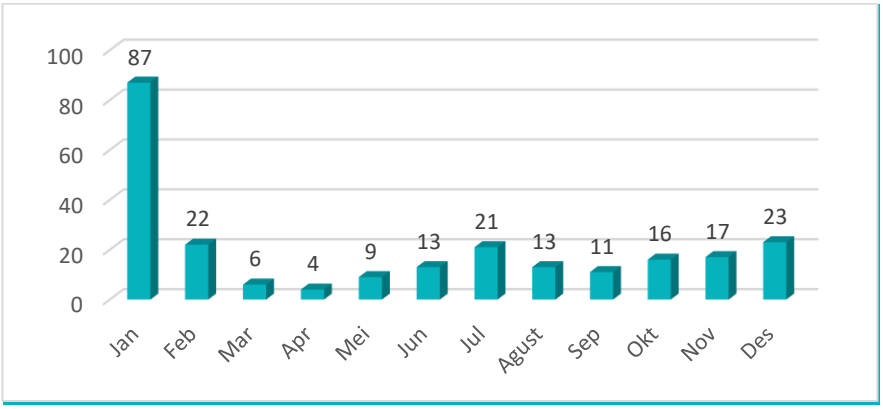
Pada bulan Agustus hingga September, pemakaian relatif stabil dengan kisaran 234–250 dosis. Memasuki triwulan IV, pemakaian kembali meningkat, terutama pada bulan Oktober sebanyak 466 dosis dan November sebanyak 444 dosis, dengan puncak pemakaian pada bulan Desember sebanyak 687 dosis. Pola ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi Polio terkonsentrasi pada semester II dengan tren peningkatan menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, distribusi pemakaian vaksin Polio Tahun 2025 mencerminkan respons pelayanan BBKK Tanjung Priok terhadap meningkatnya kebutuhan vaksinasi pada paruh kedua tahun. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pengadaan vaksin, pengelolaan rantai dingin, serta pengaturan sumber

daya manusia agar pelayanan vaksinasi dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

19. Penerbitan SKPK/ KIR

Grafik 4. 54 Distirbusi Penerbitan SKPK/KIR BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



Berdasarkan distribusi penerbitan SKPK/KIR BBKK Tanjung Priok Tahun 2025, terlihat adanya fluktuasi signifikan jumlah penerbitan sepanjang tahun. Penerbitan tertinggi terjadi pada bulan Januari (87 sertifikat), yang menunjukkan tingginya permintaan layanan pada awal tahun. Kondisi ini diduga berkaitan dengan akumulasi kebutuhan layanan dari akhir tahun sebelumnya, peningkatan aktivitas pelayaran internasional, serta percepatan pemenuhan dokumen kesehatan awak dan sarana angkut pada awal periode operasional tahunan.

Sebaliknya, penerbitan terendah terjadi pada bulan April (4 sertifikat), yang mengindikasikan adanya penurunan aktivitas layanan. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian ritme operasional layanan, potensi hari libur nasional dan cuti bersama, serta kemungkinan berkurangnya mobilitas sarana angkut pada periode tersebut.

Memasuki pertengahan tahun, jumlah penerbitan menunjukkan tren peningkatan bertahap pada bulan Mei hingga Juli, mencerminkan mulai stabilnya permintaan layanan SKPK/KIR seiring dengan meningkatnya kembali aktivitas kepelabuhanan. Meskipun terjadi penurunan ringan pada bulan Agustus dan September, penerbitan kembali meningkat pada triwulan IV (Oktober–Desember), yang mengindikasikan pemulihan dan penguatan kinerja layanan menjelang akhir tahun.

Secara keseluruhan, pola penerbitan SKPK/KIR Tahun 2025 menunjukkan bahwa kinerja pelayanan BBKK Tanjung Priok responsif terhadap dinamika aktivitas pelabuhan dan kebutuhan pengguna jasa. Fluktuasi yang terjadi menjadi dasar penting

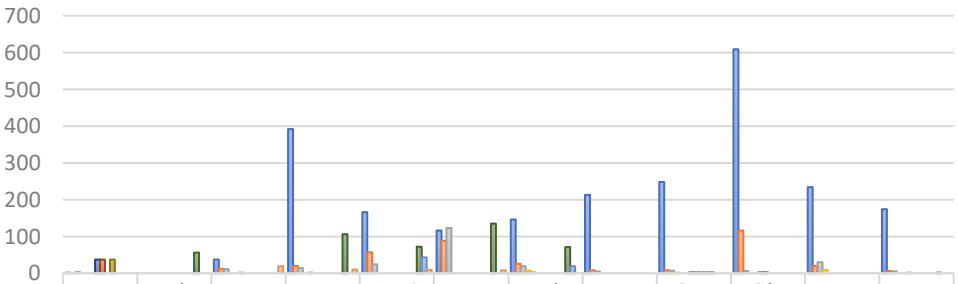
bagi perencanaan peningkatan kapasitas layanan, penyesuaian sumber daya manusia, serta optimalisasi manajemen waktu pelayanan pada periode dengan lonjakan permintaan, khususnya pada awal dan akhir tahun.

20. Pemeriksaan Laboratorium

Rekapitulasi pemeriksaan laboratorium klinik BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 menunjukkan bahwa pelayanan laboratorium memiliki peran strategis dalam mendukung deteksi dini penyakit dan pengawasan kesehatan di wilayah pelabuhan. Jenis pemeriksaan yang dilakukan sepanjang tahun mencerminkan fokus pelayanan pada penyakit menular prioritas dan penyakit tidak menular yang berpotensi memengaruhi kebugaran dan keselamatan pelaku perjalanan serta awak kapal.

Dominasi pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), skrining HIV, dan Asam Urat menunjukkan tingginya kebutuhan pemantauan kondisi kesehatan metabolik dan deteksi dini penyakit menular. Tingginya pemeriksaan GDS juga berkaitan erat dengan pelaksanaan Program Pemerintah Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang mendorong peningkatan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di berbagai kelompok masyarakat.

Grafik 4. 55 Rekapitulasi Pemeriksaan Laboratorium Klinik BBKK Tanjung Priok Tahun 2025



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des
GDS	1	0	37	392	166	116	146	213	248	609	234	174
CHOLESTEROL	0	0	12	20	57	88	26	8	8	116	20	6
AS URAT	3	0	11	14	24	123	19	5	7	6	30	5
Lipid Panel	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	9	0
DARAH LENGKAP	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0
HCG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	1
Methampetamine	37	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
Cocain	37	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Benzodiazepine	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
THC	37	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Morphine	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
HIV	0	56	0	106	72	135	71	0	0	0	0	1
SIFILIS	0	0	0	0	43	0	19	0	0	0	0	0
TB	0	0	19	10	9	8	0	0	0	0	0	0

Berdasarkan distribusi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap total pemeriksaan sepanjang Tahun 2025, dengan peningkatan yang terutama terlihat pada paruh kedua tahun. Tingginya jumlah pemeriksaan GDS tersebut berkaitan dengan peran aktif BBKK Tanjung Priok dalam mendukung dan menyukseskan Program Pemerintah Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui pelaksanaan kegiatan penjangkauan dan skrining kesehatan kepada masyarakat sasaran di wilayah pelabuhan. Pemeriksaan dilakukan secara terencana oleh petugas, sehingga peningkatan jumlah pemeriksaan lebih mencerminkan intensifikasi kegiatan pelayanan dan program pemerintah, bukan semata inisiatif kunjungan individu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan laboratorium BBKK Tanjung Priok tidak hanya bersifat responsif terhadap permintaan layanan, tetapi juga berperan aktif dalam pelaksanaan program kesehatan nasional. Data pemeriksaan GDS tersebut menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan CKG di wilayah kerja, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan reagen, bahan habis pakai, serta pengaturan kapasitas layanan laboratorium agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

4.1.5 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN LAYANAN PUBLIK DAN ZONA INTEGRITAS

Pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas Tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BBKK Tanjung Priok. Pada Tahun Anggaran 2025, Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp187.828.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp181.126.187 atau mencapai 97% dari total pagu yang tersedia. Capaian realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan secara umum telah berjalan efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Realisasi anggaran digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengelolaan pengaduan masyarakat, pengembangan inovasi pelayanan, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas. Pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Publik Kekarantinaan Kesehatan

Kegiatan sosialisasi dan diseminasi layanan publik kekarantinaan kesehatan merupakan salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Melalui kegiatan ini, Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas berupaya memastikan bahwa seluruh pengguna layanan dan pemangku kepentingan memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terkini mengenai standar pelayanan, prosedur layanan, persyaratan, jangka waktu pelayanan, mekanisme pengaduan, serta inovasi layanan yang tersedia. Sosialisasi dan diseminasi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan budaya pelayanan prima kepada masyarakat maupun petugas penyelenggara layanan.

Dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap layanan yang diberikan, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, responsif, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kegiatan ini mendukung pencapaian indikator kinerja Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kepuasan masyarakat, serta implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan BBKK Tanjung Priok.

Input:

a) Anggaran Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.
b) Regulasi dan kebijakan terkait pelayanan publik, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas.
c) Narasumber dan petugas yang memahami layanan publik dan pembangunan Zona Integritas.
d) Materi sosialisasi terkait standar pelayanan, maklumat pelayanan, inovasi layanan, pengelolaan pengaduan, serta pembangunan WBK.
e) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
f) Media komunikasi dan publikasi (media sosial, website, banner, leaflet, video informasi, dan lainnya).
g) Peserta yang terdiri dari pengguna layanan, instansi terkait, mitra kerja, dan masyarakat.

Output:

a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan diseminasi layanan publik kekarantinaan kesehatan kepada pengguna layanan dan pemangku kepentingan.
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap standar pelayanan, prosedur layanan, dan hak serta kewajiban pengguna layanan.
c. Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan mengenai pembangunan Zona Integritas dan budaya anti korupsi.
d. Tersedianya media informasi layanan publik yang informatif, transparan, dan mudah diakses.
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, pengaduan, dan evaluasi terhadap pelayanan.
f. Meningkatnya nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan persepsi kualitas pelayanan.
g. Meningkatnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
h. Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pagu Anggaran: Rp 2.490.000,-, Realisasi Anggaran: Rp 0, Sisa Anggaran: Rp2.400.000,-
.

2. Pembangunan Zona Integriras menuju satker WBK, Penguatan dan pendampingan assesment Penilaian Satker WBKWBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan upaya sistematis yang dilaksanakan oleh BBKK Tanjung Priok untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Melalui pembangunan Zona Integritas, seluruh unsur organisasi didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi. Kegiatan ini mencakup penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen seluruh pegawai dan dukungan pemangku kepentingan, pembangunan Zona Integritas diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta menjadi fondasi dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Input:

a) Anggaran pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
b) Regulasi dan pedoman pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
c) Tim Kerja Zona Integritas dan pimpinan unit kerja.
d) Dokumen eviden enam area perubahan.
e) Data dukung capaian kinerja dan pelayanan publik.
f) Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
g) Komitmen dan partisipasi seluruh pegawai.

Output:

a) Terlaksananya program pembangunan Zona Integritas sesuai rencana kerja.
b) Terpenuhinya eviden enam area perubahan pembangunan Zona Integritas.
c) Meningkatnya penerapan budaya kerja berintegritas dan anti korupsi.
d) Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi dan pelayanan publik.
e) Meningkatnya nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.
f) Terwujudnya kesiapan satuan kerja dalam mengikuti penilaian WBK/WBBM. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BBKK Tanjung Priok.

Pagu Anggaran: Rp 14.742.000,-, Realisasi Anggaran: Rp 13.109.314,-, Sisa Anggaran: Rp 1.632.686,-.

3. Sosialisasi Penanganan Pengaduan

Kegiatan Sosialisasi Penanganan Pengaduan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pengguna layanan, serta pegawai mengenai mekanisme penyampaian, pengelolaan, dan tindak lanjut pengaduan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna layanan mengetahui haknya dalam menyampaikan keluhan, saran, apresiasi, maupun pengaduan atas pelayanan yang diterima melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Selain itu, sosialisasi ini juga mendorong terciptanya budaya pelayanan yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat, tepat, dan profesional. Melalui sosialisasi penanganan pengaduan, BBKK Tanjung Priok berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi, serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Input:

a. Anggaran kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan.
b. Regulasi dan pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
c. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.
d. Narasumber atau petugas pengelola pengaduan.
e. Materi sosialisasi mengenai mekanisme dan alur penanganan pengaduan.
f. Media informasi dan publikasi (website, media sosial, banner, leaflet, video informasi, dan kanal pengaduan).
g. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
h. Peserta yang terdiri dari pegawai, pengguna layanan, dan pemangku kepentingan.

Output:

a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan kepada pegawai dan pengguna layanan.
b. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian pengaduan, saran, dan masukan terhadap pelayanan publik.
c. Meningkatnya pemahaman petugas terhadap prosedur pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan.
d. Tersosialisasikannya berbagai kanal pengaduan yang tersedia di BBKK Tanjung Priok.
e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik terhadap kualitas pelayanan.
f. Meningkatnya kecepatan dan kualitas tindak lanjut atas pengaduan yang diterima.
g. Terwujudnya pengelolaan pengaduan yang transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik.
h. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penguatan aspek pengawasan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pagu Anggaran: Rp 6.480.000,-; Realisasi Anggaran: Rp 6.459.000,-; dan Sisa Anggaran: Rp 21.000,-.

4. Website dan Buletin

Pengelolaan website dan buletin merupakan salah satu kegiatan strategis Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok dalam mendukung keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Website berfungsi sebagai media informasi resmi yang menyediakan berbagai informasi terkait layanan kekarantinaan kesehatan, standar pelayanan, persyaratan layanan, inovasi pelayanan,

publikasi kegiatan, pengumuman, serta kanal pengaduan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara itu, buletin menjadi sarana publikasi yang memuat informasi mengenai capaian kinerja, inovasi, edukasi kesehatan, kegiatan pelayanan, serta perkembangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan BBKK Tanjung Priok. Melalui pengelolaan website dan penerbitan buletin secara berkala, diharapkan informasi dapat tersampaikan secara cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Input:

a) Anggaran pengelolaan website dan penerbitan buletin.
b) Tim pengelola website dan penyusun buletin.
c) Data dan informasi kegiatan dari seluruh tim kerja.
d) Materi publikasi layanan publik, Zona Integritas, dan kegiatan kekarantinaan kesehatan.
e) Perangkat teknologi informasi dan jaringan internet.
f) Aplikasi atau sistem pengelolaan website.
g) Dokumentasi kegiatan, foto, dan artikel pendukung.
h) Regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.

Output:

a) Terkelolanya website BBKK Tanjung Priok secara aktif dan berkelanjutan.
b) Terpublikasinya informasi layanan publik, kegiatan, dan kebijakan secara tepat waktu melalui website.
c) Terbitnya buletin BBKK Tanjung Priok secara berkala.
d) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pelayanan dan kekarantinaan kesehatan.
e) Tersedianya media publikasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi.
f) Meningkatnya diseminasi informasi mengenai pembangunan Zona Integritas dan budaya anti korupsi.
g) Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
h) Terdokumentasinya capaian kinerja dan inovasi BBKK Tanjung Priok sebagai bahan evaluasi dan publikasi institusi.

Pagu Anggaran: Rp 10.500.000,-; Realisasi Anggaran: Rp 9.850.000,- dan Sisa Anggaran: Rp 200.000,-.

5. Bahan Pendukung Media Advokasi Kekarantinaan

Penyusunan dan pengadaan bahan pendukung media advokasi kekarantinaan kesehatan merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok untuk meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi, edukasi, dan promosi kesehatan kepada masyarakat, pengguna jasa, serta pemangku kepentingan. Media advokasi berfungsi sebagai sarana komunikasi yang mampu menyampaikan pesan-pesan kekarantinaan kesehatan secara jelas, menarik, dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Bahan pendukung media advokasi dapat berupa banner, spanduk, leaflet, brosur, poster, standing banner, video edukasi, infografis, konten media sosial, dan media komunikasi lainnya yang memuat informasi mengenai pencegahan penyakit, persyaratan layanan kekarantinaan kesehatan, kewaspadaan terhadap faktor risiko kesehatan, serta kebijakan terbaru di bidang kekarantinaan kesehatan. Kegiatan ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan pembangunan Zona Integritas melalui penyediaan informasi yang transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Input:

a) Anggaran penyusunan dan pengadaan media advokasi.
b) Tim penyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE).
c) Data dan informasi terkait kekarantinaan kesehatan serta pelayanan publik.
d) Desain grafis, konten edukasi, dan materi promosi kesehatan.
e) Perangkat teknologi informasi dan perangkat desain.
f) Regulasi dan kebijakan terkait kekarantinaan kesehatan.
g) Sarana dan prasarana pendukung publikasi dan distribusi media.
h) Koordinasi dengan unit kerja terkait dan pemangku kepentingan.

Output:

a) Tersusunnya materi advokasi kekarantinaan kesehatan yang informatif dan sesuai kebutuhan.
b) Tercetak dan terdistribusinya media advokasi seperti leaflet, brosur, poster, banner, dan media cetak lainnya.
c) Tersedianya media digital berupa infografis, video edukasi, dan konten media sosial.

d) Meningkatnya jumlah publikasi informasi kekarantinaan kesehatan kepada masyarakat dan pengguna jasa.
e) Tersedianya media informasi yang mendukung pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan promosi kesehatan.
f) Meningkatnya penyebarluasan informasi terkait layanan publik dan kebijakan kekarantinaan kesehatan.
g) Terdokumentasinya seluruh media advokasi sebagai bahan edukasi dan publikasi institusi.

Pagu Anggaran: Rp 30.000.000,-; Realisasi Anggaran: Rp 29.972.331,- dan Sisa Anggaran: Rp 27.669,-.

6. On the job training dalam rangka pelayanan prima pada petugas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan

Kegiatan On the Job Training (OJT) dalam rangka pelayanan prima pada petugas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, khususnya pada proses penerbitan dokumen kesehatan kekarantinaan. Melalui metode pembelajaran langsung di tempat kerja, petugas memperoleh pengalaman praktis mengenai standar pelayanan, etika pelayanan publik, komunikasi efektif, penanganan keluhan, penerapan standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan sistem informasi pelayanan. OJT juga menjadi sarana untuk memperkuat budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan meningkatnya kompetensi petugas, diharapkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, ramah, profesional, dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Input:

a) Anggaran pelaksanaan On the Job Training.
b) Petugas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan sebagai peserta OJT.
c) Mentor atau instruktur yang berpengalaman dalam pelayanan publik dan penerbitan dokumen kesehatan.

d) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan dokumen kesehatan. Standar pelayanan dan pedoman pelayanan prima.
e) Sistem informasi pelayanan dan sarana pendukung operasional.
f) Materi pelatihan terkait pelayanan prima, komunikasi efektif, dan penanganan pengaduan.
g) Komitmen pimpinan dan Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas.

Output:

a) Terlaksananya kegiatan On the Job Training bagi petugas pelayanan penerbitan dokumen kesehatan.
b) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar.
c) Meningkatnya pemahaman petugas mengenai prinsip-prinsip pelayanan prima dan budaya kerja berintegritas.
d) Meningkatnya kemampuan petugas dalam berkomunikasi dan memberikan solusi kepada pengguna layanan.
e) Meningkatnya kepatuhan terhadap SOP dan standar pelayanan yang berlaku.
f) Tersusunnya dokumentasi dan laporan pelaksanaan OJT sebagai bahan evaluasi.
g) Terbangunnya budaya kerja yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Pagu Anggaran: Rp 80.996.000,-; Realisasi Anggaran: Rp 79.900.000,-; dan Sisa Anggaran: Rp 1.096.000,-.

4.1.6 PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN KETATAUSAHAAN/DUKUNGAN MANAJEMEN

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang pegawai berhak mendapatkan gaji beserta tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain gaji pokok, yang diterima oleh pegawai meliputi tunjangan suami/istri PNS, tunjangan anak, tunjangan struktural apabila menjabat sebagai struktural, tunjangan fungsional apabila menjabat sebagai pegawai teknis fungsional, tunjangan beras, tunjangan uang makan, tunjangan umum (gaji ke-13 dan 14), tunjangan kinerja dan belanja uang lembur. Pada tahun 2025, *Input* untuk alokasi pagu untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp 20.144.646.000,-.

Outputnya yaitu tercapainya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember sebesar Rp 19.975.152.461,- (99,16 %).

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran juga dibutuhkan agar penyelenggaraan operasional perkantoran dapat dilaksanakan tanpa kendala-kendala sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi efisien dan efektif serta dapat memberikan hasil yang optimal.

Keperluan sehari-hari perkantoran meliputi: air minum untuk pelayanan, konsumsi, honor dan Lembur PPPK Paruh waktu, kebutuhan sehari-hari perkantoran, PBB rumah dinas, percetakan dokumen ketatausahaan, pembayaran outsourcing tenaga satuan pengamanan, petugas kebersihan, supir. Sedangkan dukungan terhadap penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi langganan daya dan jasa meliputi: listrik, telepon dan air, paket internet wilker, paket internet pelayanan, c-pannel, langganan internet kantor induk, chat GPT, dan google storage, pemeliharaan server dan jaringan internet (LAN). Pemeliharaan Kantor (gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin) meliputi : gedung kantor tidak bertingkat dan rumah jabatan, pemeliharaan halaman gedung kantor dan rumah jabatan, pemeliharaan gedung kantor bertingkat, pemeliharaan peralatan dan mesin (pemeliharaan inventaris kantor, printer, PC, AC, Genset, isi ulang APAR, lift, peralatan fungsional, kalibrasi alat kesehatan dan laboratorium, alat kesehatan dan laboratorium, kalibrasi alat kesling, pemeliharaan alat kesling, pemeliharaan kendaraan roda 4, 6, 2, 3, perpanjang STNK roda 2, 3, 4 dan 6. Pembayaran terkait operasional kantor meliputi: belanja daya tahan tubuh pegawai, kebugaran pegawai, honor pengelola keuangan, pakaian dinas pegawai dan kelengkapannya, honor UAKPA/UAKPB, honor administrasi BMN, honor operasional satuan kerja, sewa kendaraan pejabat.

Input dari kegiatan ini yaitu dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp 7.421.336.000,-. *Outputnya* yaitu kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran berjalan lancar dan telah terealisasi sebesar Rp7.401.888.439,- (99,74%).

3. Layanan BMN

Kegiatan dalam layanan BMN yaitu untuk kegiatan pengelolaan BMN belanja perjalanan dinas dalam kota. Anggaran ini digunakan untuk Pembayaran uang harian dan transport lokal kegiatan pertemuan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027 Tingkat satuan Kerja Ditjen P2 Kemenkes RI pada tanggal 23 s.d 26 September 2025

di Gedung record Center Ditjen P2 Jalan Percetakan Negara Nomor 29 Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) orang selama 4 (empat) hari.

Input dari kegiatan ini adalah tersedianya anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota pada komponen layanan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan untuk pembayaran uang harian dan transport lokal peserta kegiatan pertemuan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2027 tingkat satuan kerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2) Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 1.354.000,-

Outputnya adalah terlaksananya pembayaran uang harian dan transport lokal bagi 1 (satu) orang peserta kegiatan pertemuan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2027 tingkat satuan kerja Ditjen P2 Kementerian Kesehatan RI selama 4 (empat) hari sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta tersusunnya usulan kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2027 secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan satuan kerja.

Outcome dari kegiatan ini Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2027 melalui tersedianya data dan usulan kebutuhan BMN yang lebih akurat, efektif, dan selaras dengan kebutuhan operasional satuan kerja Ditjen P2 Kementerian Kesehatan RI. Realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp 1.352.000,- (99,85%).

4. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi

Kegiatan dalam hal ini yaitu pelayanan humas yang di dalamnya terdiri dari: pembuat artikel buletin, pembuat artikel website dan media KIE. *Input* dari kagiatan ini yaitu: SDM humas, anggaran sebesar Rp 10.050.000,-., sarana dan prasarana (komputer, kamera, internet, aplikasi design). Output dari kegiatan ini yaitu: tercetaknya spanduk hari karantina kesehatan nasional dalam rangka pembuatan media KIE, tercetaknya spanduk Dirgahayu RI dalam rangka Media KIE, dibayarkannya honor Penulis Artikel Buletin Info kesehatan pelabuhan Volume XX Edisi 1 Tahun 2025 sebanyak 41 Artikel, dibayarkannya Honor Pembuat Artikel WebSite Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2025, sebanyak 5 orang 24 halaman, dibayarkannya honor Penulis Artikel Buletin Info kesehatan pelabuhan Volume XX Edisi 2 Tahun 2025 sebanyak 35 Artikel. *Outcomenya:* Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program dan layanan instansi, Meningkatnya citra positif dan kepercayaan publik terhadap organisasi, Meningkatnya efektivitas

penyebarluasan informasi dan edukasi kesehatan. Realisasi anggaran dari kegiatan ini yaitu sebesar Rp 9.850.000,- (98,01%).

5. **Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal**

Kegiatan terdiri dari koordinasi lintas sektor terkait hukum dan organisasi. Pada tahun 2025 tidak ada undangan dari pusat ataupun kegiatan terkait dengan anggaran ini, sehingga anggaran untuk layanan organisasi dan tata kelola internal ini dipindahkan untuk kegiatan layanan umum, sehingga hanya terdapat sisa pagu Rp 5.000,- untuk kegiatan ini dan tidak ada penyerapan anggaran (0%).

6. **Layanan Umum**

Kegiatan ini terdiri dari pembayaran untuk langganan zoom meeting, langganan aplikasi cana, langganan aplikasi capcut serta pengelolaan barang jasa, serta koordinasi lintas sektor lintas program terkait layanan umum.

Input untuk kegiatan ini yaitu tersedianya anggaran sebesar Rp 54.133.000,-; tersedianya SDM pengelola administrasi, pengadaan barang/jasa, dan tata kelola; langganan aplikasi digital (Zoom Meeting, Canva Pro, CapCut Pro); tersedianya perangkat komputer, internet, dan sarana pendukung lainnya; regulasi dan pedoman pengelolaan barang/jasa; data kebutuhan koordinasi lintas sektor dan lintas program.

Output kegiatan ini yaitu terdapat kegiatan antara lain:

No	Rincian Kegiatan
1	Pembayaran transport lokal Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam rangka pembinaan terkait data dan program surveilans di wilayah kerja pelabuhan laut sunda kelapa pada tanggal 20 Januari 2025 sebanyak 4 org,
2	Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor dalam rangka Pengambilan Vaksin Yellow Fever dan Vaksin Tifoid di BKK Kelas I Bandung tanggal 15 Mei 2025 sebanyak 1 (satu) orang,
3	Pembayaran transport lintas sektor dalam rangka pertemuan rekon data BPJS utk PPNPN/PPPK tahun 2025 di Kantor walikota jakarta timur tgl 4 Juni 2025,
4	Uang harian dan transpor mengikuti kegiatan penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Program P2P T.A. 2026 di Ruang Rapat Aula A – Gedung D, Jl. Percetakan Negara No. 29 – Jakarta Pusat pada tanggal 19, 20 dan 22 Mei 2025 sebanyak 2 orang,

No	Rincian Kegiatan
5	Pembayaran transport kordinasi lintas sektor dlm rangka sosialisasi langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2025 dan KPPN Jakarta VII Award tahun 2024 tgl 23 mei 2025 utk 2 pegawai,
6	Transport lokal koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Muara Baru pada tanggal 13 Juni 2025 sebanyak 2 orang,
7	Transport lokal koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kalibaru pada tanggal 12 Juni 2025 sebanyak 2 orang,
8	Transport lokal koordinasi lintas program lintas sektor terkait layanan umum di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda pada tanggal 11 Juni 2025 sebanyak 2 orang,
9	Transport Mengikuti Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Investigasi Dan Penyelesaian Permasalahan Pegawai Di Ruang Rapat Sekeretaris Dirjan Penanggulangan Penyakit Gedung Adyatma Lantai 9 Kementerian Kesehatan Jalan Hr Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarat Selatan 12950,
10	Pembayaran transport lokal Bimbingan Teknis terkait Pelayanan Publik di Wilker Muara Angke tanggal 17 Juni 2025 sebanyak 5 (lima) orang,
11	transport konsultasi petugas dalam rangka Pelaksanaan Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Terkait Pelayanan Umum ke BBKK Tanjung Priok pada tanggal 13 Juni 2025 sebanyak 1 (satu) orang selama 1 (satu) hari,
12	Uang harian, penginapan dan transpor mengikuti kegiatan pertemuan penyusunan Rencana Aksi Program (RAP) dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit Tahun 2025-2029 di Hotel Santika Mega City Bekasi Bekasi pada tanggal 24-26 Juni 2025 sebanyak 2 orang,
13	Koordinasi lintas program lintas sektor terkait rapat pemutakhiran data SISDMK di Ruang Rapat Pola Lantai 2 Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara jalan Laksda Yos Sudarso No.27 pada tanggal 10 Juli 2025 sebanyak 2 orang,
14	Pembayaran transport kegiatan bimbingan tekhnis Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I TA 2025 di Aula Lantai 7 Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Juli 2025 sebanyak 1 orang,

No	Rincian Kegiatan
15	Pembayaran transport lokal petugas Konsultasi Teknis Program dari Wilker Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru ke Induk pada tanggal 16 Juli 2025 sebanyak 1 orang,
16	Pembayaran transport dan uang harian dalam Rangka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kajian Kerentanan Bangunan di Gedung Direktorat Aula Lantai IV Politeknik Kesehatan Jakarta III, Jalan Alteri JORR Jatiwarna , Pondok Melati, Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2025, sebanyak 2 (dua) orang,
17	Pembayaran uang harian dan uang representatif dalam Rangka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kajian Kerentanan Bangunan di Gedung Direktorat Aula Lantai IV Politeknik Kesehatan Jakarta III, Jalan Alteri JORR Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2025, sebanyak1 (satu) orang,
18	Pembayaran transport lokal mengikuti perlombaan E-Sport di Lingkungan Kantor Pusat dan UPT Kementerian Kesehatan di Aula Prof. Dr. GA. Siwabessy dan lapangan upacara Kementerian Kesehatan pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2025 sebanyak 5 (lima) orang,
19	Pembayaran transport lokal koordinasi lintas program lintas sektor dalam rangka Upacara Bendera di Kementerian Kesehatan Jalan Rasuna Said tanggal 17 Agustus 2025,
20	Pembayaran uang harian dan transport kegiatan turnamen domino DPC Insa Jaya 2025 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan, Sunter Jaya, Jakarta Utara tanggal 7 September 2025 sebanyak 5 (lima) orang,
21	Pembayaran Zoom Meeting,
22	Pembayaran transport konsultasi SKPP pensiunan, perekaman data supplier uang makan CPNS pada Aplikasi SAKTI dan perhitungan pembayaran pajak kekurangan tunjangan kinerja pada Aplikasi SAKTI di KPPN Jakarta IV tanggal 16 September 2025 sebanyak 3 orang,
23	Pembayaran uang harian dan transport kegiatan penguatan pembelajaran berkaitan penggunaan aplikasi penomoran surat elektronik selain aplikasi srikandi yang telah diimpelemntasikan di BBKK Soekarno Hatta tanggal 19 September 2025 sebanyak 5 (lima) orang,

No	Rincian Kegiatan
24	Pembayaran transport lokal konsultasi lanjutan SKPP pensiunan a.n dr. Nyoman untuk proses perubahan data pada Aplikasi Gaji Web di KPPN Jakarat VII tanggal 30 September 2025 sebanyak 4 orang,
25	Pembayaran uang harian dan transport kegiatan pertemuan Diseminasi Hasil Focus Group Discussion Population Connectivity Across Borders (PopCAB) pada tanggal 30 September 2025 di Ruang Aula 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jalan tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 2 (dua) orang selama 1 (satu) hari,
26	Pembayaran transport dan uang harian kegiatan Sharing Session penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Tinjauan Kinerja (SITIKA) di Kantor Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto pada tanggal 3 Oktober 2025 sebanyak 6 orang,
27	Pembayaran transport lokal konsultasi terkait SHR Bulan September dan penolakan SPM di KPPN Jakarta VII Tanggal 7 Oktober 2025,
28	Uang transport Petugas Kegiatan Donor Darah dan Pemeriksaan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dalam Rangka Koordinasi Lintas Program Lintas Sektor Terkait Layanan Umum pada tanggal 21 Oktober 2025 sebanyak 12 orang,
29	Pembayaran biaya berlangganan aplikasi capcut selama 30 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2026,
30	Pembayaran Transport Upacara dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke-97 pada tanggal 28 Oktober 2025 di Kementerian Kesehatan RI sebanyak 11 orang,
31	Uang transport mengikuti undangan pelaksanaan giat Car Free Day kampanye masif Tuberkulosis (TBC) dilokasi utama Jalan Iman Bonjol Plaza Timur Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta tanggal 09 November 2025 sebanyak 5 orang,
32	Pembayaran uang transport lokal undangan kegiatan Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 Tahun 2025 di Lapangan Upacara Kementerian Kesehatan RI, Kuningan-Jakarta Selatan, tanggal 12 November 2025 sebanyak 11 orang,

No	Rincian Kegiatan
33	Pembayaran transport lintas sektor dalam rangka pertemuan rekon BPJS untuk PPPK Pusat dan PPNPN tgl 19 November 2025 di Kantor Walikota Jakarta Timur,
34	Pembayaran transport lokal konsultasi terkait pembuatan SKPP pensiun atas nama Atim untuk proses penghitungan gaji pengabdian di KPPN Jakarata VII tanggal 14 November 2025,
35	Pembayaran uang harian mengikuti upacara tabur bunga dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-61 Tahun 2025 di TPU Sandiego Hills, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 18 November 2025 sebanyak 2 orang,
36	Uang transport undangan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lapangan upacara kementerian kesehatan Republik Indonesia Jalan H.R. Rasuna Said No. Kav 4-9 Blok X-5 Kuningan Jakarta Selatan tanggal 01 Desember 2025 sebanyak 11 orang,
37	Pembayaran uang harian dan penginapan dalam rangka pertemuan Finalisasi Tools Penilaian, Evaluasi Penyelenggaraan dan Juknis Surveilans Sentinel Influenza Iloike Illness/ILI di Pintu Masuk, di UPTD Pelatihan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsu Jawa Barat tanggal 26 - 27 November 2025, sebanyak 1 (satu) orang,
38	Pembayaran transport lokal menghadiri festival inovasi kesehatan di kartika expo, jakarta selatan tgl 9 Desember 2025 sebanyak 6 orang,
39	Pembayaran transport lokal dalam rangka Pameran Hari Kesehatan Nasional ke 61 tentang Festival Inovasi Kesehatan 2025 Tanggal 8 Desember 2025 sebanyak 5 (lima) orang,
40	Pembayaran transport pada kegiatan Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Gedung Adhyatma Blok C lantai 7 Kementerian Kesehatan Jalan H.R.Rasuna Said Blok X Nomor 1 Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 16 Desember 2025 sebanyak 4 (empat) orang,
41	Transport lokal dalam rangka upacara hari ibu ke 97 pada tanggal 22 desember 2025 sebanyak 10 orang di lapangan upacara Ditjen SDMK Kementerian kesehatan,

No	Rincian Kegiatan
42	Pembayaran transport, uang harian, penginapan survey pengadaan barang dan jasa luar kota (pengadaan pakaian dinas pegawai),
43	Uang harian dan transport perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti IELTS trial test mencakup kemampuan listening, reading, writing tanggal 18 Februari 2025 di BBPK Jakarta Kampus Cilandak, Jl. Wijaya Kusuma No.45 RT9/RW 4, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan,
44	Transpor rohaniwan pelantikan pejabat fungsional.

Outcome untuk kegiatan ini yaitu: meningkatnya efektivitas koordinasi dan komunikasi organisasi, meningkatnya kualitas tata kelola dan administrasi internal, meningkatnya efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Meningkatnya dukungan operasional terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Realisasi untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp 53.163.699,- (98,21%).

7. Layanan Data dan Informasi

Kegiatan ini terdiri dari data dan informasi Ditjen Pengendalian Penyakit yaitu untuk anggaran Penyusunan Profil BBKK Tanjung Priok. *Input* dari kegiatan ini yaitu dianggarkannya biaya sebesar Rp 340.000,-. *Outputnya* dibayarkannya uang transport untuk menghadiri undangan pertemuan penyusunan profil tahun 2024 pada tanggal 10 Januari 2025 di Ruang Rapat Onrust Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok , sebanyak 2 orang. *Outcomenya* yaitu: meningkatnya ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai BBKK Tanjung Priok, meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap tugas, fungsi, layanan, dan capaian BBKK Tanjung Priok, meningkatnya citra positif dan kepercayaan publik terhadap BBKK Tanjung Priok, serta meningkatnya efektivitas penyebarluasan informasi dan promosi layanan organisasi. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 340.000,- (100%).

8. Layanan Manajemen SDM

Kegiatan ini terdiri dari layanan administrasi kepegawaian Ditjen P2P yang meliputi: koordinasi lintas sektor lintas program terkait kepegawaian dan umum, simulasi penanggulangan kebakaran dan penggunaan APAR, serta pengukuhan peserta Saka Bakti Husada. *Input* dari kegiatan ini yaitu: tersedianya anggaran sebesar Rp 15.097.000,-; tersedianya SDM pengelola kepegawaian dan administrasi umum; terdapat narasumber/instruktur simulasi kebakaran dan penggunaan APAR; terdapat

sarana dan prasarana pelatihan (APAR, alat simulasi, ruang pertemuan, perlengkapan kegiatan); terdapat peserta kegiatan (pegawai dan anggota Saka Bakti Husada). *Outputnya* yaitu: dibayarkannya konsumsi kegiatan pengukuhan anggota saka bakti husada pangkalan balai besar kekarantinaan kesehatan tanjung priok angkatan I tanggal 29 Oktober 2025 sebanyak 48 orang, dibayarkannya transport kegiatan pengukuhan anggota saka bakti husada pangkalan balai besar kekarantinaan kesehatan tanjung priok angkatan I tanggal 29 Oktober 2025 sebanyak 8 orang, dibayarkannya komsumsi kegiatan simulasi penanggulangan kebakaran api ringan (APAR) di Lingkungan BBKK Tanjung Priok, dibayarkannya honor Narasumber Kegiatan Simulasi Penanggulangan Kebakaran dan Penggunaan APAR di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok pada tanggal 31 Oktober 2025 sebanyak 3 orang. *Outcomenya* yaitu: meningkatnya efektivitas koordinasi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, meningkatnya kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi keadaan darurat kebakaran dan penggunaan APAR secara tepat, meningkatnya kesadaran dan budaya keselamatan kerja di lingkungan kerja, meningkatnya kapasitas, kompetensi, dan pembinaan generasi muda kesehatan melalui Saka Bakti Husada, meningkatnya kualitas dukungan administrasi kepegawaian dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp 14.698.000,- (97,36%).

9. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Kegiatan ini terdiri dari diklat seminar kursus dukungan manajemen meliputi: biaya penyelenggaraan masa pengembangan (Narakarya) serta uang harian dan trasnport untuk Diklat Pelatihan Manajerial Leader. Input dari kegiatan ini yaitu: dialokasikannya anggaran sebesar Rp 3.090.000,-; tersedianya SDM penyelenggara kegiatan; tersedianya narasumber, fasilitator, dan mentor; Sarana dan prasarana pelatihan (ruang pelatihan, perangkat IT, internet, alat tulis); Modul, bahan ajar, dan kurikulum pelatihan; Dukungan biaya transportasi dan uang harian peserta. *Output* dari kegiatan ini yaitu: dilaksanakannya Diklat Managerial Leader batch 3 dalam rangka Layanan Pendidikan dan Pelatihan SDM Ditjen P2 pada tanggal 08 - 19 September 2025 sebanyak 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) hari; dilaksanakannya Pembayaran Iuran Nara Karya Dasar Selama 6 (enam) bulan Juli s.d Desember 2025 an. Agi Gunawan Wibisono dan Indra Felani sebanyak 2 (dua) orang; sertifikat atau bukti kelulusan peserta pelatihan. *Outcome* dari kegiatan ini yaitu: meningkatnya kompetensi manajerial dan kepemimpinan pegawai; meningkatnya kemampuan

pegawai dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan pengelolaan organisasi; meningkatnya profesionalisme dan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi; meningkatnya kapasitas SDM untuk mendukung pencapaian target organisasi; serta terwujudnya kader pemimpin yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 3.090.000,- (100%).

10. Layanan Perencanaan dan Anggaran

Kegiatan ini terdiri dari rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen serta kordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program meliputi: rapat penyusunan dokumen RKAKL, pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan anggaran dan revisi anggaran, penyusunan target pagu PNBP.

Input dari kegiatan ini yaitu: tersedianya anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 21.968.000,-; tersedianya SDM perencana program dan keuangan; tersedianya data capaian kinerja program P2P dan dukungan manajemen; tersedianya data kebutuhan anggaran unit kerja; tersedianya dokumen Renstra, RKP, Kebijakan Kemenkes, dan regulasi perencanaan penganggaran; tersedianya data target dan realisasi PNBP; tersedianya sarana prasarana rapat dan koordinasi (ruang rapat, komputer, internet, aplikasi perencanaan).

Output dari kegiatan ini yaitu: dibayarkannya uang harian, representatif dan transport dalam rangka Updating Petunjuk Perencanaan Ditjen Penanggulangan Penyakit TA. 2026 pada tanggal 30 September s.d. 02 Oktober 2025 sebanyak 3 orang; dibayarannya uang penginapan mengikuti Updating Petunjuk Perencanaan Ditjen Penanggulangan Penyakit T.A. 2026 pada tanggal 30 September s.d. 02 Oktober 2025 di Wisma Sukajadi Bandung Jalan Sukajadi Nomor 155, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung sebanyak 2 orang; dibayarkannya uang transpor, uang harian, dan uang penginapan mengikuti undangan finalisasi penyusunan alokasi anggaran Tahun 2026 satuan kerja di Lingkungan Ditjen P2 pada tanggal 13-15 Oktober 2025 di Wisma Sukajadi Bandung Jalan Sukajadi Nomor 155, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung sebanyak 3 orang; dilakukannya Pembayaran Transport, Uang Harian dan Penginapan Pertemuan Penyusunan Target Pagu PNBP TA 2027 di lingkungan Kementerian Kesehatan di Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto, Jawa Barat tanggal 12 s.d. 13 November 2025 sebanyak 3 (tiga) orang; pembayaran Transport, Uang Harian dan Penginapan mengikuti Pertemuan Penyusunan Penyusunan Target dan Pagu PNBP T.A. 2027 dan Pendipaan Hibah Langsung T.A.

2025 di Lingkungan Ditjen Penanggulangan Penyakit di Ruang Rapat Ditjen P2P – Gedung Record Center Jalan Percetakan Negara No.29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta tanggal 2 s.d. 5 Desember 2025 sebanyak 2 (dua) orang.

Outcome dari kegiatan ini yaitu: meningkatnya kualitas perencanaan program dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; meningkatnya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja organisasi; meningkatnya ketepatan alokasi sumber daya untuk mendukung program P2P dan dukungan manajemen; meningkatnya kualitas pengelolaan PNBP dan pemanfaatannya dalam mendukung layanan organisasi; serta meningkatnya pencapaian target program dan kinerja organisasi. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini yaitu Rp 21.097.362,- (96, 04%).

11. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan ini terdiri dari penyusunan evaluasi pelaksanaan program, penyusunan laporan tahunan satker, penyusunan LAKIP, serta pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P.

Input dari kegiatan ini yaitu: tersedianya anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 23.308.000,-; tersedianya SDM perencana, evaluator, dan pengelola data; tersedianya data capaian indikator kinerja program dan kegiatan; tersedianya data realisasi fisik dan keuangan; tersedianya dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PK, RKA-K/L); tersedianya pedoman penyusunan LAKIP dan laporan kinerja; tersedianya sarana dan prasarana pendukung (komputer, aplikasi pengolahan data, internet, ruang rapat).

Output dari kegiatan ini yaitu: tersusunnya dokumen evaluasi pelaksanaan program P2P; tersusunnya Laporan Tahunan Satuan Kerja (Satker); tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); terlaksananya pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P; tersusunnya rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi program; dan tersedianya data dan informasi kinerja yang terdokumentasi.

Outcome dari kegiatan ini yaitu: meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi; meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan anggaran; meningkatnya kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan hasil evaluasi; meningkatnya efektivitas pelaksanaan program P2P melalui perbaikan berkelanjutan; serta meningkatnya pencapaian target kinerja organisasi dan kualitas tata kelola pemerintahan. Realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.523. 200,- (36,57%). Untuk kegiatan ini realisasi tidak terlalu besar,

hal ini disebabkan karena untuk pertemuan evaluasi pelaksanaan program P2P ini hanya terdapat 1 kali undangan saja dari pusat sehingga masih terdapat sisa anggaran yang cukup banyak.

12. Layanan Manajemen Keuangan

Kegiatan ini terdiri dari pengelolaan keuangan Ditjen P2P, pelaksanaan koordinasi lintas sektor lintas program pengelolaan keuangan dan anggaran yang meliputi: penyusunan Laporan Keuangan, sosialisasi peraturan dan koordinasi pengelolaan PNBP pada pihak internal dan eksternal, rekonsiliasi data PNBP, koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran.

Input dari kegiatan ini yaitu: tersedianya anggaran sebesar Rp 19.522.000,-; tersedianya SDM pengelola keuangan, bendahara, dan pengelola PNBP; tersedianya data transaksi keuangan dan realisasi anggaran; tersedianya data target dan realisasi PNBP; tersedianya regulasi pengelolaan keuangan negara dan PNBP; tersedianya Aplikasi pengelolaan keuangan (SAKTI, OM-SPAN, SIMPONI, dll.); tersedianya sarana dan prasarana pendukung (komputer, internet, ruang rapat).

Output dari kegiatan ini yaitu: tersusunnya laporan keuangan satker secara periodik dan tahunan; terlaksananya sosialisasi peraturan pengelolaan keuangan dan PNBP kepada pihak internal dan eksternal; terlaksananya rekonsiliasi data PNBP secara berkala; terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran; tersusunnya laporan realisasi anggaran dan PNBP; Tersusunnya rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan dan PNBP.

Outcome dari kegiatan ini yaitu: meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan anggaran yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; meningkatnya ketepatan dan keandalan laporan keuangan serta data PNBP; meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara dan PNBP; meningkatnya koordinasi antar program dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan; dan meningkatnya optimalisasi penerimaan dan pengelolaan PNBP untuk mendukung pelaksanaan program organisasi. Realisasi untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp 19.136.300,- (98,02%).

13. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Kegiatan ini terdiri dari penyelengaraan kearsipan, meliputi: penataan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan; pengelolaan arsip dan pendukung perlengkapan kearsipan; penyusutan arsip; pemusnahan arsip; peningkatan SDM kearsipan dalam pengelolaan arsip digital.

Input dari kegiatan ini yaitu: kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 40.264.000,-; tersedianya SDM pengelola arsip dan persuratan; tersedianya arsip aktif dan inaktif yang dikelola; tersedianya pedoman dan regulasi kearsipan (UU Kearsipan, JRA, SOP); tersedianya sarana dan prasarana kearsipan (lemari arsip, rak arsip, boks arsip, scanner, komputer, aplikasi arsip digital); tersedianya narasumber atau pelatih pengelolaan arsip digital.

Output dari kegiatan ini yaitu: dilakukannya pembayaran konsumsi dan uang harian serta transport kegiatan penilaian arsip dalam rangka penyusutan dan pemunsahan arsip BBKK Tanjung Priok di ruang rapat rajawali lantai 2 sebanyak 43 orang; pembelian konsumsi kegiatan penataan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan pada tanggal 14 April 2025; Pembelian konsumsi dan transport lokal peserta kegiatan pengelolaan arsip dan pendukung perlengkapan kearsipan pada tanggal 15 Agustus 2025; dilakukannya pembayaran uang harian, transport dan penginapan kegiatan workshop peningkatan SDM kearsipan dalam pengelolaan arsip digital di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang pada tanggal 29 -31 Oktober 2025 sebanyak 2 (dua) orang.

Outcome dari kegiatan ini yaitu: meningkatnya kualitas tata kelola arsip dan persuratan yang tertib, aman, dan akuntabel; meningkatnya kemudahan akses, penelusuran, dan pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi organisasi; meningkatnya efisiensi ruang penyimpanan arsip melalui penyusutan dan pemusnahan arsip yang sesuai ketentuan; meningkatnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital dan transformasi digital kearsipan; meningkatnya kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan standar kearsipan nasional. Realisasi untuk kegiatan ini yaitu: Rp 40.063.200,- (99,50%).

4.2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Sumber dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tiap bulannya di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a) COP (*Certificate of Pratiquel)*
b) SSCEC
c) SSCC
d) Buku Kesehatan Kapal
e) PHQC
n) Vaksin Yellow Fever
o) Vaksin Meningitis

f) Sertifikat Keterangan OMKABA

g) Sertifikat Obat dan Alat P3K

h) Buku ICV

i) Pemeriksaan dan Pengobatan

j) Surat Izin Pengangkutan Jenazah

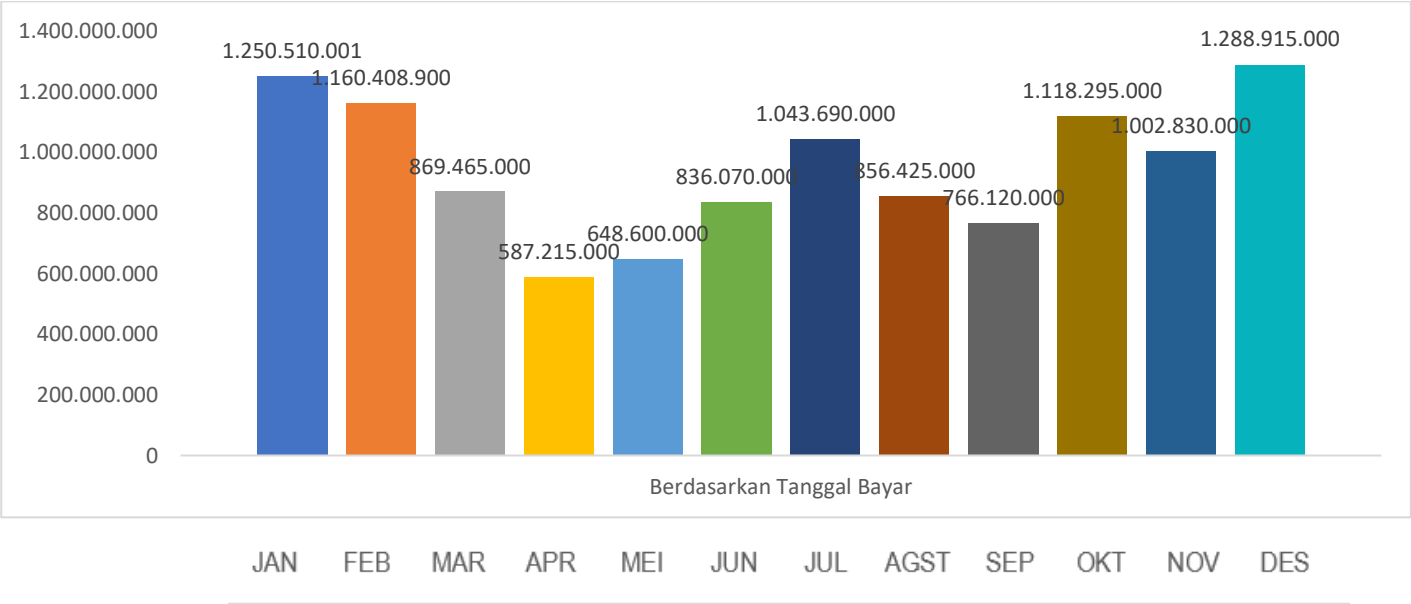
k) Surat Izin Pengangkutan Orang Sakit

l) Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga

m) Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut Kapal

Target penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok tahun 2025 sebesar Rp 6.180.900.000,- dan telah tercapai sebesar Rp 11.428.543.901,- atau 184,90% dengan rincian tiap bulannya sebagai berikut :

Grafik 4. 56 Penerimaan PNBP BBKK Tanjung Priok Tahun Anggaran 2025



4.3. PENCAPAIAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBKK Tanjung Priok memilki delapan indikator kinerja. Pada tahun 2025, pelaksanaan kegiatan BBKK Tanjung Priok telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 13 Hasil Pencapaian Kinerja BBKK Tanjung Priok Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0.93	0.97	104.30%
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100.00%	100.00%	100.00%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	1	1,00	100,00%
4	Nilai kinerja anggaran	85.5	99.01	115.13%
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	98.02	104.28%
6	Kinerja implementasi WBK satker	82.5	89.86	108.92%
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	82.50%	100.00%	121.21%
8	Persentase Realisasi Anggaran	96.50%	99,24%	85.92%
Rata-Rata				**107,17%**

4.4. REFORMASI BIROKRASI

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Selain itu reformasi birokrasi merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan suatu poses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang mengurusi segala hal yang diperlukan oleh masyarakat baik itu pemenuhan hak-hak sipil dan pemenuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentunya banyak kendala yang dihadapi pemerintah, baik itu menyangkut aspek sumber daya manusia, kebijakan tentang pelayanan serta ketersedian fasilitas yang masih kurang untuk menunjang terselenggaranya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itulah dilakukan

berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan itu sekaligus mampu menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih. Reformasi Birokrasi di lingkungan BBKK Tanjung Priok pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh tata nilai dan kode etik pegawai.

Sejak digulirkan akhir tahun 2012 tentang Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di BBKK Tanjung Priok, perlahan namun pasti, perubahan-perubahan kecil terjadi. Seiring dengan terus disosialisasikannya budaya anti korupsi di lingkungan BBKK Tanjung Priok dan juga kebijakan pimpinan untuk menciptakan BBKK Tanjung Priok yang bebas dari korupsi serta komitmen berupa penandatanganan pakta integritas dari segenap unsur yang ada. BBKK Tanjung Priok semakin memperbaiki diri.

Pada tahun 2015, BBKK Tanjung Piok mendapat kehormatan ditunjuk sebagai satker yang melaksanakan pembayaran PNBP secara *online* oleh Kementerian Keuangan, gayung pun bersambut, seiring cita-cita BBKK Tanjung Priok untuk menciptakan wilayah yang bersih tanpa pungli dan gratifikasi, pembayaran PNBP yang *cashless* dapat berjalan dengan baik. Setelah satu tahun berjalan dan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, BBKK Tanjung Piok mendapatkan penghargaan sebagai pengelola PNBP terbaik.

BBKK Tanjung Priok pada tahun 2016 mendapatkan kesempatan untuk dinilai oleh Kementerian PAN dan RB sebagai satker yang diusulkan untuk WBK, dan ternyata hasilnya BBKK Tanjung Priok mendapatkan predikat WBK.

Pada tahun 2017, BBKK Tanjung Piok memperbaiki layanan publik, memperbaiki pola pelayanan vaksinasi dengan motto Senyum, Sapa dan Salam (3S), mengaktifkan pengaduan masyarakat, *sharing* informasi kepada publik melalui *web site*, dan terus berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak melakukan pungli.

Pada tahun 2019 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dilakukan *Self Assesment* terhadap Satker yang diusulkan sebagai Satker berpredikat WBBM oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI. Walaupun hasil dari penilaian tersebut belum memenuhi persyaratan namun kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraihnya.

Pada tahun 2020 telah dilakukan *Self Assesment* sebagai Satker berpredikat WBBM oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI tetapi hasilnya belum memenuhi syarat sehingga Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok masih berusaha untuk meraih predikat WBBM pada tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2021 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 91, 63.

Pada tahun 2022 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 87,61.

Pada tahun 2023 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 87,28.

Pada tahun 2024 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 97,46.

Pada tahun 2025 telah dilakukan *Self Assesment* di BBKK Tanjung Priok sebagai Satker berpredikat WBK oleh tim penilai Internal Kementerian Kesehatan RI bagian HUKORMAS P2P dan mendapat nilai 89,86.

Pencapaian ini tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak serta pembinaan dari Direktoat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Predikat yang diraih bukan akhir dari perjuangan, namun merupakan awal dari perjalanan untuk menempuh pencapaian berikutnya. Semoga BBKK Tanjung Priok terus memegang komitmen untuk bisa meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun berikutnya.

4.5. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Sepanjang tahun 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok mendapatkan penghargaan yaitu:

1. Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

Gambar 4. 1 Penghargaan Penyampaian LPJ Terbaik BBKK Tanjung Priok.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok cukup baik, hal ini terlihat dari ikut sertanya pegawai dalam pelatihan-pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh BBKK maupun unit eselon 1.
2. Kegiatan Surveilans Epidemiologi meliputi pengamatan penyakit menular melalui alat angkut, pengamatan penyakit menular melalui awak kapal & penumpang, respon sinyal kewaspadaan dini (SKD)/KLB/bencana di Wilayah layanan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok dan deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit telah dilaksanakan.
3. Kegiatan pendukung surveilans epidemiologi berupa jejaring koordinasi internal dan eksternal serta melakukan bimbingan teknis internal dalam rangka sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan telah dilaksanakan.
4. Kegiatan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan serta tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan sudah dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tahun yang akan datang.
5. BBKK Tanjung Priok saat ini memiliki aplikasi SABATA (Satu Bank Data) sebagai aplikasi sederhana untuk pengolahan data.
6. Kegiatan kekarantinaan meliputi pengawasan dan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan *COP*, Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC (*Ship Sanitation Control Sertificate/Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) dan pengawasan lalu lintas komoditi omkaba ekspor-impor dan penerbitan dokumen kesehatan kapal dapat 100% dilaksanakan.
7. Kegiatan pendukung kegiatan pengawasan faktor risiko alat angkut dan barang telah dilaksanakan.
8. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan rutin seperti kegiatan kekarantinaan, pelayanan dokumen kesehatan kapal dan pengawasan awak kapal maupun penumpang telah dilaksanakan dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara.
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan (kegiatan pengamanan air dan makanan, pengawasan Jasaboga, leveransir, pengawasan tempat fasilitas umum, serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dalam rangka cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

10. Semua kegiatan yang telah direncanakan oleh Tim Kerja Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan untuk tahun 2025 berjalan dengan baik.
11. Pelayanan kesehatan BBKK Tanjung Priok Tahun 2025 berjalan optimal dan berperan penting dalam pengawasan kesehatan pelabuhan, vaksinasi internasional, serta deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
12. Capaian layanan sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional, mobilitas pelaku perjalanan, serta ketersediaan logistik vaksin dan bahan pendukung pelayanan.
13. Kegiatan skrining dan pemeriksaan laboratorium menunjukkan peran aktif BBKK dalam mendukung program pemerintah dan penjangkauan kelompok sasaran berisiko.
14. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas BBKK Tanjung Priok telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
15. Capaian yang telah diraih selama Tahun 2025 menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pembangunan Zona Integritas pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan BBKK Tanjung Priok sebagai instansi yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.

5.2. SARAN-SARAN

1. Peningkatan kompetensi pegawai secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas dan kompetensi dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan.
2. Pengajuan untuk pelatihan dan pelatihan PPNS sebagai upaya meningkatkan SDM PPNS di lingkungan BBKK Tanjung Priok.
3. Penguatan jaringan internet yang memadai mengingat penerbitan dokumen saat ini adalah dokumen online dari apikasi Sinkarkes serta proses kegiatan surveilans lainnya berupa aplikasi SE dan aplikasi SABATA memerlukan jaringan internet sehingga kegiatan pelayanan dapat berjalan lebih optimal
4. Pengadaan sarana dan prasarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di BBKK Tanjung Priok.
5. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan kepada perusahaan pelayaran serta instansi lainnya secara rutin melakukan tindakan pencegahan masuk dan berkembangnya penyakit melalui awak kapal dan barang yang ada di kapal serta pelanggaran Kekarantinaan.
6. Penambah daya tahan tubuh bagi petugas tetap diadakan di Tahun 2026 sebagai sistem imun tubuh bagi petugas.
7. Kegiatan-kegiatan agar dilaksanakan secara maksimal agar anggaran dapat terserap dengan baik dan optimal.

8. Meningkatkan perencanaan logistik vaksin dan reagen laboratorium berbasis tren layanan untuk mencegah kekosongan stok.
9. Memperkuat penataan sumber daya dan jadwal pelayanan sesuai pola fluktuasi kebutuhan layanan.
10. Mengoptimalkan peran penjangkauan BBKK dalam mendukung program pemerintah dan pengawasan kesehatan pelabuhan.
11. Meningkatkan komitmen dan keterlibatan seluruh pegawai dalam implementasi pembangunan Zona Integritas sehingga budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan dapat terinternalisasi secara berkelanjutan di seluruh unit kerja.
12. Mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas melalui penguatan implementasi enam area perubahan, peningkatan kualitas eviden, serta pemantauan dan evaluasi berkala guna mendukung pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mengoptimalkan pengelolaan media informasi publik, termasuk website, media sosial, dan buletin, sebagai sarana edukasi, transparansi informasi, publikasi kinerja, serta promosi layanan kekarantinaan kesehatan.
13. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyempurnaan standar pelayanan, penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa.
14. Mengoptimalkan pengelolaan media informasi publik, termasuk website, media sosial, dan buletin, sebagai sarana edukasi, transparansi informasi, publikasi kinerja, serta promosi layanan kekarantinaan kesehatan.
15. Mendorong pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan efektivitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap BBKK Tanjung Priok.

Kemenkes
BBKK Tanjung Priok

Jalan Nusantara Raya No.2, Pelabuhan, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310